

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN WAWANCARA

Bagaimana Rencana Strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN PENELITIAN	KETERANGAN
1	Teori Strategi a. Ends b. Means c. Ways	<ol style="list-style-type: none">1. Apa saja cara yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?2. Bagaimana rencana politik luar negeri dan target RI, khususnya kebijakan pertahanan Indonesia dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?3. Bagaimana cara menyelesaikan/mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?	

2		<ol style="list-style-type: none">4. Bagaimana kondisi keamanan nasional Indonesia saat ini dihadapkan dengan konflik persaingan AS-China di Laut China Selatan?5. Mengapa Laut China Selatan penting bagi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional Indonesia? Apa yang membuat LCS penting bagi keamanan nasional Indonesia?6. Apa dan bagaimana kepentingan Indonesia di Laut China Selatan dan strategi apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional?7. Apa dan bagaimana posisi dan kepentingan Indonesia dihadapkan dengan kondisi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?8. Apa tujuan atau rencana strategis yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?	
---	--	---	--

		9. Apa saja ancaman yang perlu diwaspadai Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?	
--	--	--	--

Bagaimana sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Kondisi Saat Ini)?

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN PENELITIAN	KETERANGAN
1	Teori Strategi a. Ends b. Means c. Ways	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? 2. Bagaimana dan apa saja upaya/cara yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? 3. Sumber daya apa saja yang diperlukan/perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga demi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional? 	

2	Teori sinergitas Teori antisipasi Teori Stabilitas	<p>4. Bagaimana strategi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?</p> <p>5. Apa yang sudah dilakukan oleh K/L sebagai upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?</p> <p>6. Apakah ada rencana kegiatan atau program bersama dari K/L yang bersangkutan untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?</p> <p>7. Sejauh mana sinergitas antara K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? Jika dihadapkan dengan fakta saat ini, bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi persaingan AS-China di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas keamanan nasional?</p> <p>8. K/L mana yang menjadi leading sector dalam melaksanakan sinergitas untuk mengantisipasi persaingan</p>	
---	--	--	--

		<p>AS-China di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas keamanan nasional?</p> <p>9. Mengapa diperlukan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? Apa kaitannya dengan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>10. Bagaimana urgensi inergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? Hubungannya dengan penciptaan stabilitas keamanan apa?</p> <p>11. Apa saja faktor yang mempengaruhi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?</p>	
--	--	---	--

Bagaimana Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN PENELITIAN	KETERANGAN
1	Teori Strategi	1. Apa goals/target yang ingin dicapai RI dalam upaya	

	<p>a. Ends</p> <p>b. Means</p> <p>c. Ways</p>	<p>antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>2. Apa saja ancaman yang dihadapi RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>3. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan atau perlu dikembangkan dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p>	
2	<p>Teori sinergitas</p> <p>Teori antisipasi</p> <p>Teori Stabilitas</p> <p>Teori keamanan nasional</p>	<p>4. Bagaimana strategi sinergitas yang dilakukan oleh K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>5. Apa kendala yang dialami oleh K/L dalam melaksanakan strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>6. Bagaimana potensi atau kesempatan strategi sinergitas</p>	

		<p>untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>7. Bagaimana prediksi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dan sejauh mana kesiapan K/L dalam mengantisipasi hal tersebut?</p> <p>8. Bagaimana upaya K/L untuk meningkatkan sinergitas antarlembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>9. Apa saja target capaian dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>10. Apa saja langkah strategis yang dilakukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p>	
--	--	--	--

LAMPIRAN 2 TRANSKIP WAWANCARA

LAMPIRAN 2.1: HASIL WAWANCARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

JAWABAN PERTANYAAN WAWANCARA DALAM RANGKA PENELITIAN DISERTASI

STRATEGI SINERGITAS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DALAM MENGANTISIPASI PERSAINGAN AMERIKA DAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN (STUDI PENGEMBANGAN PENJAGAAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL)

Oleh:

**DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN, DAN BATAS NEGARA,
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINITRASI KEWILAYAHAN,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

JAWABAN PERTANYAAN WAWANCARA DALAM RANGKA PENELITIAN DISERTASI

STRATEGI SINERGITAS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DALAM MENGANTISIPASI PERSAINGAN AMERIKA DAN CHINA DI LAUT CHINA SELATAN (STUDI PENGEMBANGAN PENJAGAAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL)

Pertanyaan penelitian 1.

Bagaimana Rencana Strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Teori Strategi a. Ends b. Means c. Ways	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dan bagaimana cara yang dilakukan oleh Indonesia sesuai tugas dan fungsi K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan? 2. Bagaimana rencana politik luar negeri dan target RI, khususnya kebijakan pertahanan Indonesia dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan? 3. Bagaimana cara menyelesaikan/mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
		<p>Jawaban 1.</p> <p>Indonesia sebagai negara kepulauan yang digunakan sebagai jalur perdagangan global serta penggerak roda ekonomi dunia. Kawasan Asia Pasifik adalah pusat keamanan global paling strategis. Posisi ini mengakibatkan konstelasi konflik serta kerja sama antara negara di kawasan dan negara super power di luar kawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peran aktif Amerika Serikat di kawasan ini memunculkan spekulasi akan stabilitas keamanan kawasan. ➤ Munculnya China dengan kekuatan ekonomi dan militernya membuat AS sadar akan arti geopolitik dan geostrategi di kawasan Asia Pasifik. Persaingan keamanan antara AS dan China akan menjadi masalah regional paling penting dalam beberapa tahun mendatang. ➤ Dinamika politik ini menimbulkan pola interaksi konfliktual dari segi interaksi claimant states beserta kehadiran super power AS dalam sengketa di kawasan Laut China Selatan (LCS). Pengelolaan harus dilakukan untuk mengantisipasi konflik terbuka di kawasan yang rentan terhadap negara-negara sekitar kawasan yang tergabung dalam ASEAN.

		<p>Dari kondisi uraian di atas, maka peran yang dilakukan oleh Indonesia dan fungsi-fungsi K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan;</p> <p>a. Diplomasi: mengefektifkan peran Diplomasi, yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, untuk penciptaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan dan perdamaian dikawasan Laut China Selatan, dengan arah menegakkan COC (<i>Code of Conduct</i>), bagi Negara-negara yang berkonflik;</p> <p>b. Pertahanan dan Keamanan; Meningkatkan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan kawasan yang menjadi wilayah kedaulatan Negara Indonesia, dalam mengantisipasi eskalasi di kawasan Laut China Selatan, dan mengamankan serta memperahankan wilayah kedaulatan negara Indonesia dan sumber daya alam yang masih menjadi hak pengelolaan kedaulatan Negara Indonesia, ZEE (Zona Eksklusif Economy).</p> <p>c. Sinkronisasi dan Sinergitas Program K/L Aspek SosEk Masyarakat : Sinkronisasi dan Sinergitas Program yang dilakukan K/L dari Aspek Peningkatan serta pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berada pada kawasan Laut China Selatan (LCS), antara lain dalam fasilitasi dukungan sarana prasarana aktivitas sosial ekonomi dan menjaga keamanan serta keselamatan warga negara Indonesia yang sedang melakukan aktivitas di kawasan, agar Laut Natuna Utara menjadi basis baru bagi Geostrategik, Geopolitik, dan Geoekonomi RI.</p> <p>Jawaban 2:</p> <p>Rencana politik luar negeri dan target RI, khususnya kebijakan pertahanan Indonesia dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan, yaitu, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah berkewajiban untuk terus memonitor status hukum dari Laut Natuna Utara di PBB, serta menyiapkan seluruh sarana dan prasarana agar Laut Natuna Utara menjadi basis baru bagi Geostrategik, Geopolitik, dan Geoekonomi RI. ➤ Melakukan kampanye global guna menyiapkan pembangunan Geopark di Natuna dan kepulauan di
--	--	---

		<p>sekitarnya, yang terhubung dengan baik dengan berbagai pelabuhan udara dan pelabuhan laut di ASEAN. Atas tujuan itu, sudah pada tempatnyalah jika RI mengundang negara Sahabdt terkait, untuk turut membangun infrastruktur berbasis 5G, dengan langkah Negara Indonesia melonggarkan aturan alih teknologi dan manajemen dari kedua negara tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendekatan kebiakan pertahanan dan keamanan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendekatan kekuatan militer yang digunakan untuk menjaga kedaulatan negara, termasuk teritorial maritim. Dalam konteks konflik laut China selatan blok natuna, pendekatan militer bukan merupakan pendekatan utama namun merupakan langkah antisipasi yang di siapkan untuk kondisi-kondisi yang diperlukan. <p>Jawaban 3</p> <p><i>Cara menyelesaikan/mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendekatan geopolitik dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan terkait kebijakan luar negerinya baik dalam konteks kerjasama ataupun penyelesaian hubungan konfliktual. ➤ Geopolitik merupakan peta bagi negara untuk bermain dalam politik internasional baik dalam skala lokal, regional maupun global. Berdasarkan teori geopolitik, sesuatu aktivitas yang menyangkut dengan kepentingan nasional. Doktrin Poros Maritim Dunia termasuk dalam straregi dan sebagai suatu pengebangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dengan stategi pendekatan geopolitik. ➤ Secara internal, Aspek Pertahanan, dalam menjaga keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di Wilayah Perairan, selain bersandar pada Hukum Internasional yaitu, UNCLOS, yang kemudian diratifikasi dengan UU No 16 Tahun 1985 tentang ZEE, juga menyusun Doktrin Pertahanan dan Buku Putih Pertahanan, yang diterbitkan Kementerian Pertahanan.
2		4. Bagaimana kondisi keamanan nasional Indonesia saat ini dihadapkan dengan konflik persaingan AS-China

		<p>di Laut China Selatan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mengapa Laut China Selatan penting bagi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional Indonesia? Apa yang membuat LCS penting bagi keamanan nasional Indonesia? 6. Apa dan bagaimana kepentingan Indonesia di Laut China Selatan dan strategi apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional? 7. Apa dan bagaimana posisi dan kepentingan Indonesia dihadapkan dengan kondisi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan? 8. Apa tujuan atau rencana strategis yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan? 9. Apa saja ancaman yang perlu diwaspadai Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?
		<p>Jawaban 4.</p> <p><i>Kondisi keamanan nasional Indonesia saat ini dihadapkan dengan konflik persaingan AS-China di Laut China Selatan</i></p> <p>➤ Berbagai kebijakan yang dibuat oleh <i>claimant states</i> terhadap sengketa LCS tidak terlepas dari upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Berbicara mengenai kepentingan nasional Indonesia, maka perlu dilihat dari dua hal yang saling berkaitan, yakni dinamika yang terjadi dalam sengketa LCS dan persinggungan di Laut Natuna Utara. Walaupun Indonesia tidak termasuk ke dalam <i>claimant states</i>, namun <i>nine dash line</i> yang diklaim oleh Tiongkok telah bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara</p> <p>Munculnya pendekatan geoekonomi China tersebut merupakan faktor penentu dalam mencapai kepentingan geostrategi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ekspansi pasar domestik China yang</p>

		<p>semakin meluas, menjadikan China sebagai produser barang terbesar di Asia. China juga telah memperkuat daya saing ekspornya sehingga menyebabkan perubahan dalam transaksi ekonomi negara-negara tetangga di Asia.</p> <p>Kebijakan ekonomi regional dalam <u>Trans Pacific Partnership (TPP)</u> dan kini muncul inisiatif baru OBOR kini AS jelas 'menyerahkan' pengaruh ekonominya di kawasan Asia Pasifik kepada China. <u>Rencana ambisius infrastruktur OBOR China</u> diimplementasikan dalam pembangunan bendungan, jalan, pemukiman, konstruksi kereta api berkecepatan tinggi yang akan mengintegrasikan wilayah Selatan dan Barat China. Dalam pengertian ini, Asia Pasifik dapat dikatakan telah 'didominasi' oleh China.</p> <p>Dua peristiwa penting tersebut di atas, <u>memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaturan keamanan</u> yang ada di Asia Pasifik. Hasil dari OBOR, yang dipimpin oleh Xi Jinping, dan Donald Trump yang meninggalkan kesepakatan TPP, mengakibatkan banyak negara Asia yang mengorientasikan kembali kebijakan lama mereka terhadap kedua negara tersebut. Rivalitas keamanan merupakan kondisi dan intrik yang sangat kompleks dengan berbagai aspek pendukungnya yang kadang justru berada di luar lingkaran keamanan itu sendiri, aspek ekonomi adalah salah satu contohnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam pandangan lain, salah satu bentuk potensi ancaman stabilitas keamanan global terbesar adalah pusaran konflik hegemoni yang diikuti unjuk kekuatan militer AS-China di Laut China Selatan (LCS). "Unjuk kekuatan militer AS-China kian menunjukkan eskalasi ketegangan yang mengkhawatirkan. Kehadiran kapal tempur kedua negara yang siap <i>"konflik perang"</i>, membuat situasi di LCS dan wilayah ASEAN menjadi bertedensi 'panas-dingin'," ➤ Strategi maritim nasional yang tepat diperlukan agar mampu menjadi kekuatan maritim yang kuat di kawasan, khususnya di Asia Pasifik sebagai penyeimbang persaingan hegemoni AS dan China di wilayah Pasifik Barat, dengan tetap berpedoman kepada cita-cita nasional, tujuan nasional dan kepentingan
--	--	--

		<p>nasional Indonesia guna menjamin stabilitas keamanan kawasan regional di Asia Pasifik, khususnya di Asia-Pasifik Barat.</p> <p>Jawaban 5.</p> <p><i>Laut China Selatan penting bagi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional Indonesia;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkembangan tensi politik di LCS menjelaskan posisi China berhadapan dengan negaranegara pengklaim, di sisi lain, China juga menghadapi situasi kompetisi dengan AS, dan negara-negara lain yang juga memiliki kepentingan geopolitik. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa posisi China menjadi alasan sentral bagi setiap negara untuk membangun sebuah bentuk interaksi kerja sama baik kerja sama dengan China maupun kerja sama dalam menghadapi China. Persoalannya, kerja sama keamanan yang terbentuk dalam mencapai kepentingan geopolitik tidak melulu didominasi dengan langkah militer, kerja sama keamanan, dan aliansi, namun juga mendorong terciptanya bentuk interaksi kerja sama yang bersifat politik dan ekonomi. Perkembangan alignment tersebut menjelaskan dinamika kestabilan politik dan keamanan yang ada di kawasan LCS. <p><i>Yang membuat LCS penting bagi keamanan nasional Indonesia;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indonesia sendiri merupakan negara penting yang dukungannya terus menjadi bahan perebutan. Sejalan dengan McRae (2019) jika di satu sisi, Amerika Serikat dianggap sebagai negara penyeimbang di kawasan Asia Pasifik oleh negara-negara di kawasan yang merasa terancam dengan perilaku China. Namun di sisi lain, China dapat memandang Indonesia sebagai negara penyeimbang dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Sedangkan sesuai dengan kondisi di Amerika Serikat sendiri, dukungan Indonesia terus dicari sebagai mitra untuk menjaga kestabilan di Asia Tenggara. ➤ Indonesia harus memikirkan kebijakan yang konstruktif, yang bisa memperkuat posisinya, namun sekaligus juga menjaga agar kepentingannya tetap terjaga, dan untuk menjawabnya, bagian berikut akan
--	--	---

		<p>mendiskusikan lebih lanjut mengenai Jalan Sutera Maritim dan disambung dengan diskusi tentang Poros Maritim Dunia. Pola the S-Curved Trajectory (SCT) menjelaskan mengenai konsolidasi nasional yang dilakukan China terhadap pembangunan infrastruktur, dikombinasikan dengan formasi ketenagakerjaan yang kompetitif sehingga mampu menghasilkan pembangunan ekonomi nasional yang signifikan.</p> <p>➤ Sinerginya tampak pada dukungan pemerintah dalam hal penyederhanaan regulasi atas bidang unggulan yang menghasilkan pengembangan bidang teknologi, militer, dan political power, yang mampu memfasilitasi kebutuhan domestik sekaligus memberi pengaruh non-domestik. Dari sinilah secara jeli dan cerdas China mampu melihat peluang hampir di seluruh negara yang bersentuhan dengan Jalur Sutra Maritim (terkecuali beberapa negara di Eropa Barat) yang membutuhkan fasilitas infrastruktur. Situasi ini dapat dinamakan dengan <i>infrastructure diplomacy</i>.</p> <p>Jawaban 6.</p> <p>Apa dan bagaimana kepentingan Indonesia di Laut China Selatan dan strategi apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional;</p> <p>➤ Karena Indonesia menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak berpihak dalam kasus Laut China Selatan, maka <i>Third Party Mediation</i> menjadi mekanisme lainnya yang diinisiasi Indonesia. Mekanisme ini diharapkan mampu menggantikan peran International Court of Justice (ICJ). Hal ini disebabkan China diprediksi akan menolak penyelesaian sengketa LCS melalui ICJ, karena akan membuat konflik LCS menjadi terinternasionalisasi dan membuat posisi China turun dan sejajar dengan negara-negara lain yang masuk dalam sengketa. Terlepas dari keanggotaannya di ASEAN, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam sengketa LCS. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mengklaim wilayah sengketa dan tidak memiliki sejarah konflik mengenai kelautan dengan China. Namun berbanding terbalik dengan Filipina dan Vietnam. Kemudian, Indonesia selalu mengambil posisi netral dalam sengketa Laut China Selatan yang ditampilkan</p>
--	--	---

		<p>melalui sikap tidak pernah secara jelas memberikan dukungan kepada Amerika Serikat maupun China di kawasan.</p> <p>Jawaban 7.</p> <p>Apa dan bagaimana posisi dan kepentingan Indonesia dihadapkan dengan kondisi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Posisi Indonesia di dalam konflik Laut China Selatan tentu juga didasari kepentingan nasional, asas bebas aktif yang dipegang, mencoba senetral mungkin dan untuk ikut memelihara perdamaian dunia. Terlebih, amannya daerah Laut China Selatan, akan turut menstabiliskan keamanan Indonesia yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain karena besarnya angka perdagangan antara Indonesia dan China, juga karena Laut China Selatan adalah potensi bagi perekonomian dunia yang bisa saja Indonesia mendapatkan keuntungan di dalamnya. Sebut saja jalur pelayaran, minyak, gas, mineral, perikanan, dan masih banyak lagi. Dalam turut sertanya menyelesaikan konflik, Indonesia tidak hanya berperan sebagai satu negara, tetapi juga sebagai anggota ASEAN. Sebagai salah satu negara terbesar, pendiri, dan pemimpin alami ASEAN, Indonesia dapat bergerak lebih leluasa dan memperoleh dukungan anggota-anggota lain. Singkatnya, posisi Indonesia cukup strategis di ASEAN dan bisa menggunakan ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan <p>Jawaban 8</p> <p>tujuan atau rencana strategis yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan menekankan Asia Tenggara sebagai prioritas utama, Indonesia berupaya aktif menjaga stabilitas kawasan agar terhindar dari intervensi eksternal dengan tetap menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan.
--	--	---

		<p>Karena itu, Presiden Joko Widodo menerapkan <i>'double hedging strategy'</i> dengan memperkuat kerjasama ekonomi dengan China seraya tetap melibatkan AS dalam dinamika kawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indonesia memelopori pengembangan kerangka multilateralisme Indo Pasifik yang berbasiskan sentralitas ASEAN. Melalui ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Indonesia mendorong ASEAN untuk bersatu sebagai motor penggerak stabilitas di Indo Pasifik. AS mendukung gagasan ini, tetapi China menolaknya. Meskipun AS terkesan meninggalkan multilateralisme, tetapi dukungan AS terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pacific mengindikasikan bahwa AS ingin tetap terlibat di Asia Tenggara untuk menjaga kepentingan strategisnya di kawasan. Bagi Indonesia, hal itu penting untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah semakin meningkatnya pengaruh China <p>Jawaban 9</p> <p>Ancaman yang perlu diwaspadai Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengingat pentingnya posisi Laut China Selatan yang rawan konflik dan implikasinya yang besar di kemudian hari bila pecah konflik bersenjata terbuka di perairan tersebut, maka penelitian ini akan mengupas, membahas dan menganalisis beberapa penyebab dan implikasi konflik yang rawan dan besar, yaitu, perang terbuka antara negara yang mengklaim dan berkepentingan atas perairan LCS. ➤ Indonesia, sekalipun bukan negara pengklaim memiliki kepentingan, namun klaim mutlak yang dilancarkan China atas seluruh wilayah perairan Laut China Selatan, yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di dalamnya, pada tahun 2012 tersebut, turut mengancam kedaulatan dan kepentingan Indonesia di wilayah perairan Natuna, yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau.¹¹ Dengan klaim mutlak tersebut, bukan saja kedaulatan wilayah Indonesia atas Kepulauan Natuna yang terancam, tetapi juga seluruh kepentingan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan berdasarkan konsep Wawasan Nusantara, yang
--	--	--

		dihormati eksistensinya berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, khususnya hak-hak pengelolaan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut. Padahal, tanpa ini saja, hak-hak tradisional nelayan Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna sudah terancam.
--	--	--

Pertanyaan Penelitian 2.

Bagaimana sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Kondisi Saat Ini)?

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Teori Strategi a. Ends b. Means c. Ways	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dan bagaimana target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? 2. Bagaimana dan apa saja upaya/cara yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? 3. Sumber daya apa saja yang diperlukan/perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga demi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional? 4. Bagaimana strategi K/L dalam menjaga sinergitas antar Lembaga dalam menghadapi ancaman persaingan Amerika-China di LCS?
		<p>Jawaban 1</p> <p>Target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan;</p> <p>➤ Kawasan Laut China Selatan memiliki Nilai Strategis dari aspek Politik Luar Negeri, Pertahanan dan</p>

		<p>Keamanan, serta Ekonomi bagi Indonesia, yaitu dari aspek menjaga Kedaulatan Negara dan mengamankan potensi-potensi yang sangat besar yang terkandung di kawasan Laut China Selatan/LCS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam pelaksanaan program – program kerja dan pembangunan yang diselenggarakan oleh K/L, setiap K/L memiliki Rencana Strategis (Renstra) sebagai Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan, dalam pelaksanaan Rencana Aksi (RAN) Tahunannya, sesuai tugas dan fungsi masing-masing K/L. Penyusunan Dokumen Renstra K/L juga di dasari sebagai pelaksanaan (implementasi) dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh Mandat dalam melaksanakan Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. ➤ Dalam kerangka target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan di Laut China Selatan, maka program – program pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L, tentu peran kelembagaan Kementerian Koordinator (KemenKo PolHukum dan Kemneko Maritim dan Investasi), memiliki arti penting untuk mengkoordinasikan peran K/L yang dibidangi nya, dalam mensinergikan program-program pembangunan di Kawasan Laut China Selatan. <p>Jawaban 2</p> <p>Bagaimana dan apa saja upaya/cara yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan, penting dilakukan Koordinasi yang tersentral yang dilakukan oleh Kelembagaan Kementerian Koordinator (KemnKo PolHukum dan KemenKo Maritim dan Investasi), guna mensinergikan pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan K/L teknis, sesuai
--	--	--

		<p>dengan Tugas dan Fungsinya.</p> <p>Jawaban 3.</p> <p>Sumber daya yang diperlukan/perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga demi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam pelaksanaan pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional di kawasan laut China Selatan, yang dilaksanakan oleh K/L terkait, untuk efektivitasnya, sejatinya tidak terlepas adanya dukungan sumber daya, yakni merujuk pada tata kelola Manajemen, ➤ Manajemen adalah koordinasi dan administrasi tugas untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Unsur-unsur manajemen diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen sangat penting untuk kehidupan yang terorganisir. Seorang manajer perlu memahami beberapa ide sederhana untuk menerapkan proses manajemen. Ini juga termasuk memahami unsur-unsur manajemen. Manajemen harus dipandang sebagai kesatuan yang terdiri unsur-unsur manajemen. ➤ Aspek-aspek Unsur-unsur Manajemen sebagai sumber daya pendukung itu, yaitu: <i>man (manusia)</i>, <i>money (uang)</i>, <i>materials (bahan)</i>, <i>machines (mesin)</i>, <i>methods (metode)</i>, dan <i>market (pasar)</i>, dalam hal ini lokus pada Kawasan Laut China Selatan/LCS. <p>Jawaban 4.</p> <p>Strategi K/L dalam menjaga sinergitas antar Lembaga dalam menghadapi ancaman persaingan Amerika-China di LCS;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam melaksanakan manajemen, diperlukan dalil khusus yang dapat dijadikan pedoman oleh para pelaksana manajemen lapangan dan komando oleh K/L terkait, dalam melaksanakan tugasnya, yang disebut Prinsip-Prinsip Manajemen, dengan menerapkan 14 (empat belas) prinsip-prinsip manajemen,
--	--	---

		<p>antara lain, yaitu: <i>Pembagian Kerja (Devisiion of work)</i>; <i>Wewenang dan Tanggung jawab (Authority and Responsibility)</i>; <i>Disiplin (Discipline)</i>; <i>Kesatuan Perintah (Unity of Command)</i>; <i>Kesatuan Arah (Unity of Direction)</i>; <i>Mengutamakan Kepentingan Umum Diatas Kepentingan Pribadi (Sub Ordination Of Individual interest to The Command Good)</i>; <i>Pemberian Upah (Remuneration)</i>; <i>Pemusatan (Centralization)</i> ; <i>Jenjang Jabatan (The Hierarchy)</i> ; <i>Tata Tertib (Order)</i> ; <i>Kesamaan (Equity)</i>; <i>Kestabilan Staf (Stability of staff)</i> ; <i>Inisiatif (initiative)</i> ; <i>Semangat Korps (Esprit de Corps)</i>.</p>
2	<p>Teori sinergitas Teoriantisipasi Teori Stabilitas</p>	<p>4. Bagaimana strategi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?</p> <p>5. Apa yang sudah dilakukan oleh K/L sebagai upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?</p> <p>6. Apakah ada rencana kegiatan atau program bersama dari K/L yang bersangkutan untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?</p> <p>7. Sejauh mana sinergitas antara K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? Jika dihadapkan dengan fakta saat ini, bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi persaingan AS-China di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas keamanan nasional?</p> <p>8. Apakah terdapat aturan atau regulasi yang mencakup sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.</p> <p>9. Saat ini, K/L mana yang menjadi leading sector dalam melaksanakan sinergitas untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas keamanan nasional? Apakah K/L tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mensinergikan K/L terkait?</p> <p>10. Mengapa diperlukan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China</p>

		<p>Selatan? Apa kaitannya dengan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>11. Bagaimana urgensi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? dan bagaimana hubungannya dengan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>12. Apa saja faktor yang mempengaruhi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?</p> <p>13. Apa saja kendala yang dialami oleh K/L dalam melaksanakan strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p>
		<p>Jawaban 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Strategi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan, dengan strategi pengutamaan Koordinasi. ➤ Diperlukan sinergitas antara pimpinan daerah di wilayah Laut China Selatan, guna mewujudkan keamanan wilayah.. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Tingkat kejasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak. ➤ Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. ➤ Koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk

		<p>mencapai tujuan organisasi secara efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tipe-tipe Koordinasi, Terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu : Pertama ; Koordinasi vertical adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Kedua. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam kerangka mengantisipasi persainfan AS-China di laut China Selatan/LCS. <p>Jawaban 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Yang sudah dilakukan oleh K/L sebagai upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan; Menyelenggarakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan forum-forum pertemuan, komunikasi dan pertukaran data dan informasi, terkait dengan peran, tugas dan fungsi K/L masing-masing, serta juga menyertakan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan untuk dilakukan dalam kerangka terwujudnya prinsip mekanisme KISS ME (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi, dan Mekanisme) dalam kesatuan paduan untuk mewujudkan dan/atau menjaga stabilitas kawasan di Laut China Selatan/LCS. <p>Jawaban 7</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rencana kegiatan atau program bersama dari K/L yang bersangkutan untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan, dilakukan dengan bentuk Pembangunan Terpadu di Kawasan Laut Chinan Selatan, sebagai bagian Wilayah Perbatasanm yaitu, Gerbang Dutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan), yang di koodinasi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan Ketua Pengarahnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (KemenKo PolHuKam), dan Wakil/Anggota Pengarah, para Menteri Koordiantor.
--	--	--

		<p>Jawaban 8</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sinergitas K/L diselenggarakan dengan membangun instrument sinergi terhadap pengamanan dan pemanfaatan serta pengelolaan kawasan Laut China Selatan dengan langkah pelaksanaan koordinasi melalui forum-forum rapat dan diskusi yang diselenggarakan baik antar K/L teknis terkait bersama Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten), dan Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator yang membidangi hal-hal terkait Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kemaritiman, Investasi, Perekonomian, Sosial Budaya, dan Pembangunan Kemanusiaan, yang merupakan sebagai bentuk atau unsur pelaksanaan manajemen pemerintahan, yaitu KISS ME (<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi, dan Mekanisme</i>), dalam menghadapi dan menyusun langkah-langkah keputusan atas dinamika permasalahan yang dihadapi di Kawasan Laut China Selatan/LCS. <p>Jawaban 9</p> <p>Aturan atau regulasi yang mencakup sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan atau regulasi yang mencakup sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika – China di Laut China Selatan, bagi Indonesia dengan acuan dasar yang diterapkan adalah dengan merujuk kepada Hukum Internasional yang telah disepakati, yaitu, peraturan hukum laut Indonesia didasarkan pada hasil ratifikasi dari Hukum Laut Internasional yakni Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan kemudian pembaharuan dari hukum laut yang sebelumnya yakni Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, terkhusus pada Pasal 1 yang menyatakan “Mengesahkan United Nation Convention the Law of the
--	--	---

		<p>Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dilampirkan pada Undang-undang ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adapun dalam UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin dan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.” ➤ Berkaitan juga dengan kepentingan ekonomi Indonesia. Merujuk pada Putusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 47 Tahun 2016, Laut Natuna kaya akan sumber daya laut seperti berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya.²¹ Selain itu, potensi sumber daya alam lainnya yang terkandung di wilayah tersebut adalah kandungan minyak dan gas alam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Blok East Natuna memiliki kandungan potensi minyak mencapai 36 juta barel dan volume gas alam di tempat (Initial Gas in Place/IGIP) sebanyak 222 triliun kaki kubik (tcf), serta cadangan gas alam sebesar 46 tcf.²² Berdasarkan potensi tersebut, Indonesia memiliki hak untuk mengelola sumber daya di Laut Natuna Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi Indonesia. <p>Beberapa peraturan lainnya dengan merujuk:</p> <p>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan;</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah</p>
--	--	--

		<p>Pertahanan Negara; Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 16 Tahun 2017 Tentang. Kebijakan Kelautan Indonesia; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Peta ALKI.</p> <p>Jawaban 10</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ K/L yang menjadi leading sector dalam melaksanakan sinergitas untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan Mencermati dimensi yang dihadapi di kawasan Laut China Selatan, maka dalam kerangka mengamankan aspek penegakkan keamanan dan kedaulatan Negara, K/L yang menjadi leading sektor dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan, adalah mengedapankan aspek keamanan laut, yaitu, Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), yang didukung penuh oleh instrument pertahanan negara, yaitu TNI secara terpadu pada 3 Matra (TNI AL, TNI AU, dan TNI AD), dengan dukungan sarana prasarana pertahanan sesuai dengan tugas masing-masing, dengan arahan Komando oleh Panglima TN, dan dilandasi kebijakan Pertahanan Negara oleh Menteri Pertahanan. ➤ Oleh karena dimensi yang dihadapi adalah lebih mengedapankan penegakkan keamanan dan kedaulatan negara di Laut, maka efektivitas Peran Panglima TNI untuk mensinergikan kekuatan penegakan stabilitas keamanan nasional di Laut China Selatan, dengan tetap dibawah koordinasi para MenKo terkait. <p>Jawaban 11</p>
--	--	--

		<p>➤ Sinergitas K/L diperlukan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan, dan kaitannya dengan stabilitas keamanan nasional, adalah dalam kerangka menjaga dan menjamin terjaga atau terpeliharanya situasi yang terkontrol terhadap dinamisasi persaingan AS dan China, dan konflik-konflik terbuka yang kemungkinan dapat terjadi sewaktu-waktu, yang mempengaruhi kepentingan nasional di kawasan Laut China Selatan/LCS, baik aspek politik, ekonomi, dan kedaulatan wilayah negara, dan juga berdampak kepada stabilitas kedamaian, keamanan di kawasan regional (ASEAN, dan Asia).</p> <p>Jawaban 12</p> <p>➤ Urgensi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan, dan hubungannya dengan penjagaan stabilitas keamanan nasional, adalah dalam kerangka pemaduan (integrasi) koordinasi sikap dan langkah kebijakan politik dan ekonomi nasional di kawasan Laut China Selatan, untuk tetap menjamin terjaganya stabilitas keamanan kawasan, dan juga diringi dengan Diplomasi Politik Luar Negeri dan Diplomasi Pertahanan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Pertahanan, sesuai prinsip-prinsip Hukum Internasional.</p> <p>Jawaban 13</p> <p>Faktor yang mempengaruhi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan, berkenaan dengan penerapan sistem koordinasi, <i>Pembagian Kerja (Devision of work); Wewenang dan Tanggung jawab (Authority and Responsibility); Disiplin (Discipline); Kesatuan Perintah (Unity of Command); Kesatuan Arah (Unity of Direction), antar komando atau manajer pelaksana.</i></p>
--	--	---

Pertanyaan Penelitian 3.

Bagaimana Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Teori Strategi a. Ends b. Means c. Ways	1. Apa dan bagaimana goals/target yang ingin dicapai pemerintah RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional? 2. Apa saja ancaman yang dihadapi RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional? 3. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan atau perlu dikembangkan dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
		<p>Jawaban 1</p> <p>➤ Goals/target yang ingin dicapai pemerintah RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, adalah dalam kerangka menjamin keberlangsungan Tujuan Pembangunan Nasional Indonesai dalam segala aspek (dengan berukut Konsep Target Dan Strategi Implementasi) . Dengan adanya situasi dinamis yang berlangsung di Kawasan Laut China Selatan, berkenaan dengan persaingan Amerika – China, Indonesai bersikap mengambil peran untuk dapat berposisi sebagai Mediator, mengembangkan diplomasi dan kerjasama bilateral dan mulileteral dengan negara para pihak dan di kawasan, serta juga antisipasi terhadap kondisi dinamis yang berlangsung dengan mengembangkan dan mempersiapkan aspek-aspek sarana prasarana kelengkapan keamanan dan pertahanan, untuk mendeteksi dan menyikapi adanya tindakan-tindakan illegal dan sepihak dari pihak Negara lain yang terlibat sengketa atau konflik kepentingan.</p>

		<p>Jawaban 2</p> <p>➤ Ancaman yang dihadapi RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional; antara lain tindakan <i>illegal</i> terhadap pencurian/eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di kawasan Laut China Selatan, klaimanted sepihak dari negara China atas kedaulatan wilayah RI; pelanggaran hak-hak berdaulat Negara RI di Laut China Selatan. RI Terhadap hal ancaman yang dihadapi, para aktor yang melaksanakan penegakkan fungsi-fungsi keamanan dan penjagaan stabilitas keamanan, tentu diperlengkapi dengan peralatan atau sarana prasarana, baik dalam kerangka deteksi, dan penangkalan.</p> <p>Jawaban 3</p> <p>➤ Sumber daya yang dibutuhkan atau perlu dikembangkan dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, tidak terlepas dari pelaksanaan unsur-unsur manajemen baik dalam kerangka POAC (Planning, Organizing, Actuating, Control), juga kecukupan ketersediaan unsur pendukung berupa 6M (<i>man (manusia), money (uang), materials (bahan), machines (mesin), methods (metode), dan market (pasar), dalam hal ini lokus pada Kawasan Laut China Selatan/LCS.</i></p>
2	Teori sinergitas Teori antisipasi Teori Stabilitas Teori keamanan nasional	<p>4. Bagaimana strategi sinergitas yang dilakukan oleh K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>5. Bagaimana potensi atau kesempatan strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>6. Bagaimana prediksi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dan sejauh mana kesiapan K/L dalam mengantisipasi hal tersebut?</p> <p>7. Bagaimana upaya K/L untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>8. Apa saja target capaian dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan</p>

		<p>stabilitas keamanan nasional?</p> <p>9. Apa saja langkah strategis yang dilakukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?</p> <p>10. Dalam pelaksanaan sinergitas, K/L mana yang seharusnya mempunyai mandat untuk mengkoordinasikan strategi tersebut dan bagaimana implementasinya?</p>
		<p>Jawaban 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Strategi sinergitas yang dilakukan oleh K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, dengan mengedepankan prinsip-prinsip Koordinasi dengan KISS ME, guna terwujudnya keterpaduan. <p>Jawaban 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Potensi atau kesempatan strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, dengan memadukan program-program kerja pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sesuai peraturan yang berlaku, dan dibawah kendali koordinasi oleh Kementerian Koordinator terkait (KemenKo Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan-PolHukam; Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Invesatsi; dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <p>Jawaban 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prediksi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dan sejauh kesiapan K/L dalam mengantisipasi hal tersebut, sulit untuk dapat dilakukan prediksi seberapa jauh dan/atau seperti apa klimaks dari keberlangsungan persaingan Amerika-China di Kawasan Laut China Selatan/LCS. Kehadiran kekuatan Militer Amerika-China di Kawasan Laut China Selatan/LCS, adalah lebih konteks untuk mengamankan / melindungi kebijakan ekonomi, yakni untuk dapat mengeksploitasi sumbaer daya alam (atas laut dan bawah laut) yang berada di Jalur Laut China Selatan, dengan atas dasar klaim sepihak dari China. Disamping

		<p>itu, konteks lainnya, bagaimana membangun dan mengembangkan <i>hegemoni</i> pengaruh kekuatan China terhadap negara – negara di Kawasan dengan langkah menawarkan Bantuan-bantuan tertentu, baik pola mengikat atau cara / strategi tertentu, sehingga pada muaranya terjadi Ketergantungan terhadap China. Sementara Amerika sebagai Kekuatan hegemoni dunia, tidak ingin ada kekuatan lainnya yang mengimbangnya dan mengantisipasi adanya lepasnya ketergantungan negara – negara yang berada di kawasan Laut China Selatan terhadap Amerika. Adapun kesiapan K/L dalam mengantisipasi kondis yang berlangsung dinamis di Kawasan Laut China Selatan, langkah Pencermatan kondisi secara terus menerus, Analisa Situasi, Monitoring, dan Evaluasi Lingkungan Strategis (AnSit Monev Lingstra) tetap terus dilakukan, dengan cara dan pola pengumpulan dan pengolahan informasi dan data (Pullahta) terhadap kondisi yang berlangsung, dan serta koordinasi pemberian informasi dan data antar K/L terkait, dan tentu dengan pelibatan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) disekitar kawasan.</p> <p>Jawaban 7</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Upaya K/L untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, dengan menyelenggarakan forum-forum koordinasi dan komunikasi (rapat/pertemuan, diskusi), serta pertukaran data dan informasi terkait. Baik diselenggarakan secara bergantian sesuai dengan tema yang berkembang dan berkebutuhan khusus. <p>Secara harmonisasi antar kelembagaan terkait kebijakan yang dilakukan K/L, maka untuk simplikasi atau sinergitas tujuan, koordinasi dilakukan oleh Kelembagaan Kementerian Koordinator (KemenKo PolHuKam dan/atau KemenKo Maritim dan Investasi-MarVes).</p> <p>Jawaban 8</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Target capaian dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, adalah tetap terjaganya situasi keamanan terkendali terhadap konflik-konflik terbuka atas kondisi dinamis yang berlangsung dari persaingan Amerika-China di kawasan Laut China Selatan, dan
--	--	---

		<p>kepentingan nasional Indonesia serta wilayah kedaulatan Indonesia di kawasan Laut China Selatan, tetap terjaga dan dihormati oleh para pihak (terutama China).</p> <p>Jawaban 9</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Langkah strategis yang dilakukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional, dengan mencermati Klaim China atas sebagian wilayah di Laut China Selatan perhatian serius pemerintah Indonesia karena beririsan dengan wilayah teritorial Indonesia di Laut Natuna Utara. ➤ Menyadari bahwa AS dan China bersaing di dekat wilayah teritorial Indonesia, pemerintah Indonesia mengajak kedua negara untuk menahan diri dan menyelesaikan semua persoalan melalui jalur dialog dalam kerangka multilateral. ➤ Indonesia memelopori pengembangan kerangka multilateralisme Indo Pasifik yang berbasiskan sentralitas ASEAN. Melalui ASEAN <i>Outlook on Indo-Pacific</i>, Indonesia mendorong ASEAN untuk bersatu sebagai motor penggerak stabilitas di Indo Pasifik. AS mendukung gagasan ini, tetapi China menolaknya. ➤ Meskipun AS terkesan meninggalkan multilateralisme, tetapi dukungan AS terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pacific mengindikasikan bahwa AS ingin tetap terlibat di Asia Tenggara untuk menjaga kepentingan strategisnya di kawasan. Bagi Indonesia, hal itu penting untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah semakin meningkatnya pengaruh China. <p>Jawaban 10</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaksanaan sinergitas atas K/L mana yang seharusnya mempunyai mandat untuk mengkoordinasikan strategi tersebut dan bagaimana implementasinya, adalah dengan melihat konteks dan konstelasinya. Berkenaan berhubungan dengan aspek Politik, Hukum, dan Keamanan, maka mandat untuk mengkoordinasikan K/L terkait, adalah terletak pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (KemenKoPolhuKam), dan oleh
--	--	---

		karena konstelasinya aspek ekonomi dan investasi/kerjsama ekonomi, yang berhubungan dengan kondisi dinamis di wilayah Maritim, mandat mengkoordinasikan K/L terkait, berada pada Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (KemeKo MarVes). Atau dalam kondisi tertentu, 2 Kelembagaan KemenKo saling Bersinergis.
--	--	---

***Subdit Batas Antar Negara dan Pulau-Pulau Terluar,
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,
Kementerian Dalam Negeri.***

LAMPIRAN 2.2 HASIL WAWANCARA KEMENKO POLHUKAM

Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polhukam - Bapak Ramadhan

Saya memperhatikan dengan seksama, semua presentasi yang disampaikan oleh para nara sumber, banyak forward looking ideas yang disampaikan tadi. Bagaimana pembentukan atau peleburan institusi untuk membuat institusi kita lebih antisipatif. Kembali ke tesis, dari beberapa paparan yang telah dilaksanakan di awal tadi itu tiga tiganya isu yang heavy yang berat yang memang membutuhkan benar benar ketelitian dan kecukupan bahan dalam risetnya. Tadi pak Banyu sudah menyampaikan juga bagaimana idenya untuk mengefektifkan sinergi antar K/L

Kalau boleh saya memberikan masukan untuk lebih memperhatikan sinergitas itu dalam konteks negosiasi CoC (Code of Conduct) karena itu adalah bukti nyata atau bentuk nyata bagaimana China itu ber negoisasi dengan menggunakan berbagai macam taktik. Kepada negara negara claimant China mengatakan kita dan lakukan secara bilateral tidak perlu dibawa ke forum multilateral, tetapi pada saat dibawa ke forum multilateral mereka akan seperti yang disampaikan pak Pribadi akan dibawa ke United Security Council tetapi mereka bilang bahwa ini bukan forum untuk membicarakan Laut China Selatan, jadi dia bermain main dengan cara cara seperti itu dalam setiap statement nya dikatakan selalu bawa China menghormati hukum Laut internasional tetapi pada saat arbitrase internasional memutuskan Nine Dash Line itu tidak benar atau di illegalkan oleh putusan itu. China tidak mau mengakui bahkan proses nya pun mereka tidak mau mengakuinya, menarik juga kalau kita lihat bagaimana China mengkooptasi negara negara ASEAN, Laos, Kambodia itu sudah di tangan mereka putusan ASEAN ataupun ASEAN statement itu sudah terpecah karena sudah adanya kooptasi nya sebagai negara ASEAN. Kita lihat juga bagaimana Filipina yang menjadi penuntut dalam Arbitrase internasional itu malah tidak mengkapitalisasi keputusan tersebut, tentunya ada pertimbangan pertimbangan ekonomi politik yang ada di benak presiden Duterte dari Filipina

Saya ingin bertanya sebetulnya kepada pak Bebeb bagaimana pandangan bapak mengenai sikap Filipina yang seperti itu yang mungkin kita tidak punya waktu mungkin sambil ngobrol nanti saya akan tanya kita jadi kembali mungkin kita perlu bagaimana CoC itu bertransformasi menjadi cara kita melakukan sinergitas diantara K/L karena itu kita lihat yang di depan mata mampu membuat pengelolaan Laut China Selatan dalam melihat bagaimana nanti rivalitas China dan Amerika itu dapat dikelola.

Saya yakin perang tidak terjadi karena China seperti yang ada saat ini karena adanya kawasan yang kondusif jadi mereka tidak ingin menghancurkan kawasan yang

kondusif itu karena ekonomi mereka akan hancur tapi perang dunia pertama, perang dunia kedua itu juga ditunjukkan bahwa sewaktu waktu bisa ter eskalasi.

Asisten Deputi Kerja Sama Asean Kemenko Polhukam - Bapak Zulkifli

Terima kasih kami mungkin tidak banyak karena memang kita sudah buat masukan yang terakhir dari bapak Asep kerjasama multilateral tentang CoC. Saya mencatat dari paparan dari pak Bebeb bahwa langkah yang bisa kita lakukan adalah salah satunya adalah peningkatan kapasitas diplomasi pertahanan ini adalah kata kuncinya adalah engagement dengan semua pihak saya kira ASEAN tahun 2019 telah mengeluarkan ASEAN outlook on the Indo Pasifik di mana intinya adalah membuat kawasan ini bukan menjadi kawasan yang rival saling bersaing tetapi adalah kawasan yang menjamin kerjasama antara negara negara besar yang punya kepentingan di kawasan ASEAN ini tidak jauh jauh dari baru saja kita menyaksikan ada garuda Shield atau latihan bersama Amerika dengan Indonesia ini bukti adalah kita telah melakukan dari Sisi diplomasi pertahanan Angkatan Darat melakukan engagement dengan Amerika Serikat dan dalam waktu dekat atas Inisiatif Indonesia Asian russian novel exercise dan ini kita mampu kita bersedia untuk menjadi host dengan latihan angkatan Laut ASEAN di mana latihannya kan dilaksanakan di perairan Indonesia ataupun pada Indonesia berbatasan dengan perairan internasional.

Jadi Angkatan Darat sudah Angkatan Laut sudah dan mungkin kita tunggu Angkatan Udara karena ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari saya pikir terkait langsung dengan Asean outlook on the Indo Pasifik kita melakukan kerjasama dengan semua pihak yang saling berkompetisi seperti kompetisi kekuatan besar Amerika Serikat dan Quad dengan ASEAN dan China dalam hal ini. Perspektif kerjasama diplomasi pertahanan ini dari Sisi ASEAN atau Indo Pasifik ini saya kira menjadi salah satu bukti nyata bahwa politik luar negeri kita bebas aktif bukan berarti kita mau netral tetapi kita aktif melakukan kerjasama atau pendekatan dengan jadi dari sisi ASEAN itu saja saya bisa beri masukan. Terimakasih

LAMPIRAN 2.3 HASIL WAWANCARA KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pertanyaan penelitian 1.

1 Bagaimana cara Indonesia dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Pemerintah Indonesia menegaskan posisi netral dan komitmen pada hukum internasional terkait dengan persaingan di LCS. Meskipun demikian, Indonesia tidak hanya berdiam diri dalam mempertahankan *status quo* wilayah laut di barat laut Indonesia tersebut. Sebagai bentuk respon persaingan AS-China dalam sengketa LCS, terdapat sejumlah upaya atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Dalam konteks diplomatik, Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI merespon klaim China di PBB, dengan menyertakan nota diplomatik bahwa Indonesia keberatan atas klaim historis China dalam area 'nine-dash-line' karena kurang memiliki basis hukum laut internasional.

Sejauh ini Indonesia menolak untuk mengkompromikan status LCS secara bilateral dengan China. Sebab, alasan utama Indonesia jelas menjunjung tinggi ketetapan hukum laut internasional yang mengacu pada UNCLOS 1982 dan Zona Ekonomi Eksklusif. Sementara segala bentuk perundingan batas wilayah dengan China tidak memiliki legalitas yang melebihi ketetapan hukum internasional. Meski tidak memiliki batasan geografis langsung, kehadiran AS di LCS menciptakan sengketa yang kompleks. Setiap aktivitas kemiliteran yang dilakukan AS dan China di LCS menimbulkan provokasi antara satu sama lain. Guna mencegah eskalasi ketegangan, Indonesia meminta para pihak untuk tetap menaati aturan navigasi di perairan internasional.

2 Bagaimana rencana politik luar negeri dan target RI, khususnya kebijakan pertahanan Indonesia dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Persaingan dan sengketa di Laut China Selatan termasuk dalam isu krusial kawasan Asia-Pasifik, sehingga dalam menentukan rencana politik luar negeri, Indonesia perlu berkomunikasi dengan sejumlah negara kawasan yang memiliki kepentingan strategis. Salah satu jalur komunikasi internasional di bidang pertahanan adalah forum ADMM Plus. Rencana politik luar negeri Indonesia direfleksikan dalam pertemuan 8th ADMM Plus pada bulan Juni 2021, dalam hal ini Indonesia mengakui posisi serta peran China dan AS sebagai negara yang berpengaruh perihal keamanan dan kesejahteraan kawasan. Di sisi lain, Indonesia tidak hanya menekankan *privilege* negara adidaya sekelas China dan

AS saja, melainkan juga memahami kepentingan dari negara strategis Asia-Pasifik lainnya seperti India, Australia, Jepang. Indonesia menekankan pentingnya inklusivitas Laut China Selatan bagi sejumlah negara. Secara politis, hal tersebut menjadi upaya persuasif sekaligus realistis dalam memahami kepentingan dari masing-masing pihak. Persuasi politik tersebut juga selaras dengan target politik luar negeri bebas-aktif dalam menjaga stabilitas kawasan di LCS. Karena stabilitas LCS memberikan sumbangsih dalam perekonomian dan perdagangan regional.

3 Bagaimana cara menyelesaikan/mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional diupayakan dengan memperhitungkan setiap aspek atau faktor yang melandasinya. Faktor determinan tersebut bersifat internal ataupun eksternal. Faktor internal mengacu pada kondisi/karakteristik yang berasal dalam ruang lingkup domestik. Salah satu upaya Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan penjagaan keamanan nasional adalah melakukan diseminasi wawasan mengenai sistem keamanan nasional yang menerapkan hakikat hubungan sipil dan militer. Hal demikian penting mengingat konsepsi keamanan tradisional telah mengalami peralihan yang memperhatikan keamanan insani dari setiap warga negara. Sehingga hubungan sipil dan militer merupakan hal penting dalam perumusan kebijakan oleh Kementerian/Lembaga. Selain itu, pengembangan IPTEK, pembangunan keamanan siber dan pembaharuan alutsista juga menjadi langkah strategis bagi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional.

Sementara itu, faktor eksternal mengacu pada dinamika di luar ruang lingkup domestik, baik bersifat disosiatif maupun asosiatif. Disosiatif dapat berbentuk potensi ancaman dari pihak/negara lain. Sementara asosiatif berkaitan dengan peluang kerjasama dalam membangun sistem keamanan yang terpadu. Dalam hal ini, Kementerian/Lembaga menanggulangi segala bentuk potensi ancaman memperluas jangkauan dan metode mengatasinya melalui peningkatan kerjasama strategis dengan negara lain. Misalnya, melakukan *Confidence Building Measure* dan transfer teknologi.

4 Bagaimana kondisi keamanan nasional Indonesia saat ini dihadapkan dengan konflik persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Persaingan antara AS dan China di LCS memiliki implikasi terhadap

kondisi keamanan nasional meski Indonesia bersikap netral dan menghindari keberpihakan kepada salah satu pihak. Persaingan antara negara *great powers* beserta pengaruhnya di kawasan telah memperbesar potensi perpecahan dan ketidakpercayaan (*distrust*) di antara negara-negara sekitar LCS. Alhasil, adanya ketidakpercayaan dan disintegrasi antara negara ASEAN memperbesar resiko stabilitas keamanan regional, sementara negara *great powers* terus memperluas pengaruhnya. Rivalitas AS-China menurunkan nilai strategis dari *regional order* yang dibangun oleh negara-negara ASEAN, terutama atas stabilitas di LCS. Selain itu juga menghambat implementasi visi strategis Indonesia dalam membangun keamanan nasional yang berporos maritim. Karena hakikatnya, keamanan nasional Indonesia tidak bisa terlepas dari kondisi keamanan regional dimana LCS adalah area sentralnya.

5 Mengapa LCS penting bagi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan Indonesia? Apa yang membuat LCS penting bagi keamanan nasional Indonesia?

JAWABAN

Pada dasarnya, lokasi strategis Indonesia yang berbatasan langsung dengan LCS memberikan keuntungan geostrategis alami, sehingga pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memiliki visi untuk menjadi Poros Maritim Global dengan membangun kekuatan geoekonomi dan geopolitik yang bersumber dari kelautan. Pemerintah menyadari bahwa di masa mendatang, Indonesia harus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan sebagai sumber perekonomian nasional. Terlebih, stabilitas di LCS berdampak pada keamanan dan kelancaran jalur perdagangan laut bagi Indonesia dan ASEAN.

Namun, visi tersebut belum sepenuhnya terlaksanakan mengingat kondisi riil LCS menunjukkan negara *great power* seperti AS dan China memiliki pengaruh yang kuat, bahkan jika dibandingkan dengan *regional order* ASEAN. Selain membangun kekuatan maritim, cara lain Indonesia dalam penjagaan stabilitas keamanan adalah dengan mempertahankan peran sentral Indonesia di ASEAN. Dengan kuatnya sentralitas dan *regional order*, maka negara ASEAN mampu menentukan sikap dan posisi kuat di dalam LCS, yang selama ini memberikan sumbangsih dalam stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

6 Apa kepentingan Indonesia di LCS dan strategi apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Indonesia bukan termasuk negara yang mengklaim kepemilikan LCS secara langsung. Tetapi, faktor geografis dan faktor politik internasional menjadi indikator kepentingan Indonesia di LCS. Berdasarkan kepentingan geografis, wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan LCS menandakan posisi strategis bagi kedua perairan. Stabilitas keamanan di LCS berimplikasi kepada kedaulatan wilayah Indonesia, terkhusus di Laut Natuna. Mengingat Indonesia juga perlu menjaga dan melindungi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), maka segala bentuk tindakan agresif pihak luar di wilayah LCS patut dipertimbangan bagi keamanan nasional dan kedaulatan wilayah. Dari segi kepentingan ekonomi, LCS merupakan area penting bagi kegiatan ekspor-impor Indonesia melalui perdagangan jalur laut. Sementara dari segi politik internasional, posisi Indonesia sebagai aktor sentral di ASEAN mendorong Indonesia berkepentingan untuk turut andil dalam permasalahan LCS.

Strategi yang perlu dilakukan Indonesia adalah melindungi kedaulatan wilayah demi penjagaan stabilitas keamanan nasional. Hal ini secara taktis dilakukan dengan melakukan penjagaan dan patrol rutin di sepanjang garis pantai yang berbatasan langsung dengan LCS.

Strategi politik juga perlu ditekankan Indonesia agar bisa melakukan konsolidasi bagi negara-negara ASEAN agar integrasi ASEAN tersebut dapat mengantisipasi pengaruh dari kekuatan China dan AS.

7 Bagaimana posisi Indonesia dihadapkan dengan kondisi persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Indonesia secara konsisten menjunjung hak kedaulatan negara juga menegaskan implementasi hukum laut internasional 1982. Meski memiliki posisi netral dan tidak berpihak, posisi Indonesia secara geografis dan politis tidak terlepas dari pusaran sengketa di kawasan LCS. Ketegangan antara AS dan China berdampak pada ketidakstabilan dan potensi ancaman bagi perdamaian di LCS. Oleh karenanya, Indonesia tidak bisa berdiam diri dalam menghadapi persaingan AS-China di LCS maupun konflik kepentingan antara negara yang mempunyai klaim di atas wilayah LCS.

Posisi netral Indonesia diartikan sebagai upaya penegakan terhadap hukum laut internasional, ZEE, dan kebebasan navigasi perairan internasional. Ketegangan tersebut juga berkontribusi dalam mekanisme penjagaan keamanan dan kedaulatan di lapangan, dimana Indonesia tidak mentolerir adanya penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di wilayah ZEE. Selain itu, posisi sentral Indonesia di keanggotaan ASEAN menempatkan Indonesia sebagai negara

dengan kapabilitas untuk mengupayakan integrasi ASEAN perihal keamanan di LCS.

8 Apa rencana strategis yang akan dilakukan Indonesia untuk mengantisipasi persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Dalam menghadapi sengketa LCS dan persaingan antara pengaruh kekuatan AS-China, Indonesia perlu membangun kemampuan untuk mempertahankan diri dan kesiapan dalam menghadapi ancaman kedaulatan. Dalam konteks strategi pertahanan, Indonesia perlu meningkatkan kapabilitas pertahanan yang diperhitungkan melalui *Minimum Essential Force* (MEF). Peningkatan kapabilitas pertahanan juga memfokuskan adanya modernisasi alutsista demi mendukung kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam menjaga kedaulatan maritim di Laut Natuna. Namun, perlu ditekankan bahwasanya peningkatan kapasitas pertahanan dan militer Indonesia dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat defensif, seperti melindungi hak Indonesia atas ZEE dan kedaulatan atas Laut Natuna.

Sementara untuk menegaskan implementasi hukum laut internasional serta untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak menghendaki tindakan ofensif di LCS, diplomasi menjadi instrumen penting untuk membangun *mutual trust* antara negara yang berkepentingan di LCS. Saat ini, Indonesia mengandalkan organisasi ASEAN sebagai wadah untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik di LCS. Jadi, penyelarasan antara instrumen pertahanan dan instrument diplomasi merupakan hal penting dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mengantisipasi pengaruh negatif persaingan AS-China terhadap keamanan nasional.

9 Apa ancaman yang perlu diwaspadai Indonesia untuk mengantisipasi persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Ancaman yang prominen dari konflik di LCS adalah terhadap kedaulatan landasan teritorial dan ZEE Indonesia. Pergerakan kapal-kapal ikan China yang seringkali beroperasi di sekitar Laut Natuna merupakan ancaman bagi pemanfaatan sumber daya alam di ZEE yang dilakukan Indonesia secara berdikari. Dalam hal ini, Bakamla RI dan lembaga lain yang terkait penjagaan garis pantai perlu mengawasi segala aktivitas yang merugikan sumber perekonomian di ZEE Indonesia. Selain ancaman kedaulatan dan hak pengelolaan SDA, tindakan China dalam membangun instansi militer di LCS juga menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di kawasan. Manuver militer yang

dilakukan AS turut memperbesar potensi ancaman sehingga menjadikan LCS sebagai wilayah rentan konflik terbuka. Eskalasi konflik yang ditimbulkan dari manuver militer dua kekuatan besar menandakan tindakan agresif satu pihak, dinilai sebagai ancaman oleh pihak lain. Ancaman meluasnya skala konflik akibat polarisasi kekuatan antara AS dan China juga patut diwaspadai oleh Indonesia juga negara-negara ASEAN.

Pertanyaan Penelitian 2

1 Apa target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Target sinergitas antar Kementerian dan Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan adalah untuk menjaga kepentingan nasional terkait keamanan dan stabilitas Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Kebijakan Pertahanan Tahun 2021 bahwa tujuan dan sasaran strategis pertahanan negara adalah terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Konsep terjaganya kedaulatan negara tersebut mencakup terjaganya keutuhan di wilayah darat, laut, dan udara, termasuk di daerah perbatasan dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Termasuk ancaman aktual yang ditimbulkan dari persaingan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan, seperti adanya kapal-kapal milik China yang berlayar di dekat perairan Laut Natuna Utara, yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

2 Apa saja upaya yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Dalam upaya mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China, tiap Kementerian dan Lembaga terkait sebisa mungkin fokus untuk menjalankan peran masing-masing yang sesuai target dan tujuan sinergitas tersebut. Selain itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas tersebut.

Yang pertama adalah pembangunan postur pertahanan negara guna meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Yang kedua adalah pembangunan sistem pertahanan negara baik pertahanan militer maupun nirmiliter guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman.

Yang ketiga adalah pembangunan kelembagaan pertahanan militer dan

pertahanan nimmiliter yang juga dapat membantu diplomasi pertahanan Indonesia secara luas.

Yang keempat adalah pembangunan bidang kerja sama internasional, dan yang terakhir adalah pembangunan industri pertahanan. Indonesia juga mengupayakan diplomasi bilateral dan multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah bersama-sama secara damai.

3 Sumber daya apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan sesuai rencana strategi K/L demi pengembangan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Sumber daya yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan stabilitas keamanan nasional adalah sumber daya manusia, teknologi informasi, dan alutsista. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral yang bertumpu pada totalitas kemampuan/profesionalisme dan kesadaran bela negara setiap warga negara untuk kepentingan pertahanan negara. Pengembangan kemampuan SDM pertahanan negara dilaksanakan dalam rangka mengelola dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk menghadapi setiap ancaman. Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dapat meningkatkan kemampuan pemantauan informasi tentang ancaman yang ada secara cepat dan terintegrasi dengan pusat sebagai upaya peningkatan deteksi dini ancaman. Selain itu modernisasi alutsista juga diperlukan sebagai upaya pertahanan defensif terhadap potensi konflik yang lebih besar dan mengancam Indonesia. Modernisasi kekuatan pertahanan, terutama dalam bidang maritim dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi konflik akibat ketidakpastian situasi strategis di LCS saat ini. Peningkatan sumber daya ini dapat mendukung rencana strategi K/L dalam pengembangan stabilitas keamanan nasional.

4 Bagaimana strategi K/L dalam menjaga sinergitas antar Lembaga dalam menghadapi ancaman persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Untuk menjaga sinergitas antar Lembaga diperlukan suatu kesamaan pandang yang dituangkan dalam sebuah referensi atau panduan nasional. Dalam rangka mendukung penyusunan serta koordinasi kementerian atau lembaga dalam implementasi pedoman dimaksud, perlu diselenggarakan koordinasi dengan K/L terkait melalui sebuah rapat koordinasi. Seperti yang dilakukan rapat koordinasi antar lembaga yang diikuti perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, Ditjen Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan, Ditjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, serta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam menangani isu pelanggaran kedaulatan RI di wilayah *Undelimited Waters* dengan melakukan Penyusunan Pedoman atau *Standar Operasional Prosedur* (SOP) pada tahun 2019. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, K/L menyepakati bahwa SOP penting agar seluruh K/L terkait memiliki satu pandangan untuk menghadapi negara tetangga yang berulang kali melakukan pelanggaran di *undelimited waters* dan menyepakati Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih (*undelimited waters*) dimaksud untuk dilaksanakan.

5 Bagaimana strategi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Strategi untuk mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China adalah memfokuskan peran dan tugas tiap Kementerian dan Lembaga terkait. K/L Indonesia seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan bersama TNI dapat melakukan upaya-upaya strategi bersama dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan. Upaya-upaya ini tidak hanya upaya yang dilakukan untuk keamanan nasional tetapi juga upaya untuk mencegah terjadinya konflik berkelanjutan yang terjadi di Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri dapat menjalankan strategi diplomasi dan politik luar negeri pemerintah Indonesia untuk membuka komunikasi atau dialog perdamaian di antara AS-China dan negosiasi di antara negara penggugat di Laut China Selatan. Kementerian Pertahanan dapat menjalankan diplomasi pertahanan secara bilateral atau multilateral dengan dengan negara-negara terkait di kawasan. Sementara itu, dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah NKRI, TNI dan sumber daya alutsista dapat berperan sebagai penjaga keamanan nasional juga *Minimum Essential Force* (MEF) yang merupakan bagian dari sistem pertahanan defensif aktif di wilayah perairan yang dekat LCS.

6 Apa yang sudah dilakukan oleh K/L sebagai upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Sebagai upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan Kementerian Pertahanan telah Perkuatan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional sesuai dengan konsep sentralitas ASEAN, peningkatan kerjasama pertahanan dengan memprioritaskan pada negara tetangga yang berbatasan langsung, negara di kawasan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan kawasan Indo-Pasifik serta negara yang memiliki kerjasama pertahanan dengan Indonesia

guna kepentingan nasional. Penguatan kerja sama keamanan maritim melalui latihan bersama dan patroli terkoordinasi secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat arsitektur keamanan wilayah regional, khususnya di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri juga berupaya untuk memfokuskan diskusi seputar *Code of Conduct* (CoC) dan juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama di kawasan. Target kebijakan luar negeri Indonesia adalah terjadinya negosiasi diantara negara yang berkonflik di Laut China Selatan serta mendorong agar dimulainya kembali negosiasi CoC untuk diplomasi pertahanan guna mengantisipasi persaingan yang terjadi. Selain itu TNI angkatan laut dan TNI angkatan udara juga meningkatkan kesiagaan untuk menjaga kedaulatan dengan terus berjaga menggelar patroli rutin di Laut Natuna.

7 Apakah ada rencana kegiatan bersama dari K/L untuk mengantisipasi persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Rencana kegiatan bersama dari Kementerian atau Lembaga untuk mengantisipasi persaingan Amerika Serikat di Laut China Selatan adalah dengan melaksanakan kegiatan diskusi dalam sebuah forum untuk saling memperdalam pengetahuan dan mencari langkah-langkah strategis untuk penguatan strategi, penguatan kebijakan, dan penguatan program-program mengenai upaya kita bersama dalam mengatasi masalah-masalah yang Indonesia hadapi, khususnya dalam mengatasi persaingan AS-China di Laut China Selatan. K/L terkait dapat melaksanakan *Round Table Discussion* (RTD) atau *Forum Group Discussion* (FGD) untuk membahas strategi sinergitas antar Kementerian dan Lembaga dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS. Forum-forum diskusi untuk membahas penanganan isu Laut China Selatan seringkali diselenggarakan oleh beberapa K/L terkait, contohnya adalah *Forum Group Discussion* (FGD) terbatas yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dengan tema “Upaya ASEAN dan Posisi Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan”. FGD tersebut mendiskusikan bagaimana kiprah Indonesia di ASEAN dalam upaya menjaga stabilitas dan menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara serta melakukan berbagai upaya konstruktif mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi yang salah satunya adalah ketegangan di Laut China Selatan.

8 Sejauh mana sinergitas antara K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS? Bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi persaingan AS-

China di LCS demi menjaga stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Sinergitas antara K/L pemerintah Indonesia dengan pendekatan keluar maupun kedalam mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China di di Laut China Selatan serta peningkatkan stabilitas keamanan nasional. Sinergitas K/L juga harus disertai dengan peningkatan kekuatan maritim demi mengatur kolaborasi tugas yang dilakukan agar sejalan dengan strategi kebijakan yang telah ada. Selain itu, sebagai negara non-claimant yang memiliki keuntungan geostrategis, Indonesia memiliki potensi dalam upaya mengatasi rivalitas AS-China apabila *policy maker* dan *strategy maker* bekerja secara sinergis. Sinergitas antar K/L dilihat menggunakan pendekatan 1,5 *track diplomacy*. Pendekatan tersebut merupakan gabungan antara *track 1 diplomacy*, yang mengacu pada aktor negara atau pemerintah dan *track 2 diplomacy*, yang mengacu pada peran aktor non negara atau LSM. Aktor-aktor lembaga yang terdapat dalam 1,5 *track diplomacy* tersebut dapat mendukung diplomasi pertahanan sebagai langkah yang untuk mengatasi ketegangan, stabilitas keamanan, dan pertahanan Indonesia di Laut China Selatan.

9 Apakah terdapat aturan atau regulasi yang mencakup sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS.

JAWABAN

Indonesia perlu memperkuat sinergitas K/L untuk membangun keamanan maritim di LCS secara terpadu, sebagai antisipasi persaingan AS-China di LCS. Adapun aspek regulasi yang memberikan kewenangan kepada K/L untuk menegakan hukum di laut adalah sebagai berikut:

- 1) UU Perairan yang memuat penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut serta tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- 2) UU ZEE yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan hak berdaulat, yurisdiksi, hak dan kewajiban berdasarkan Konvensi Hukum Laut kepada TNI AL dan aparat penegak hukum terkait.
- 3) UU 17/1985 yang mengatur semua aspek hukum laut berdasarkan ketetapan UNCLOS 1982 tentang pelaksanaan penataan laut oleh instansi/dinas pemerintah yang berwenang.
- 4) UU Pertahanan yang mengatur penyusunan strategi hanneg sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu, UU ini juga menentukan TNI mempunyai tugas pokok menegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

- 5) UU Pelayaran yang mengatur fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran. UU ini memuat koordinasi Pelayaran Nasional Indonesia.

Selain itu, melalui fungsi legislasi, DPR mendukung pertahanan nasional juga sebagai aturan yang mencakup sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS melalui perumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang tersebut turut mengatur mengenai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Melalui fungsi anggaran, DPR RI juga memperhatikan pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) untuk memodernisasi kekuatan pertahanan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan melindungi kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pertanyaan penelitian 1.

- 1 K/L mana yang menjadi leading sector dalam melaksanakan sinergitas untuk mengantisipasi persaingan AS-China di LCS dalam menjaga stabilitas keamanan nasional? Apakah K/L tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mensinergikan K/L terkait?**

JAWABAN

Upaya diplomasi terintegrasi (*integrated diplomacy*) antar K/L terkait di bawah satu atap Kemenko Polhukam RI (Hanneg) atau Kemenko Kemaritiman RI (kedaulatan wilayah) sebagai *Leading Sector*, serta Kemenlu RI atau Kemhan RI atau Mabes TNI sebagai koordinator pelaksana yang mengkoordinir semua K/L terkait dalam menjalin setiap bentuk kerjasama antar negara yang memiliki kaitan dengan ZEE di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia dapat mengantisipasi persaingan AS-China di LCS. Sebagai contoh, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan mengkoordinasikan Tri Matra postur pertahanan negara yaitu matra darat, matra laut, dan matra udara dalam menjaga stabilitas keamanan Nasional. Singergitas antar lembaga diperlukan dalam implementasi strategi penjagaan stabilitas keamanan Nasional. Kementerian Pertahanan, TNI AL, TNI AU, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dapat berperan dalam meningkatkan operasi penjagaan secara intensif di wilayah Natuna keamanan teritorial Indonesia. Kementerian Pertahanan dapat menciptakan dialog perdamaian melalui diplomasi pertahanan dengan negara. TNI AL menjadi badan pemerintah yang tidak dapat dipisahkan jika membahas mengenai klaim Tiongkok di perairan Natuna Utara sesuai dengan tugas TNI AL yakni menegakkan hukum

dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional berdasarkan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. TNI AU menjadi unsur militer lainnya yang dikerahkan untuk mengawasi wilayah Laut Natuna Utara dari udara. Selanjutnya Bakamla RI juga turut dikerahkan untuk mendukung kekuatan di perbatasan Natuna. Bakamla RI menjadi salah satu badan yang memiliki tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pengintegrasian dan sinergitas lembaga-lembaga tersebut dapat menjaga keamanan Indonesia dengan tugas dan perannya masing-masing.

2 Mengapa perlu sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS? Apa kaitannya dengan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Sinergitas antar lembaga penting agar seluruh Kementerian atau Lembaga terkait memiliki satu pandangan yang sama untuk mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam suatu pedoman dapat digunakan oleh K/L terkait dalam bertindak dan menghadapi baik AS, China, dan juga negara-negara di kawasan yang berada diantara ketegangan rivalitas AS dan China. Koordinasi dan sinkronisasi K/L sebagai *unity of efforts* akan mendukung terutama terhadap efektifitas operasi keamanan, khususnya operasi Bakamla RI, TNI AL dan AU, dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sehingga dapat memperkuat posisi negara Indonesia diantara AS-China. Apabila ada kendala kelembagaan maka akan ada kemungkinan upaya-upaya yang dapat menimbulkan kontraproduktif dari ataupun bagi K/L terkait. Sehingga hal tersebut dapat menjadi tantangan dan hambatan dalam upaya mengantisipasi persaingan AS-China di LCS yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.

3 Bagaimana urgensi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS? dan bagaimana hubungannya dengan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Fakta posisi Amerika Serikat dan China sebagai *great power* yang memiliki kekuatan besar dibandingkan Indonesia menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia sehingga meningkatkan urgensi sinergitas antar Kementerian atau Lembaga dalam mengantisipasi rivalitas kedua negara tersebut di Laut China Selatan. Satgas TNI yang bertugas dan antara Satgas TNI dengan unit-unit lapangan dari K/L terkait langsung di Laut Natuna Utara (Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi, dll) perlu dibangun atau ditingkatkan, terutama dalam bentuk ROE

integratif/kontinjensi yang digunakan dalam menghadapi aksi agresivitas China dan persaingannya dengan AS, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan lebih cepat, tepat dan terpadu dalam koridor aturan hukum. Selain itu peningkatan program Pembinaan Wilayah Pertahanan (Binwilhan) yang dilakukan oleh TNI bersama-sama dengan K/L terkait kepada nelayan-nelayan Indonesia dapat berperan sebagai sumber informasi intelijen dan sekaligus untuk meningkatkan situational *awareness*/kesadaran bagi TNI dalam mengantisipasi ancaman terhadap ZEE di Laut Natuna Utara.

4 Apa saja faktor yang mempengaruhi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di LCS?

JAWABAN

Faktor yang mempengaruhi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan adalah adanya ancaman aktual yang ditimbulkan semakin nyata dan jelas mengancam kedaulatan wilayah NKRI, khususnya di Laut Natuna Utara yang berdekatan dengan LCS. Sehingga hal tersebut mendorong urgensi sinergitas kolaborasi antar K/L untuk menjaga kepentingan nasional, yaitu keamanan dan kestabilan Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hambatan kelembagaan yang dapat mempengaruhi sinergitas K/L. Contohnya keterbatasan anggaran serta proses birokrasi yang cukup panjang di masing-masing K/L dalam menindaklanjuti kebijakan menjadi hambatan internal pelaksanaan kerja sama luar negeri maupun penyelesaian permasalahan bidang politik luar negeri. Selain itu, masih adanya ego sektoral antar K/L yang menjadi kendala dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam merespon tantangan ancaman keamanan di kawasan serta dalam pengembangan kerja sama bilateral dan regional bidang politik, hukum, dan keamanan dengan negara-negara di kawasan. Hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sinergitas K/L.

5 Apa saja kendala yang dialami oleh K/L dalam melaksanakan strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan AS-China untuk pengembangan penjaminan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Kelembagaan memiliki cukup banyak keterkaitannya satu dengan lainnya dalam penanganan aksi China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan tersebut, terutama aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing kelembagaan negara. Hal tersebut bisa menjadi kendala atau tantangan K/L dalam melaksanakan strategi sinergitas dalam mengantisipasi persaingan

AS-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional. Dihadapkan dengan kompleksitas ancaman China dengan kekuatan militernya yang besar dan modern, serta keterbatasan sumber daya nasional untuk mendukung seluruh upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi aksi China. Maka tantangan kelembagaan ini dapat melemahkan posisi Indonesia secara internal untuk mewujudkan *unity of efforts*, terutama terhadap efektifitas operasi TNI yang akan dilakukan karena kemungkinan adanya upaya-upaya yang dapat menimbulkan kontraproduktif dari ataupun bagi K/L terkait.

Pertanyaan Penelitian 3

6 Apa target pemerintah RI dalam upaya antisipasi persaingan AS-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Pemerintah RI memprioritaskan agenda penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan mengingat kondisi konfliktual di LCS. Target tersebut diupayakan dengan mengoptimalkan pembangunan bidang pertahanan di Natuna, yang termasuk dalam daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pembangunan fisik ditandai dengan dibukanya fasilitas dermaga dan penerbangan di wilayah Natuna sebagai bentuk pencegahan dan pertahanan diri dari ancaman. Pembangunan non-fisik berupa penyuluhan atau edukasi bela negara kepada masyarakat Natuna juga penting untuk dilaksanakan. Peran serta masyarakat, terlebih yang bermata pencaharian sebagai nelayan di sekitar Laut Natuna diperlukan untuk membantu TNI dan Bakamla dalam menjalankan tugas sebagai komponen utama keamanan laut dan daerah perbatasan.

Selain target yang didasari pembangunan nasional, target diplomatik juga menjadi kunci stabilitas keamanan nasional. Indonesia berperan dalam mencapai target keamanan nasional dan regional yang dilakukan dengan kerjasama multilateral. Melalui upaya diplomasi dengan ASEAN maupun dengan negara Asia-Pasifik lainnya, Indonesia menargetkan implementasi kesepakatan *Code of Conduct* (COC) agar status LCS sebagai area strategis jalur komunikasi dan perdagangan internasional dapat terjaga keamanannya.

7 Apa ancaman yang dihadapi RI dalam upaya antisipasi persaingan AS-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Dalam menghadapi persaingan AS-China di LCS, Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan strategis yang berasal dari pembangunan bidang pertahanan dan diplomasi. Penjagaan stabilitas keamanan yang bersumber dari pembangunan fisik akan menghadapi ancaman ketika kedua negara adidaya

menempuh tindakan sepihak dan non-koperatif terhadap permasalahan di LCS. Rivalitas negara adidaya dalam konteks geopolitik memang menjadi tantangan tersendiri bagi negara kawasan yang pada umumnya merupakan negara berkembang. Terdapat kemungkinan bahwa upaya penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan yang digencarkan Pemerintah RI mendapatkan konfrontasi dari Pemerintah China, sebagaimana yang juga dilakukan terhadap pergerakan militer AS.

Kemudian, polarisasi antara dua kekuatan besar dapat mengancam solidaritas negara ASEAN dan integrasi kawasan. Ketimpangan perimbangan kekuatan (*balance of power*) antara negara-negara ASEAN dengan negara adidaya (AS dan China) dapat memudarkan sentralitas ASEAN dalam mengupayakan manajemen konflik di kawasan LCS. Polarisasi dua kubu adidaya juga menjadi tantangan bagi posisi Indonesia dalam berperan aktif menjaga stabilitas keamanan LCS.

8 Sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam upaya antisipasi persaingan AS-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Sumber daya mengacu pada seluruh aset nasional RI yang ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah persaingan AS-China di kawasan LCS. Sebagaimana yang dimuat dalam artikel berita laman resmi DPR RI, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan pemerintah perlu mempersiapkan rencana pengamanan aset strategis nasional dengan mengembangkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini. Sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga ahli dan para pemangku kebijakan hakikatnya menjadi sumber utama untuk mengelola dan memelihara aset strategis nasional RI. Kualitas SDM kemudian mempengaruhi bagaimana Indonesia mencapai kebutuhan sumber daya materil yang memadai, antara lain alutsista, sarana/prasarana transportasi, serta sumber daya ekonomi Indonesia yang berasal dari sektor perikanan dan penambangan migas di sekitar Laut Natuna.

9 Bagaimana strategi sinergitas yang dilakukan oleh K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas nasional?

JAWABAN

Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam instrumen kekuatan maritim Indonesia perlu menyatukan visi dan misi agar menciptakan sinergitas dalam menghadapi persaingan AS-China. Dalam upaya penegakkan kedaulatan berlandaskan hukum laut internasional, pedoman kebijakan nasional harus

diupayakan secara terkoordinasi oleh Kementerian/Lembaga terkait kekuatan maritim Indonesia. Misalnya, dalam memandang klaim China atas *nine-dash-line* yang tidak sesuai dengan hukum laut internasional, K/L perlu konsisten melakukan penegakkan hukum terhadap aktivitas ilegal di wilayah yang bersinggungan dengan yuridiksi Indonesia. TNI dan Bakamla bersinergi melaksanakan operasi lapangan terkait pengamanan laut territorial serta wilayah ZEE.

Dalam sektor perekonomian maritim, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dalam memelihara pengelolaan SDA laut yang berkelanjutan serta memberdayakan SDM agar bisa mendorong produktivitas di sektor perikanan. Selanjutnya, di panggung internasional, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan bersinergi dalam melaksanakan diplomasi pertahanan guna membangun komunikasi dan *mutual trust* antara negara-negara kawasan agar tidak mudah terprovokasi dengan tindakan-tindakan agresif negara adidaya.

10 Bagaimana potensi strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan AS-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Mengkaji potensi strategi sinergitas dalam upaya penjagaan stabilitas keamanan dapat dilihat menggunakan pendekatan 1,5 *track diplomacy*. Pendekatan tersebut merupakan gabungan antara *track 1 diplomacy*, yang mengacu pada aktor negara atau pemerintah; dan *track 2 diplomacy*, yang mengacu pada peran aktor non negara atau LSM. Seperti yang telah dipaparkan di atas, Kementerian/Lembaga Negara memperjuangkan kedaulatan wilayah dan mengawasi pengelolaan SDA strategis secara formal. Aktor negara dalam hal ini memiliki wewenang serta kekuasaan untuk mengambil langkah terukur untuk merespon tindakan agresif dari pihak luar.

Di sisi lain, NGO dan LSM memiliki peluang untuk mendukung penjagaan stabilitas keamanan nasional dengan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan IPTEK. Diplomasi yang bersifat *low-politics* ini memberikan potensi terhadap perubahan konstruktif arsitektur keamanan di wilayah perairan Indonesia maupun di LCS. Sinergitas antara aktor negara dan aktor non-negara meningkatkan potensi Indonesia akan stabilitas keamanan nasional, salah satunya menjadikan Indonesia berdikari dalam penguasaan dan pengelolaan kemaritiman.

11 Bagaimana prediksi persaingan AS-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas nasional dan sejauh mana kesiapan K/L dalam mengantisipasi hal

tersebut?

JAWABAN

Prediksi persaingan antara AS-China di LCS tidak terlepas dari faktor domestik dua negara adidaya tersebut. Pemerintah China konsisten dengan sikapnya yang mengklaim hak atas *nine-dash-line* di LCS sambil memperluas pasar ekonomi di kawasan ASEAN. Sementara di pihak AS, transisi pemerintahan baru masih menyisakan ketegangan yang belum mereda. Baik AS maupun China sama-sama menjalin relasi dengan sejumlah negara ASEAN yang memiliki klaim tumpang tindih atas LCS. Namun, Manuver militer yang dilakukan kedua pihak masih menciptakan *security dilemma* di kawasan.

Ketika melihat partisipasi aktif delegasi Indonesia dalam pertemuan multilateral terkait penanganan masalah LCS, dapat terlihat kesiapan dan kesediaan Indonesia untuk menjadi aktor sentral dalam isu tersebut. Namun, berdasarkan penelitian terkait sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia, data menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan dan strategi yang belum diharmonisasi. Perspektif dalam memandang klaim China atas *nine-dash-line* pun masih membutuhkan penyesuaian melalui pedoman nasional.

12 **Bagaimana upaya K/L untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam mengantisipasi persaingan AS-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?**

JAWABAN

Upaya untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar lembaga dapat dilakukan melalui tiga (3) parameter berikut;

- 1) Penyesuaian perspektif (*organizational synergy*). Perspektif yang dimaksud adalah ketika para pembuat kebijakan atau strategi, dan pihak pelaksana berada penentuan sikap yang sama. Sebagai contoh, perlunya menyesuaikan perspektif diantara K/L mengenai klaim China atas *nine-dash-line*, apakah klaim tersebut merupakan ancaman/bukan ancaman/potensi ancaman. Interpretasi terhadap klaim tersebut menjadi penting bagi Pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan nasional.
- 2) Sinergitas Kebijakan (*policy synergy*). Hal ini merupakan bentuk harmonisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh K/L instrumen kekuatan maritim Indonesia. Sebagai contoh, ketika Pemerintah Pusat merumuskan kebijakan untuk menunjukkan eksistensi di wilayah perbatasan, maka K/L dibawahnya perlu melaksanakan kebijakan yang berpegang secara nasional.

3) *Rule of Engagement* yang terarah (*operational synergy*). Hal ini menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pelaksana kebijakan di lapangan, akan berdampak pada kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Sebagai contoh, K/L mengambil sikap tegas berdasarkan pedoman nasional ketika menghadapi provokasi kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal di perairan ZEE Indonesia.

13 Apa saja target capaian dalam mengantisipasi persaingan AS-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Target utama Indonesia dalam penjagaan stabilitas keamanan nasional adalah melindungi keutuhan wilayah dan hak kedaulatan atas laut territorial dan ZEE. Sebagai upaya merealisasikannya, maka diperlukan target lapangan berupa peningkatan kualitas sumber daya strategis terkait pengamanan di daerah perbatasan LCS. Dalam konteks pertahanan, pemenuhan target MEF diupayakan untuk membangun sistem pertahanan yang memadai, modern dan sesuai dengan kalkulasi strategis terhadap kondisi di LCS. Dari sisi ekonomi, Indonesia juga menargetkan visi dan misi perekonomian berporos maritim. Target tersebut tentu memerlukan konsistensi dalam penguasaan dan pengelolaan SDA di atas ZEE.

Dari sisi politik, peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa LCS juga memiliki target-target yang hendak dicapai bersama dengan negara mitra. Mengingat kondisi LCS menandakan adanya *common interest* sekaligus *common threats*, maka berkepentingan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di LCS. Target dalam upaya diplomasi tingkat ASEAN Plus adalah disepakatinya *Code of Conduct* (COC) sebagai produk hukum internasional yang mengikat. Bisa disimpulkan bahwa target capaian dalam mengantisipasi persaingan AS-China memerlukan sinergitas antar lembaga, baik di tingkat domestik maupun multilateral.

14 Apa saja langkah strategis yang dilakukan dalam mengantisipasi persaingan AS-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN

Pertama, melalui pembangunan pertahanan militer di kawasan perairan Natuna yang merupakan daerah 3T. Upaya ini merupakan bentuk strategi pertahanan untuk menegaskan eksistensi kedaulatan RI. Langkah ini megupayakan pengadaan alutsista yang memadai dan tepat guna dalam menopang aktivitas pengawasan dan pengendalian ancaman di perbatasan LCS. Pembangunan kapabilitas pertahanan juga merupakan strategi antisipasi jika

persaingan AS-China mengarah pada konflik terbuka.

Kedua, implementasi diplomasi pertahanan yang memfokuskan pada upaya *naval diplomacy*. Strategi ini selaras dengan target Indonesia menjadi negara berkekuatan maritim. *Naval diplomacy* dilakukan melalui mekanisme pembuatan, pengembangan serta perdagangan alutsista yang ditindaklanjuti dari kerjasama strategis dengan negara-negara ASEAN. Dengan demikian, Indonesia membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan industri pertahanan sekaligus memperkuat posisi ASEAN dalam persaingan AS-China. Ketiga, pengamanan terhadap aset nasional yang berada dalam wilayah laut Indonesia dikarenakan memiliki nilai strategis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

- 15 Dalam pelaksanaan sinergitas, K/L mana yang seharusnya mempunyai mandat untuk mengordinasikan strategi tersebut dan bagaimana implementasinya?**

JAWABAN

Kementerian/Lembaga yang memperjuangkan kedaulatan dan keamanan nasional adalah sebagai berikut;

- a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- b. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Kementerian Pertahanan
- e. Kementerian Luar Negeri
- f. TNI
- g. Bakamla

Implementasi sinergitas strategi dapat dilihat dengan dengan beberapa penjelasan berikut.

- 1) Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan nasional, dengan tujuan mengharmonisasi kebijakan turunan atau kebijakan lapangan yang diterapkan oleh K/L lain.
- 2) Dengan dilengkapi persenjataan, TNI dan Bakamla melakukan patroli rutin dalam wilayah batas luar territorial Indonesia. Dalam hal ini, TNI AL dan Bakamla berkapasitas untuk bertindak jika terjadi *Rule of Engagement* dengan kapal negara asing. Sementara KKP berpatroli dalam zona territorial hingga ZEE untuk menindak kapal pencuri ikan asing.
- 3) Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri bersinergi dalam mengupayakan diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan

(*Confidence Building Measure*) dengan negara lain. Selain itu, juga berwenang untuk menjajaki kerjasama strategis demi peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan.

LAMPIRAN 2.4 HASIL WAWANCARA KEMENKO MARVEST

Asdep Plt. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan, Kemenko Marvest - Bapak Sora Lukita

Selamat siang kami dari tadi menyimak berbagai pemaparan dan diskusi yang telah disampaikan oleh pemapar dan juga diskusi berjalan setelahnya dan kami menyambut baik proses diskusi yang berjalan sangat intens yang tentunya hal hal yang disarankan bagaimana kita terus berkolaborasi antara sesama Instansi untuk menyelaraskan langkah dan program serta kebijakan untuk Indonesia dalam menyikapi beberapa hal yang terjadi di Laut China Selatan.

Saya rasa kalau dari sisi kami dari Kemenko Marinvest ada sedikit juga tambahan mungkin, di dalam tindak lanjut bagi kebijakan laut Indonesia di Kemenko Marinvest juga telah menerbitkan dokumen induk diplomasi maritim. Di dalam buku diplomasi maritim tersebut juga tertuang beberapa info ataupun elemen di mana Indonesia bisa menyikapi isu isu aktual di regional salah satunya terkait konflik Laut China Selatan di sana juga tertuang bagaimana elemen atau saran kebijakan bagaimana Indonesia menyikapi hubungan dengan beberapa negara mitra kunci termasuk di dalamnya adalah China dan Amerika dan di sana sebetulnya harapannya adalah dari buku diplomasi maritim ini adalah yang sempat diluncurkan oleh bapak Menko dan juga sempat dipresentasikan juga kalo nggak salah secara langsung di hadapan Duta besar yang ada di Jakarta di gedung CSIS hal ini sekiranya bisa menjadikan pegangan kita bersama untuk proses diplomasi maritim yang komprehensif, bisa saling terkoneksi satu dengan yang lain jadi kita sama sama punya pegangan bagaimana menyikapi isu Laut China Selatan dan bagaimana kita menyikapi politik luar negeri dengan Amerika dan juga dengan Chin dan juga beberapa negara maritim lainnya.

sedikit juga yang ingin kami sampaikan adalah terkait kondisi di Laut China Selatan ini seperti pak Vitto menyampaikan bahwa kondisinya memang terus akan bergerak dan kalau boleh saya akan menyampaikan bahwa analisa dari beberapa pakar Laut China Selatan yaitu merupakan sebuah sengketa yang tidak akan pernah terselesaikan. simply karena kalau sengketa sengketa biasa antara dua pihak saling bersengketa Subject nya jelas dan Object nya jelas. Sedangkan laut China Selatan ini sengketa nya terkait banyak negara jadi kalau kita bicara sekarang dalam konteks Amerika dan China tetapi banyak kepentingan lain yang mewarnai konflik di Laut China Selatan terkait hal tersebut sebetulnya yang akan saya munculkan dalam forum ini adalah ada banyak pakar yang menyampaikan bahwasanya Laut China Selatan

ini adalah bagian dari proyeksi besar teritorial dari China sebetulnya apa sih yang diributkan? konteksnya adalah sebenarnya lebih terhadap bagaimana China berambisi untuk menguasai Indian ocean

Indian ocean juga banyak yang menyebutkan akan menjadi theater of konflik kenapa disampaikan demikian karena simply sebetulnya ini karena adalah perebutan pengaruh di laut China Selatan yang merupakan salah satu pintu gerbang juga apabila ada kita ingin menuju Indian ocean dari Sisi regional Asia Timur. Dan ini tentunya menjadi sebuah warning karena bagaimanapun apabila menjadi the next theatre of conflict nya di Indian ocean lalu berkaca di laut China Selatan yang menjadi pintu gerbang maka Indonesia harus siap siap bagaimanapun untuk menuju Indian ocean harus menuju ke Indian Ocean, pasti lewat perairan Indonesia. Untuk itu kita seharusnya sudah punya banyak alasan untuk bersiap bersiap bukan hanya untuk konflik ke LCS nya tetapi the next theater konflik di Indian ocean dan Indonesia merupakan jalur untuk menuju Indian ocean dari Sisi Asia Timur maupun laut China Selatan terima kasih mungkin bisa menjadi bahan masukan.

LAMPIRAN 2.5 HASIL WAWANCARA KEMENDAGRI

Pertanyaan penelitian 1. Bagaimana Rencana Strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

INDIKATOR : *Teori Strategi: Ends, Means, Ways*

1. Apa dan bagaimana cara yang dilakukan oleh Indonesia sesuai tugas dan fungsi K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?
2. Bagaimana rencana politik luar negeri dan target RI, khususnya kebijakan pertahanan Indonesia dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?
3. Bagaimana cara menyelesaikan/mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
4. Bagaimana kondisi keamanan nasional Indonesia saat ini dihadapkan dengan konflik persaingan AS-China di Laut China Selatan?
5. Mengapa Laut China Selatan penting bagi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional Indonesia? Apa yang membuat LCS penting bagi keamanan nasional Indonesia?
6. Apa dan bagaimana kepentingan Indonesia di Laut China Selatan dan strategi apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional?
7. Apa dan bagaimana posisi dan kepentingan Indonesia dihadapkan dengan kondisi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?
8. Apa tujuan atau rencana strategis yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?
9. Apa saja ancaman yang perlu diwaspadai Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?

JAWABAN:**1. Jawaban pertanyaan nomor 4, 5, dan 9.**

- a. Kondisi keamanan nasional Indonesia saat ini sangat terkait dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap konflik persaingan AS-China di Laut China Selatan. Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, panjang garis pantai 108.000 km serta memiliki letak strategis di antara dua benua dan dua samudera termasuk keberadaan empat dari sembilan *choke points* dunia serta *sea line of communication* (SLOC) maupun *sea line of oil trade* (SLOT), menempatkan Indonesia dalam posisi yang strategis di kawasan Asia-Pasifik atau Indo-Pasifik. Dengan kondisi demikian, instabilitas kondisi keamanan di kawasan akibat konflik atau persaingan kekuatan besar secara langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada kondisi stabilitas dan keamanan nasional.
- b. Pentingnya posisi strategis Indonesia terutama dalam konteks persaingan di LCS antara lain adalah Indonesia sebagai satu-satunya negara yang wilayahnya membentang ke dalam tiga *sub-area of responsibility* dari US Indo-Pacom (salah satu dari *geographic combatant command* milik Amerika Serikat), yaitu wilayah Samudera Hindia, wilayah Pasifik dan *first island chain*. Di sisi lain, perairan Indonesia juga menjadi pintu gerbang dalam konsep *string of pearl* China dari wilayah Asia Timur ke Samudera Hindia. Menyikapi hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa siapapun yang menguasai Indonesia, akan menguasai kawasan Indo-Pasifik sehingga dapat dipastikan akan ada banyak pihak dan kepentingan terutama dari AS dan China yang akan mencoba mengambil keuntungan dari posisi Indonesia. Oleh sebab itu, keamanan nasional dalam konteks *maritime security* dengan TNI AL sebagai *leading sector* dan dengan kapabilitasnya sebagai alat pertahanan di laut, memiliki kewajiban untuk mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan laut Indonesia terhadap ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
- c. Ancaman yang perlu diwaspadai oleh Indonesia sebagai antisipasi terhadap persaingan Amerika-China di Laut China Selatan dapat berupa ancaman aktual berupa ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Bentuk ancaman tersebut seperti pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, kegiatan intelijen/spionase, separatisme dan pemberontakan, perompakan dan

pembajakan bersenjata, ancaman siber, senjata biologis dan bahkan ancaman potensial yang belum terjadi saat ini namun dapat saja terjadi sewaktu-waktu dalam situasi tertentu menjadi ancaman nyata berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing) termasuk akses atau dampak dari perang konvensional antara pihak/negara lain di kawasan terutama di wilayah yang berdekatan/berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. **Jawaban pertanyaan nomor 2 dan 8.**

- a. Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia tertera pada Pembukaan UUD 1945 yaitu politik luar negeri yang bebas aktif sehingga sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat didikte oleh negara lain dan menerapkan prinsip saling menghormati serta berdasar pada aturan hukum dan kesepakatan internasional, namun di sisi lain Indonesia juga harus aktif dalam hubungan internasional sesuai tujuan nasional yang salah satunya adalah keikutsertaan Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia.
- b. Sikap Indonesia terhadap isu di LCS adalah berpegang pada UNCLOS 1982 sebagai referensi hukum laut internasional dalam kebijakan politik luar negerinya, di mana klaim sepihak *nine dash line* China tidak memiliki dasar hukum yang valid, tidak dapat diterima, dan tidak dapat diakui. Namun hal ini juga tidak berarti Indonesia bersikap apatis dan memihak pada pihak lainnya. Indonesia berdasarkan tatanan dan mekanisme hubungan internasional berupaya mendorong agar konflik tetap dapat dikelola secara damai untuk mencapai solusi terbaik bagi kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas dan perdamaian serta kesejahteraan bersama di kawasan.
- c. Mengantisipasi potensi eskalasi konflik di LCS, Indonesia juga dapat berpedoman pada *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea* (1994), khususnya bab II bagian I poin 16, yaitu sebagai negara netral (tidak berpihak) harus dapat menjaga perairan dan yurisdiksinya agar tidak digunakan oleh salah satu pihak yang bertikai. Hal ini terkait dengan geostrategi Indonesia mengantisipasi eskalasi konflik yang berpotensi memuncak akibat persaingan kepentingan kekuatan besar di kawasan. Indonesia harus menjaga wilayah yurisdiksinya agar tidak digunakan untuk tujuan dan kepentingan pihak lain yang berkonflik serta mencegah agar akses dari konflik itu sendiri agar tidak berimbas kepada kepentingan nasional Indonesia.

- d. Hal ini berimplikasi kepada peran TNI, termasuk TNI AL sebagai bagian integral yang merupakan alat pertahanan negara memiliki fungsi penangkal, penindak dan pemulih terhadap ancaman yang timbul akibat konflik di LCS yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

3. **Jawaban pertanyaan nomor 1, 3, 5, 6, dan 7.**

- a. Sebagai negara kunci di kawasan, Indonesia harus memanfaatkan posisinya seoptimal mungkin dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya sekaligus memainkan peran strategisnya secara tepat dalam menghadapi isu persaingan kekuatan besar di kawasan baik melalui diplomasi dalam kerangka bilateral maupun memanfaatkan forum multilateral seperti ASEAN atau kerangka kerja sama lainnya. Hal ini mengingat, kondisi di LCS akan berdampak pada kepentingan Indonesia. Kepentingan-kepentingan tersebut antara lain:
 - 1) Kedaulatan. Walaupun Indonesia bukan sebagai *claimant state* Namun dalam klaim sepihak China dalam peta *nine dash line*-nya beririsan dengan sebagian wilayah ZEE Indonesia yang berbatasan dengan perairan Kabupaten Natuna. Apabila China tidak ragu berhadapan dengan beberapa negara *claimant states* untuk klaim sepihaknya di LCS, maka tidak tertutup kemungkinan China juga akan berpotensi melakukan klaim sepihak lainnya di wilayah sekitar LCS lainnya termasuk perbatasan LNU.
 - 2) Kepentingan politik. Sebagai negara yang menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia akan berada dalam posisi yang strategis dalam persaingan kekuatan besar di LCS. Indonesia sebagai negara yang terbesar dan "dituakan" di ASEAN, memiliki posisi geografis yang vital dalam akses laut dari dan ke kawasan LCS tentunya akan menjadi sasaran perebutan pengaruh China maupun AS agar berpihak atau mendukung kepentingan salah satu dari dua kekuatan besar tersebut.
 - 3) Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Apabila sengketa tersebut tereskalasi menjadi perang, sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas atau berpotensi *spill over* hingga ke wilayah Indonesia, sehingga menjadi ancaman militer yang serius berupa penggunaan wilayah yurisdiksi Indonesia baik darat, laut, dan udara untuk kepentingan operasi militer

negara yang bersengketa, contohnya seperti memanfaatkan wilayah Indonesia untuk pangkalan aju, sumber dan jalur logistik, rute transit maupun jalur alternatif, dan lain-lain.

- 4) Kepentingan ekonomi. Potensi sumber daya kelautan nasional di LNU yang berbatasan dengan LCS cukup besar, terutama untuk sektor perikanan. Eskalasi konflik yang meningkat dan bahkan apabila hingga sampai pada perang sebagai puncak eskalasi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian dengan berkurangnya hasil tangkap akibat terbatas atau terhentinya aktivitas perikanan, di samping potensi rusaknya ekosistem laut akibat aktivitas militer di kawasan. Sektor pariwisata bahari Indonesia juga akan terganggu dengan memanasnya konflik di LCS. Selain itu, jalur perdagangan internasional yang terdampak akibat situasi konflik juga dapat mengakibatkan peningkatan biaya transportasi laut, logistik dan asuransi termasuk perubahan rute kapal-kapal niaga menghindari wilayah konflik di LCS.
 - 5) Sosial budaya. Pecahnya perang sebagai puncak eskalasi konflik di Laut China Selatan akan berpotensi menimbulkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke Indonesia. Hal ini pernah terjadi sebelumnya ketika terjadi Perang Vietnam, sejumlah besar arus pengungsi berdatangan ke Pulau Galang. Terakhir, dari sisi politik akan mengakibatkan perebutan pengaruh politik Indonesia oleh AS dan China yang mampu mempengaruhi kebijakan Indonesia. Dengan berbagai dimensi ancaman dari sengketa tersebut, dapat terlihat posisi strategisnya Laut China Selatan terhadap keamanan nasional Indonesia.
- b. Menyikapi hal tersebut, sebagai wujud antisipasi TNI AL sebagai bagian dari TNI sesuai tugas dan fungsinya melakukan beberapa cara untuk mengantisipasi persaingan AS-China di LCS, antara lain:
- 1) melaksanakan pengamanan wilayah perairan Indonesia agar tidak digunakan oleh salah satu pihak untuk kepentingan militernya;
 - 2) melaksanakan pengamanan wilayah perairan Indonesia agar eskalasi konflik yang terjadi tidak berimbas dan membahayakan kedaulatan Indonesia;

- 3) melaksanakan pengamanan jalur-jalur pelayaran agar setiap pengguna laut negara netral dapat menggunakan hak-hak pelayaran sesuai dengan UNCLOS; dan
 - 4) menjamin kepentingan Indonesia di laut tidak terganggu.
- c. Adapun langkah-langkah konkrit yang dapat diambil pemerintah Indonesia terutama TNI/TNI AL sesuai tatarannya dari level strategis maupun operasi dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa adalah sebagai berikut:
- 1) Aspek Strategis.
 - a) Dengan akses yang dimiliki oleh Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka Indonesia dapat mengambil upaya dan langkah-langkah strategis dengan mendesak PBB untuk segera dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghentikan konflik terbuka di Laut China Selatan mengingat kerugian dan dampak regional serta global yang ditimbulkan.
 - b) Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan seluruh saluran diplomatik dan kerja sama internasional yang ada, terutama kerja sama ASEAN/ASEAN-Plus di mana AS maupun China sebagai sesama mitra dialog ASEAN diharapkan dapat diajak duduk bersama dalam forum dialog dalam upaya mencegah dan meredakan eskalasi yang berpotensi kepada konflik terbuka antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan.
 - c) TNI AL melaksanakan peran diplomasinya melalui forum multilateral (IONS, WPNS) maupun bilateral (NTNT) dan forum-forum internasional lainnya untuk mengaspresiasi semangat kerja sama internasional melalui kegiatan latihan bersama maupun kegiatan lainnya dalam rangka meredakan dan menghentikan ketegangan antara China dan Amerika Serikat.
 - d) Bila semua upaya damai tersebut tidak dapat terealisasi, maka Pemerintah Indonesia harus dapat menjamin seluruh wilayah dan penduduk Indonesia terutama yang berada di sekitar area konflik tidak akan terdampak oleh konflik terbuka atau perang yang terjadi.
 - 2) Aspek Operasional dan Taktis.

- a) Menggelar dan meningkatkan frekuensi operasi kekuatan TNI/TNI AL di Kepulauan Natuna dan sekitarnya untuk mengantisipasi kemungkinan konflik antara kedua negara tersebut masuk (*Spill over*) ke wilayah yurisdiksi Indonesia, demikian juga dengan meningkatkan frekuensi patroli udara strategis untuk melaksanakan pengintaian udara di ZEEI/Laut China.
 - b) Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan unsur-unsur TNI AL dan TNI AU pada level siap perang dengan melengkapi kebutuhan armamen tempur kedua matra tersebut.
 - c) Melaksanakan Operasi Kamla untuk mencegah dan memulangkan para nelayan Indonesia yang sedang atau akan menangkap ikan di wilayah laut Natuna dan Laut China Selatan.
 - d) Melaksanakan Operasi penyekatan di Selat Malaka dan pintu-pintu ALKI untuk mencegah penggunaan perairan Indonesia oleh kedua negara yang sedang bertikai serta menyiagakan SAR.
 - e) Menyiagakan unsur-unsur pertahanan udara di pulau-pulau yang berpenghuni di sekitar wilayah konflik untuk mengantisipasi Rudal-rudal yang menyasar wilayah daratan Indonesia.
 - f) Mengajukan nota protes apabila terjadi pelanggaran penggunaan perairan maupun yurisdiksi Indonesia oleh kedua belah pihak yang berperang serta menjamin keamanan serta keselamatan kapal-kapal yang menggunakan ALKI.
 - g) Mengajukan klaim pengganti kerugian kepada negara-negara yang bertikai (AS dan China) apabila terjadi kerusakan dan kerugian terhadap wilayah, penduduk maupun sumber daya alam Indonesia sebagai akibat dari penggunaan senjata dalam peperangan.
- d. Konsep strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dapat ditawarkan oleh TNI AL untuk merespon potensi eskalasi konflik antara kekuatan besar di LCS dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Strategi Jangka Pendek

STRATEGI	SASARAN (ENDS)	SUMBER DAYA (MEANS)	CARA (WAYS)
<p>Optimalisasi gelar operasi sesuai dengan RO guna melaksanakan pengendalian laut di LNU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Kemampuan <i>reconnaissance</i> • Terwujudnya pengendalian Laut di LNU. • Menjaga kepentingan nasional di laut Natuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Alutsista TNI/KL • Sumdanas • Nelayan • Sistem Sensor Terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan gelar operasi laut sec mandiri & gab serta tingkatkan koordinasi/kodal terhadap seluruh aset yang dimiliki. • Menambah waktu gelar Operasi Siaga Purla yang semula 250 hari menjadi 365 hari • Manfaatkan radar kapal/pantai & info intel/sharing. • Mengoptimalkan pola operasi pesud TNI AU, TNI AL dan Bakamla • Pengiriman Amonisi dan Logistik dengan kapal pengangkut amonisi ke Natuna • Melaksanakan <i>Effective Presence</i> dengan menambah <i>endurance</i>

Strategi jangka menengah

STRATEGI	SASARAN (ENDS)	SUMBER DAYA (MEANS)	CARA (WAYS)
----------	----------------	---------------------	-------------

<p>Meningkatkan kemampuan pengendalian di Perairan Natuna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Puan <i>reconnaissance</i> • Terwujudnya Puan pukul. • Terwujudnya Pangkalan yang mampu mendukung kegiatan Operasi di Laut Natuna Utara (LNU). • Menjaga kepentingan nasional di laut Natuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Alutsista • Sumdanas • Fasilitas Pangkalan • Senjata 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemampuan dan menambah kekuatan Alutsista Koarmada I yang memiliki keunggulan comparatif / berimbang dengan negara2 Kawasan. • Membangun kesiapan operasional Koarmada I (kesiapan Alutsista, Personel, Logistik) • Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana pangkalan dengan membangun tangki timbun BBM, Reverse Osmosis (RO) dan <i>Water Purifier</i> • Pembangunan Radar di Natuna dengan kemampuan jarak jangkau lebih jauh / <i>over the Horizon</i> • Alih bina beberapa KAA & KS dari Armada II
<p>Meningkatkan kemampuan dalam penindakan pelanggaran di Perairan Natuna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kemampuan kamlu dan jarkaplid • Terwujudnya kemampuan dan fungsi pangkalan. • Terjaganya Sumdanas di per Natuna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangkalan, sarana prasarananya. • SOP Kumla 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencanakan kebutuhan Logistik di Natuna. • Melaks patroli sektor gun KRI & Pesud • Melaks kerja sama taktis dgn sur udara TNI AU • Melaks proses hukum di pangkalan terdekat • Melibatkan Back Up Kekuatan Udara dari Pangkalan Udara Supadio

Strategi jangka Panjang

STRATEGI	SASARAN (ENDS)	SUMBER DAYA (MEANS)	CARA (WAYS)
<p>Meningkatkan kemampuan pengendalian di Perairan Natuna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Puan reconnaissance • Terwujudnya Puan pukul. • Terwujudnya Pangkalan yang mampu mendukung kegiatan Operasi di Laut Natuna Utara (LNU). • Menjaga kepentingan nasional di laut Natuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Alutsista • Sumdanas • Fasilitas Pangkalan • Senjata 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifkan operasi laut sec mandiri & gab serta tingkatkan koordinasi/kodal terhadap seluruh aset yang dimiliki. • Manfaatkan radar kapal/pantai jarak jauh & info intel/sharing. • Mengoptimalkan pola operasi pesud & KS intai. • Membangun kemampuan dan menambah kekuatan Alutsista Koarmada I yang memiliki keunggulan comparative dengan negara2 Kawasan. • Membangun kesiapan operasional Koarmada I (kesiapan Alutsista, Personel, Logistik) • Membangun Pangkalan kapal Selam (Sionban)

<p>Meningkatkan kemampuan dalam penindakan pelanggaran di Perairan Natuna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kemampuan kamla dan jarkaplid • Terwujudnya kemampuan dan fungsi pangkalan. • Terjaganya Sumdanas di per Natuna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangkalan, sarana prasarananya. • SOP Kumla 	<ul style="list-style-type: none"> • Refocusing Anggaran utk lengkapi puan Pki TNI Terintegrasi • Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana pangkalan TNI AL • Rencanakan kebutuhan log di Natuna. Utk seluruh jenis Alutsista TNI AL • Melaks patroli sektor gun KRI & Pesud • Melaks kerjasama taktis dgn sur udara TNI AU • Melaks proses hukum di pangkalan terdekat
<p>Meningkatkan kemampuan diplomasi AL (Naval Diplomacy)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya daya tangkal. • Terjaganya keamanan di per laut Natuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Alutsista • SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Gelar Satops scr terbuka & gabungan dgn satuan TNI utk tunjukkan eksistensi kekuatan • Tingkatkan kuantitas & kualitas alutsista yg dimiliki & digelar dgn gunakan Sewaco berteknologi tinggi/modern.

Pertanyaan Penelitian 2. Bagaimana sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Kondisi Saat Ini)?

INDIKATOR : *Teori Strategi: Ends, Means, Ways*

1. Apa dan bagaimana target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
2. Bagaimana dan apa saja upaya/cara yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
3. Sumber daya apa saja yang diperlukan/perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga demi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
4. Bagaimana strategi K/L dalam menjaga sinergitas antar Lembaga dalam menghadapi ancaman persaingan Amerika-China di LCS?

INDIKATOR : *Teori sinergitas, Teori antisipasi, Teori Stabilitas*

5. Bagaimana strategi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
6. Apa yang sudah dilakukan oleh K/L sebagai upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
7. Apakah ada rencana kegiatan atau program bersama dari K/L yang bersangkutan untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
8. Sejauh mana sinergitas antara K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? Jika dihadapkan dengan fakta saat ini, bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi persaingan AS-China di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas keamanan nasional?
9. Apakah terdapat aturan atau regulasi yang mencakup sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
10. Saat ini, K/L mana yang menjadi leading sector dalam melaksanakan sinergitas untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas keamanan nasional? Apakah K/L tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mensinergikan K/L terkait?
11. Mengapa diperlukan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di

Laut China Selatan? Apa kaitannya dengan stabilitas keamanan nasional?

12. Bagaimana urgensi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? dan bagaimana hubungannya dengan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
13. Apa saja faktor yang mempengaruhi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
14. Apa saja kendala yang dialami oleh K/L dalam melaksanakan strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN:

1. **Jawaban pertanyaan nomor 1.** Target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan adalah terwujudnya keterpaduan seluruh komponen pertahanan nasional dengan menempatkan K/L sebagai *leading institution* sesuai tahapan eskalasinya dalam suatu kesatuan usaha maupun kesatuan komando sesuai dengan tugas pokok, kemampuan, dan peranannya masing-masing. Pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mengantisipasi dampak dari persaingan AS-China di LCS harus disesuaikan dengan ancaman di tiap level eskalasi sejak tahap masa damai hingga kemungkinan konflik terbuka atau perang sebagai puncak eskalasi.
2. **Jawaban pertanyaan nomor 3.** Dalam mencapai tujuan strategis diperlukan berbagai macam sumber daya seperti alutsista dan persenjataan, pangkalan dan sarpras, sumber daya nasional dan manusia, serta dasar dan aturan hukumnya, yang harus dikembangkan dan ditingkatkan secara bersama-sama. Penjagaan stabilitas keamanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh K/L sehingga diperlukan sinergitas dan *road map* yang disepakati bersama sebagai panduan dalam mengembangkan dan peningkatan sumber daya tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah pengembangan sumber daya yang dilaksanakan harus mampu memberikan efek *deterrence* kepada negara lain di AS dan China, serta mampu mengatasi ancaman sesuai level eskalasi.
3. **Jawaban pertanyaan nomor 2.** Upaya/cara yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan yaitu melalui percepatan penyusunan rencana aksi, termasuk *Rules of Engagement* di lapangan untuk membangun kekuatan yang berimbang antara wewenang dengan kapabilitas seluruh kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kedaulatan dan

menegakkan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada kebijakan nasional.

4. **Jawaban pertanyaan nomor 8, 9,10, 11, dan 12 (Kondisi saat ini)**

- a. K/L terkait belum memiliki perspektif yang selaras terhadap potensi dampak ancaman persaingan AS-China di LCS. Perkembangan LCS dan posisi Indonesia Hal ini disebabkan karena Pemerintah RI belum mempunyai pedoman sebagai acuan atau referensi bagi K/L terkait. Adanya pedoman tersebut diharapkan akan efektif menyatukan perspektif dan mengatur kolaborasi tugas tiap-tiap K/L sebagai instrumen kekuatan maritim melalui perumusan kebijakan yang telah diharmonisasi. Perspektif yang berbeda tersebut harus dijembatani dengan melihat perkembangan LCS dan posisi Indonesia di dalamnya.
- b. Kebijakan dari *policy maker* dan turunan strategi dari *strategy maker* belum terharmonisasi secara optimal. Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam sebagai *policy maker* belum selaras, masing-masing mempunyai pegangan kebijakan yang tidak memperkuat satu sama lain. Rekomendasi untuk merumuskan harmonisasi kebijakan Indonesia adalah bukan sekedar menggabungkan dua kebijakan, tetapi dengan mengevaluasi kembali kedua kebijakan dari *policy maker* yang berkaitan dengan permasalahan LCS dan mengukur kebijakan mana yang akan dilaksanakan dengan ukuran waktu. Kemudian dari kebijakan tingkat K/L di bawah dua kementerian koordinator yang telah diharmonisasi, dapat disusun strategi K/L yang mendukung terwujudnya strategi nasional sesuai dengan bidang dan lingkungan strategisnya.
- c. Pemerintah RI perlu merancang wewenang dan wilayah operasi agar sesuai dengan kapabilitas dari instrumen kekuatan maritim sehingga penegakan hukum dan kedaulatan dapat dilakukan secara maksimal. Sebagai contoh adalah Kemen KP dapat berpatroli dalam WPP hingga ke ZEE, namun ZEE yang tidak berhadapan langsung dengan negara lain dan melakukan koordinasi dengan TNI AL ketika beroperasi hingga ke ZEE, karena resiko untuk berhadapan dengan kapal *Coast Guard* bahkan kapal perang negara lain sangat besar.

5. **Jawaban pertanyaan nomor 13, 14.** Faktor yang mempengaruhi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan dan peluang serta kendalanya antara lain:

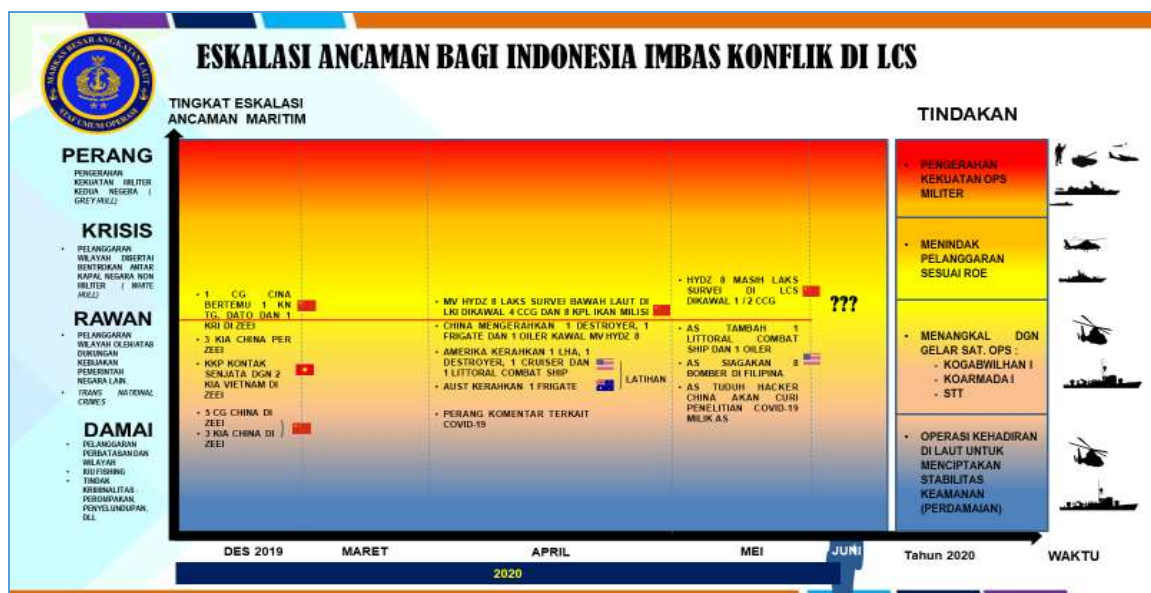
- a. Banglistra yang dinamis khususnya di kawasan, sehingga diperlukan kontinuitas dan konsistensi terhadap kebijakan dasar dalam menyikapi persaingan namun tetap fleksibel atau kekenyalan dalam merespon dinamika di lapangan. Di satu sisi ini merupakan peluang bagi sinergitas K/L untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam mengikuti dan merespon perkembangan persaingan AS-China di LCS.
- b. Hubungan kerja sama bilateral baik dengan AS maupun dengan China selaku dua pihak yang bersaing dalam isu LCS. Posisi K/L di Indonesia akan dipengaruhi pendekatan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Kerja sama bilateral tersebut terbagi pada beberapa bidang, seperti kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Seluruh kerja sama tersebut harus mengacu pada kebijakan politik luar negeri pemerintah, sehingga hal ini akan menjadi peluang yang baik bagi K/L, namun perlu diperhatikan apabila komunikasi dan koordinasi antar K/L tidak terjalin dengan baik hal ini akan menjadi kendala bagi upaya mewujudkan sinergitas.
- c. Pengaruh ASEAN sebagai organisasi di kawasan terhadap sikap dan posisi Indonesia. Beberapa negara ASEAN yang menjadi *claimant states* dalam sengketa di LCS tidak berada dalam posisi dan sikap yang sama, sebagian ada yang cenderung berpihak pada AS dan sebagian lainnya pada China. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN yang bukan *claimant state* harus pro-aktif untuk mendorong upaya damai dalam mencari solusi terbaik di LCS melalui peran K/L terkait sesuai dengan tiga pilar ASEAN.
- d. Visi Poros Maritim Dunia merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia yang merupakan peluang bagi K/L untuk meningkatkan sinergitas dalam rangka mewujudkan kebijakan nasional terkait kepentingan maritim Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai diplomasi dan pertahanan maritim.
- e. Birokrasi. Mekanisme kerja sama dan hubungan antar K/L seringkali terbentur pada birokrasi yang tidak sederhana termasuk dalam upaya untuk menghadapi persaingan di LCS. Belum adanya suatu badan yang menangani isu keamanan nasional seperti *National Security Council* menyebabkan perumusan kebijakan maupun respon terhadap isu-isu keamanan nasional seperti persaingan di LCS yang melibatkan K/L terkait akan memerlukan waktu dan upaya untuk mengoordinasikannya.

6. **Jawaban pertanyaan nomor 4, 5, 6, 7 (Strategi).**

- a. Ketegangan China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan diawali dengan klaim “*Four Sha*” China (sebelumnya *Nine Dash Line*) terhadap pulau dan atol di Kepulauan Spratly dan Paracel yang dianggap tidak sesuai oleh Amerika Serikat yang mengusung *freedom of navigation*. Ketegangan ini semakin meruncing dengan terjadinya perang dagang yang saat ini terus berlangsung antara kedua negara. Memperhatikan kepada ketegangan yang terus terjadi di Laut China Selatan maka konflik terbuka antara kedua negara *super power* tersebut dapat saja terjadi kapan saja. Oleh sebab itu maka Indonesia sebagai salah satu negara yang berada dekat dengan area konflik, dituntut untuk dapat mengamankan wilayah perairan yurisdiksi dan kedaulatannya agar eksekusi (*spill over*) dari konflik yang terjadi tidak akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Berdasarkan kepada politik luar negeri Indonesia saat ini yang bebas aktif, maka sikap Indonesia adalah tidak memihak kepada salah satu negara dalam menyikapi konflik antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan. Disadari bahwa kedua negara tersebut bukan merupakan lawan bagi Indonesia apabila saling berhadapan di laut (tempur laut), demikian juga apabila Indonesia mengambil tindakan kepada salah satu pihak, maka Indonesia akan dianggap memihak salah satu negara yang bertikai dan kondisi ini akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi Indonesia.
- c. Akan tetapi untuk mengantisipasi eksekusi konflik yang terjadi, maka TNI AL sebagai alat pertahanan negara di laut harus siap sedia menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi untuk melindungi seluruh wilayah daratan Indonesia yang berdekatan dengan area konflik dan keselamatan penduduk Indonesia. Operasi yang dilaksanakan oleh TNI AL merupakan bagian dan saling terintegrasi serta sejalan dengan K/L lainnya. *Stakeholder* maritim lain yang ada di Indonesia harus dapat diikutsertakan oleh TNI/TNI AL dalam menghadapi konflik yang terjadi baik untuk patrol bersama, penindakan pelanggaran hukum maupun memperkuat operasi tempur laut.
- d. Dalam menyikapi konflik yang terjadi di LCS, TNI AL membagi eskalasi menjadi beberapa tahap, yaitu Damai, Rawan, Krisis, Perang. Berdasarkan perkembangan situasi saat ini, kondisi di LCS memasuki tahap rawan yang terlihat semakin seringnya terjadi pelanggaran wilayah yang dilaksanakan oleh unsur negara lain, seperti kapal-kapal China Coast Guard (CCG), kapal US Navy, yang direstui oleh otoritas pemerintah setempat. Oleh sebab itu diperlukan sinergitas antar K/L baik unsur di lapangan, maupun yang dilaksanakan oleh staf pusat serta pendekatan pada semua bidang, seperti

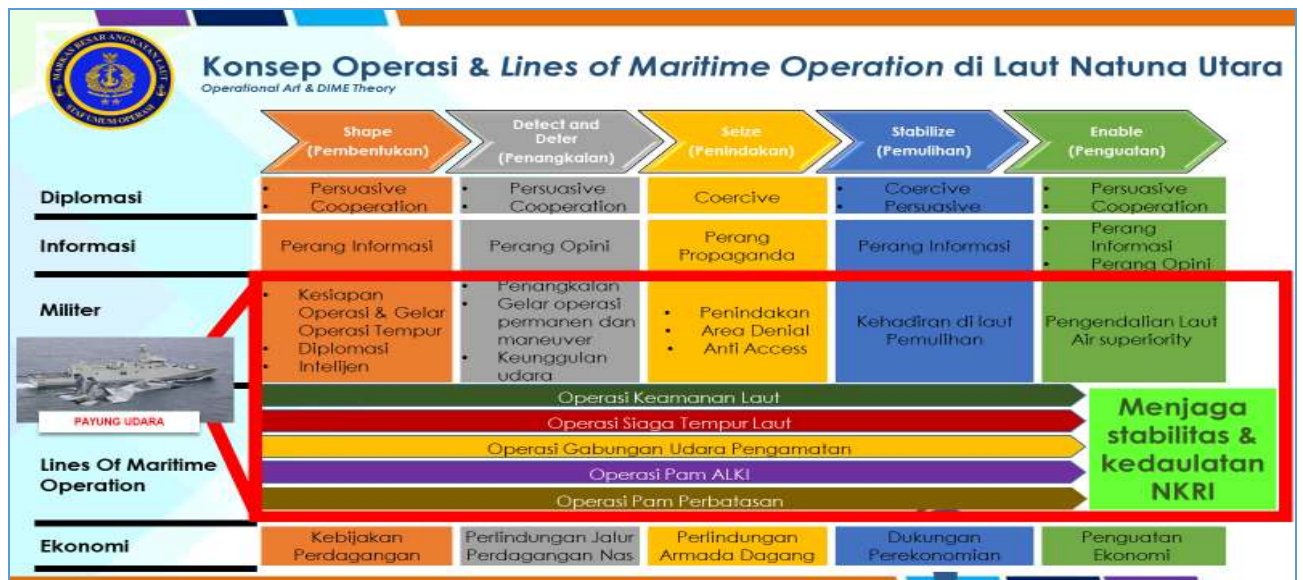
bidang Diplomasi, Informasi, Militer, dan Ekonomi (DIME) sebagai respon secara komprehensif terhadap potensi ancaman tersebut antara lain:

- 1) Bidang Diplomasi. Melalui Kemenlu sebagai *leading institution* membuat Nota Protes kepada China maupun Vietnam, memaksimalkan upaya diplomasi secara multilateral melalui forum ASEAN, dan meneruskan upaya diplomasi penyelesaian delimitasi secara damai melalui forum-forum bilateral.
- 2) Bidang Informasi. Melalui upaya komunikasi strategis dalam rangka mencapai tujuan kepentingan strategis Indonesia di wilayah yang rawan pelanggaran kedaulatan, khususnya di LNU dan LCS.
- 3) Bidang Militer. Melalui peningkatan patroli keamanan laut di LNU dan LCS yang merupakan *focal area* dan rentan terhadap ancaman dari arah utara, mengedepankan unsur penegak hukum maritim dengan dukungan TNI AL, yang akan aktif menyesuaikan dengan eskalasi situasi di daerah operasi.
- 4) Bidang Ekonomi. Melalui peningkatan aktivitas nelayan kapal ikan Indonesia baik dari wilayah lokal sekitar Natuna maupun wilayah lain dan investasi sarpras serta fasilitas perikanan lokal.



TAHAP ESKALASI	KETERANGAN	TINDAKAN TNI / TNI AL
DAMAI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran Perbatasan Dan Wilayah • IUU <i>Fishing</i> • Tindak Kriminalitas : Perompakan, Penyelundupan, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laksanakan patroli rutin ✓ Gelar operasi rutin Mabes TNI dan TNI AL ✓ Laksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan
RAWAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran Wilayah Oleh/Atas Dukungan Kebijakan Pemerintah Negara Lain. • <i>Trans National Crimes</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkatkan patroli rutin laut dan udara di Laut Natuna Utara ✓ Perkuatan unsur TNI AL di Natuna ✓ Melaksanakan penyiapan unsur, sensor, senjata, dan logistik ✓ Sinergitas operasi dengan Bakamla dan KKP ✓ Penyusunan ROE ✓ Laksanakan diplomasi dengan Amerika dan China
KRISIS	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran Wilayah Disertai Bentrokan Antar Kapal Negara Non Militer (<i>White Hull</i>) maupun melibatkan Kapal Militer 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkatkan intensitas patroli laut dan udara di Laut Natuna Utara ✓ Pembentukan Kogasgabpad oleh Mabes TNI ✓ Perkuatan kekuatan darat, laut, dan udara di Natuna ✓ Pelarangan nelayan Indonesia beraktifitas di Laut Natuna Utara ✓ Himbauan kepada armada niaga Indonesia tidak berlayar ke LCS ✓ Laksanakan diplomasi dengan Amerika dan China
PERANG	Pengerahan Kekuatan Militer Kedua Negara (<i>Grey Hull</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kogasgabpad siaga perang di Laut Natuna Utara ✓ Patroli laut dan udara sesuai axis ancaman ✓ Kehadiran unsur setiap saat di laut

		<p>sesuai axis ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Antisipasi setiap bentuk <i>spill over</i> dari perang di LCS ✓ Mengalihkan pelayaran niaga dari ALKI I dan Selat Malaka yang ke arah LCS ✓ Pelarangan armada niaga Indonesia berlayar di LCS ✓ Laksanakan diplomasi dengan Amerika dan China
--	--	---





Pertanyaan Penelitian 3. Bagaimana Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

INDIKATOR : *Teori Strategi: Ends, Means, Ways*

11. Apa dan bagaimana goals/target yang ingin dicapai pemerintah RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
12. Apa saja ancaman yang dihadapi RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
13. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan atau perlu dikembangkan dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

INDIKATOR : *Teori sinergitas, Teori antisipasi, Teori Stabilitas, Teori keamanan nasional*

14. Bagaimana strategi sinergitas yang dilakukan oleh K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
15. Bagaimana potensi atau kesempatan strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
16. Bagaimana prediksi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dan sejauh mana kesiapan K/L dalam mengantisipasi hal tersebut?
17. Bagaimana upaya K/L untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
18. Apa saja target capaian dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
19. Apa saja langkah strategis yang dilakukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
20. Dalam pelaksanaan sinergitas, K/L mana yang seharusnya mempunyai mandat untuk mengoordinasikan strategi tersebut dan bagaimana implementasinya?

JAWABAN:

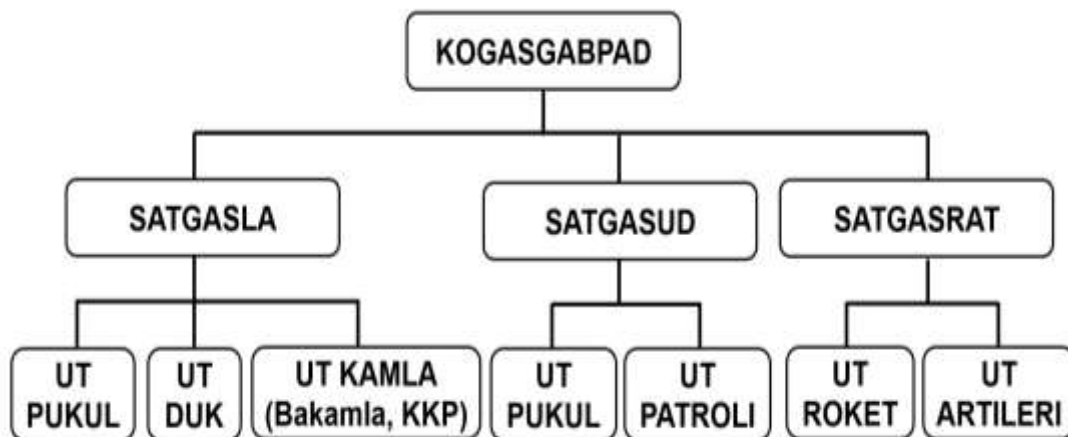
- a. Target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan adalah terwujudnya keterpaduan seluruh komponen pertahanan nasional dengan menempatkan K/L sebagai *leading institution* sesuai tahapan eskalasinya dalam suatu kesatuan usaha maupun kesatuan komando sesuai dengan tugas pokok, kemampuan dan peranannya masing-masing. Pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mengantisipasi dampak dari persaingan AS-China di LCS harus disesuaikan dengan ancaman di tiap level eskalasi sejak tahap masa damai hingga kemungkinan konflik terbuka atau perang sebagai puncak eskalasi.
- b. Ancaman yang perlu diwaspadai oleh Indonesia sebagai antisipasi terhadap persaingan Amerika-China di Laut China Selatan dapat berupa ancaman aktual berupa ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Bentuk ancaman tersebut seperti pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, kegiatan intelijen/spionase, separatism dan pemberontakan, perompakan dan pembajakan bersenjata, ancaman siber, senjata biologis dan bahkan ancaman potensial yang belum terjadi saat ini

namun dapat saja terjadi sewaktu-waktu dalam situasi tertentu menjadi ancaman nyata berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing) termasuk akses atau dampak dari perang konvensional antara pihak/negara lain di kawasan terutama di wilayah yang berdekatan/berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Indonesia.

- c. Sumber daya yang dibutuhkan atau perlu dikembangkan dalam upayaantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional antara lain alutsista, sumdanas, fasilitas pangkalan termasuk sarana prasarananya, sistem senjata, SOP Kumla.
- d. Dalam menyikapi konflik yang terjadi di LCS, TNI AL membagi eskalasi menjadi beberapa tahap, yaitu Damai, Rawan, Krisis, Perang. Berdasarkan perkembangan situasi saat ini, kondisi di LCS memasuki tahap rawan yang terlihat semakin seringnya terjadi pelanggaran wilayah yang dilaksanakan oleh unsur negara lain, seperti kapal-kapal China Coast Guard (CCG), kapal US Navy, yang direstui oleh otoritas pemerintah setempat. Oleh sebab itu diperlukan sinergitas antar K/L baik unsur di lapangan, maupun yang dilaksanakan oleh staf pusat serta pendekatan pada semua bidang, seperti bidang Diplomasi, Informasi, Militer, dan Ekonomi (DIME) sebagai respon secara komprehensif terhadap potensi ancaman tersebut antara lain:
 - 1) Bidang Diplomasi. melalui Kemenlu sebagai *leading institution* membuat Nota Protes kepada China maupun Vietnam, memaksimalkan upaya diplomasi secara multilateral melalui forum ASEAN, dan meneruskan upaya diplomasi penyelesaian delimitasi secara damai melalui forum-forum bilateral.
 - 2) Bidang Informasi. Melalui upaya komunikasi strategis dalam rangka mencapai tujuan kepentingan strategis Indonesia di wilayah yang rawan pelanggaran kedaulatan, khususnya di LNU dan LCS.
 - 3) Bidang Militer. Melalui peningkatan patroli keamanan laut di LNU dan LCS yang merupakan *focal area* dan rentan terhadap ancaman dari arah Utara, mengedepankan unsur penegak hukum maritim dengan dukungan TNI AL, yang akan aktif menyesuaikan dengan eskalasi situasi di daerah operasi.
 - 4) Bidang Ekonomi. Melalui peningkatan aktivitas nelayan kapal ikan Indonesia baik dari wilayah lokal sekitar Natuna maupun wilayah lain dan investasi Sarpras serta fasilitas perikanan lokal.
- e. TNI AL memiliki kewajiban untuk memberikan saran kepada Mabes TNI untuk menghadapi setiap bentuk *spill over* konflik di LCS. Langkah terbaik yang dapat dilaksanakan oleh Mabes TNI adalah membentuk Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad). Kogasgabpad dibutuhkan agar dapat mengoordinasikan

seluruh kekuatan baik sipil maupun militer agar dapat bersinergi dan bekerja sama dalam mengantisipasi *spill over* konflik di LCS. Selain itu Kogasgabpad akan dapat memberikan kemampuan kepada TNI untuk melaksanakan penindakan dengan kekuatan yang proporsional.

- f. Organisasi tugas Kogasgabpad adalah sebagai berikut:



- g. Tugas pokok Kogasgabpad pada situasi krisis dan perang adalah melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara untuk mengantisipasi meluasnya konflik antara China dan Amerika Serikat dan sekutunya ke wilayah Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- h. Susunan satuan tugas Kogasgabpad terdiri dari:
1. Satgas Udara, dengan kekuatan utama adalah TNI AU dengan tugas utama untuk melaksanakan *surveillance* kondisi maritim dalam rangka mendukung *Maritime Picture Compilation* (MPC) untuk mendukung pengambilan keputusan operasi dan menjamin keamanan patrol udara.
 2. Satgas Laut, dengan kekuatan utama adalah TNI AL dengan tugas utama adalah melaksanakan patrol rutin, *surveillance*, pengusiran terhadap kapal ikan, kapal negara maupun kapal perang kedua negara dan melindungi nelayan Indonesia serta pengguna laut lainnya di perairan Indonesia khususnya Laut Natuna Utara serta menyajikan MPC secara akurat. Disamping itu, Satgasla melalui UT Kamla yang terdiri dari Bakamla dan Kemen KP, secara khusus melaksanakan penegakkan hukum dalam menghadapi kekuatan maritim sipil (*white hull*) Amerika Serikat dan China yang masuk ke wilayah yurisdiksi nasional Indonesia.

3. Satgas Darat, dengan kekuatan utama terdiri dari pasukan darat yang berasal dari TNI AD, TNI AL (Marinir) dan TNI AU (Paskhas) dengan tugas utama untuk melaksanakan pertahanan udara di pesisir pantai.
 - i. Konsep operasi Kogasgabpad yang dilaksanakan adalah melaksanakan patroli dengan penempatan Satgas Kamla sebagai kekuatan terdepan dengan *back up* oleh unsur-unsur TNI AL dan *support/dukungan* patroli udara maritim. Penempatan unsur dapat berubah menjadi kekuatan TNI AL berada di depan apabila kekuatan yang dihadapi adalah kekuatan kapal perang baik dari Amerika Serikat maupun China. Satgas udara melaksanakan patroli udara secara terus menerus untuk mengamankan payung udara sedangkan satgas darat melaksanakan perkuatan kekuatan anti udara di darat untuk mengantisipasi ancaman udara yang mungkin akan masuk sampai daratan.
 - j. Sebagai panduan bagi unsur di lapangan, maka Pemerintah dan Mabes TNI beserta Bakamla, Kemen KP, beserta satuan operasional lainnya perlu memiliki RUF dan ROE yang sama sehingga dapat digunakan oleh seluruh instansi tersebut dalam menghadapi setiap situasi sebagai imbas dari eskalasi konflik di LCS.

LAMPIRAN 2.6 HASIL WAWANCARA KKP

DIREKTUR PSDKP-KKP - BAPAK DRAMA PANCA PUTRA

Terimakasih, saya akan melihat dari sudut pandang dari KKP yang dibawah bidang sektor ekonomi, dan bagaimana dipandang dari sudut ekonomi.

YTH. para nara sumber, khusus promovendus semoga cepat selesai dan tidak terhambat pandemi covid.

Saya kira pemantik dari diskusi ada dua hal yang coba saya jelaskan, kebetulan disiapkan sangat banyak papernya. ini terkait dengan fokus kami tetap kelautan kita, kita tetap fokus pada kegiatan-kegiatan kelautan seperti illegal fishing, yang dilakukan oleh KIA Kapal Ikan Asing maupun kita sekarang fokus juga pada KII (Kapal Ikan Indonesia). Sumber daya kita masih kurang banget dibawah standart, atau minim. Kita masih ada 1200, kita didukung dengan sekitar 34 kapal lalu 49 kapal boot.

Kita juga perlu saya kiranya dukungan dari teman teman provinsi dan daerah. Ini adalah letak sebaran dari unit pelaksanaan teknis kita ada 6. Kebetulan yang membawai untuk WPP 711 wilayah pengelolaan perikanan jadi kalau LCS/ Laut China Selatan atau Laut Natuna utara dikategorikan di wilayah pengelolaan perikanan 711 ada kodifikasi yang sudah dikeluarkan oleh KKP.

Saya kira ini potensi yang ada perikanan di wilayah 711 wilayah Natuna utara di mana jumlah ikan yang diperbolehkan untuk dieksploitasi itu ada sekitar 613 ribu ton dan ini sudah hampir semua kita di Eksploitasi Estimasi Eksploitasi jadi kita meng estimasi eksploitasi berdasarkan gros ton atas ijin yang kita keluarkan pendekatannya seperti ini.

Lalu kita masih punya peluang sekitar 80.000 Ton lagi yang bisa di Eksploitasi berdasarkan data yang kita miliki dan ini bisa dimanfaatkan masing masing sekitar 50% untuk di wilayah pusat. maksudnya pusat ini ijin di atas 12 mil dan ijin daerah dibawa 12 mil.

ini adalah jumlah kapal sebaran kapal kecil yang berada di bawah 30 grosston cukup banyak karena memang topologi daripada kapal perikanan adalah 95% merupakan kapal perikanan skala kecil yaitu dibawa 30 grosston dan yang di atas 30 grosston itu sangat minim hanya sekitar 2 - 3%.

ini di wilayah Natuna utara ini kita punya 40 sekitar ada pelabuhan ada empat pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah KKP ada 41 pelabuhan jadi kalau WPP nya wilayah Kalimantan dan Sumatera juga ada di Batam dan sebagainya.

ini kalo saya lihat data yang kita peroleh dari sebaran pergerakan kapal yang menuju yang memanfaatkan di wilayah Natuna utara memang di daerah daerah yang tadi dikatakan pak Bebeb itu masih sangat sepi itu kita coba mendorong tetapi

berdasarkan diskusi dengan pelaku usaha memang terlalu jauh kalau mereka harus masuk sampai dengan daerah yang sedang diperjuangkan oleh Pak Bebeb, makanya kalau kita lihat pergerakannya masih di wilayah kepulauan Natuna.

ini ancaman ancaman yang bisa kita lihat umumnya memang pergerakan kemaren kita paling banyak sekali mendapatkan tangkapan di wilayah Natuna utara khususnya untuk kapal-kapal Vietnam dan kapal Malaysia yang kita dapat saya juga kadang kadang bertanya tanya dengan pasukan 115 di lapangan kenapa mereka tidak menangkap kapal China di lapangan tapi pengakuan anak anak di lapangan memang tidak sampai melihat itu mungkin di daerah daerah di pinggiran. Jadi yang banyak adalah yang masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif adalah kapal-kapal Vietnam dan kapal kapal Malaysia mungkin teman teman angkatan Laut atau Bakamla akan lebih memahami ini strategi pemberantasan ilegal fishing kita dengan keterbatasan tadi.

Pada prinsipnya kami di Kementerian Kelautan kita memang konsen fokus kita pertama pada compliance, tingkat kepatuhannya lalu bagaimana pemanfaatannya harus bertanggung jawab? Kita memperhatikan bagaimana resource kita bisa sustain itu yang menjadi konsen kita di kementerian kelautan perikanan.

saya kira ini adalah strategi dengan segala ancaman dan peluang ini akan coba terutama kita juga melakukan penguatan terhadap sistem terutama pemantauan kita, baik melalui satelit VMS akan terus kita kembangkan kita juga memberdayakan operasi operasi air surveillance dan juga memberdayakan masyarakat. Karena hampir semua tangkapan-tangkapan kita juga informasinya kita dapat dari masyarakat dari kelompok kelompok pengawas yang kita bangun.

kita juga meningkatkan armada kapal kita jumlahnya sudah cukup banyak kita fokuskan ke 711 semenjak tahun 2020 sejak itu menjadi trending topik sehingga kita banyak bergeser ke sana. kita juga melakukan penguatan kerjasama antar Kementerian Lembaga, kita juga coba kemarin beberapa kerjasama nanti akan kita jelaskan secara rinci termasuk dengan kerjasama internasional dan penguatan terhadap sistem pemantauan kita

Saya kira kurang lebih saat ini sistem pemantauan kita, jadi kita menggunakan VMS juga kita juga mengadakan AIS yang dicoba di Pusat Pengendalian kita, jadi integratif sistem pengawasan semua kapal-kapal perizinan kita juga pasang VMS, sehingga pergerakan kapal bisa diketahui, namun juga kita di Pusdalops akan terus kita kembangkan kita tahun ini melalui undang undang cipta kerja mulai mencoba mengintegrasikan sistem dengan BKPM serta seluruh Kementerian sesuai amanat Undang Undang kita coba mengembangkan saat ini yaitu komunikasi intelejen karena selama ini hanya bisa kita pantau melalui VMS dan AIS.

Pertanyaan kita bagaimana apabila kita VMS dan AIS dimatikan bagaimana?? ini yang sedang dikembangkan teman teman di pusat pengendalian kita akan coba menggunakan istilahnya adalah Communication Intelligence lalu kita juga mencoba mengintegrasikan, mengontrol dan mengendalikan kegiatan penangkapan kita serta mendorong adanya pemanfaatan sumberdaya perikanan di pulau terluar dan lebih terluar lagi nah di laut Natuna dan mungkin kita juga bisa membangun sistem kelautan perikanan terpadu di sana kita juga bisa mengontrol nya dengan menggunakan satelit dan juga Remote sensing Penginderaan jarak jauh.

kita juga saat ini menggalakkan bagaimana kita pelanggaran terkait daerah penangkapan ikan dari sekian banyak kapal perikanan kita coba kita menggunakan satelit kita akan menerapkan sejenis itu E-Tilang dalam rangka untuk mendorong ketertiban dan kepatuhan para pelaku usaha. Saya kira ini adalah integrasi sistem yang sudah dibangun oleh undang undang cipta kerja. Kalau mengenai sinergitas saya kira dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya Era undang undang cipta kerja ini saya kira dengan adanya integrasi sistem dari DOSS dari seluruh kementerian akan memudahkan seluruh kementerian dan pengawasan juga dilakukan secara bersama sama, ini adalah mandat amanat dari undang undang cipta kerja walaupun limitasi kunjungan terhadap pelaku usaha itu dibatasi tapi integrasi antar kementerian ini kita dapat melakukan visitasi kegiatan pengawasan secara bersama sama yang dikoordinir oleh BKPM.

Jadi semua dilaporkan secara jelas, ini adalah unit pelaksanaan teknis atau pangkalan yang ada di Batam jadi selain teknologi tadi kita juga ada unit pelaksana teknis yang kita tempatkan khusus di beberapa tempat khusus yang melalui melakukan pengawasan di Laut Natuna Utara. selain di Batam kita juga ada di Pontianak dan ada dua wilayah atau dua stasiun yang setingkat eselon tiga dan eselon empat untuk pengawasan daerah 711, selain itu juga kita mencoba untuk mendorong terbentuknya satuan pengawasan yang setingkat struktural di Natuna harapan kita lebih memulai untuk memperkuat kelembagaan dan pengawasan di Natuna. Ini adalah kapal jenis kapal yang kita gerakan yang sudah mulai kita arahkan dalam satu tahun setengah ini untuk lebih fokus di Laut Natuna utara jadi memang wilayah WPP 711 ini memang menjadi perhatian kami di kementerian perikanan dengan segala dinamika politik yang disampaikan oleh Nara sumber

ini adalah sarana dan prasarana yang kita dukung disana, saya kira ini adalah kelompok masyarakat seperti tadi saya sampaikan keterlibatan masyarakat itu sudah dimandatkan didalam UU perikanan pasal 67 sehingga memang pembinaan mereka itu semakin terarah dan sinergitas kita pengawasan di laut serta teman teman dari TNI AL, dari kepolisian lalu dari Bakamla dan dari Beacukai kita melakukan operasi terpadu

bersama sama kita. Selain itu juga di dalam undang undang perikanan pasal 73 sebenarnya sudah ada sinergitas itu sendiri bisa dilihat dengan mandat terbentuknya forum komunikasi tindak pidana Perikanan yang saat ini sudah 33 dan lalu berapa bulan yang lalu kita bentuk di Papua barat yang ke 34.

Jadi forum koordinasi tindak pidana perikanan itu sebetulnya sudah terjadi sinergitas yang dimandatkan oleh undang undang untuk dilaksanakan dan ini sudah berjalan dari berbagai unsur yang terlibat yang kita melakukan diskusi atau pertemuan secara rutin pertemuan secara rutin. Selain itu juga sinergitas yang lain ada yang dimandatkan yang berdasarkan peraturan presiden nomor 111, 115 tahun 2015 yaitu yang dikenal dengan Satgas 115 yang ini tetap berjalan yang terdiri dari selain KKP ada teman teman dari kepolisian, TNI AL, Bakamla, Kejaksaan dan Kemlu yang tergabung di dalam Satgas 115.

Selain itu sinergitas kita laporkan baik itu secara bilateral, regional ataupun multilateral kita juga ditingkat multilateral kita ada DRPOA yang melakukan kegiatan kegiatan secara rutin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan diskusi kita pada siang hari mudah-mudahan dapat bermanfaat terima kasih

LAMPIRAN 2.7 TRANSKRIP PAPARAN BAPPENAS

TRANSKRIP PAPARAN

DR. IR. SELAMAT SUDARSONO

DEPUTI BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN BAPPENAS

RTD ke-1, 9 Juli 2021

Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih telah diundang pada RT day pada sore hari ini kami akan menyampaikan sedikit kondisi konflik serta kerangka teori sudah banyak dibahas sebetulnya ada sejarah yang cukup panjang setidaknya tidaknya tahun tujuh empat ada Clash antara China dan Vietnam pada kepulauan Paracel dan seperti dan seterusnya berkembang sampai pada saat ini dan Pandemi ternyata tidak mengurangi konflik tersebut dan konduksi konfliknya area China ya warna Ping dan kemudian ada Malaysia Vietnam kru naik Filipin yang spot spot itu gas area area nya Indonesia yang putih yang dibawa telah disebutkan bahwa Indonesia secara tegas menyampaikan posisinya kita tidak pernah mengakui Nanda selain tersebut kebijakan dua rivalitas di laut China Selatan sudah pasti menjadi pengetahuan bersama bahwa Amerika menolak klaim unit Lateral China dan sebaliknya China menolak tuduhan Amerika.

Berikutnya politik birokrasi, cara menyebutkan kementerian lembaga jadi ada yang namanya politik birokrasi yang menjadi referensi istilah akademik yang merefleksikan persaingan agenda antar Instansi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan negara ini mestinya berkaitan dengan luar negeri koordinator nya adalah kementerian Luar Negeri dan pada saat yang sama diplomasi pertahanan dan penggunaan instrumen pertahanan sebagai alat diplomasi untuk kepentingan nasional Dan dalam lingkup internasional di sinilah barangkali relevansi kekuatan alat utama sistem persenjataan jadi negara negara berdasarkan ketangguhan alat Sista nya, meskipun negaranya agak sekecil seperti singapur tetapi memiliki kewibawaan dalam diplomasi berikutnya ada sejumlah regulasi undang undang berkaitan dengan diplomasi luar negeri ada PP mengenai proses pelanggaran ada juga Perpres mengenai perencanaan pembangunan jangka panjang 2024 ada ASEAN ada konvensi hukum sebagai referensi berikutnya bidang politik luar negeri sarannya adalah Indonesia menjadi negara yang mandiri dan menjadi salah satu negara yg peduli pasifik, oleh karena itu sejumlah instrumen kita perlu bangun sehingga visi ini bisa terwujud sasaran pembangunan pertahanan dan keamanan 2045, ketertiban masyarakat yang inklusif dan tidak eksklusif serta pertahanan yang berdaya gentar tinggi, *deterrence* efek mesti tinggi keamanan Insani *insya Allah* kita menjadi kekuatan kelima ekonomi dunia dan itu

sudah konsekuensinya di sejumlah sektor tidak hanya ekonomi kelima tetapi yang juga yang lain juga mesti mengikuti ini RPJM mengikuti visi terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat mandiri berkepribadian berlandaskan Gotongroyong dan dijabarkan dalam bentuk misi.

Cara mencapai tujuan tersebut dan arah berapa presiden ada lima yang utama cream of the krimnya yaitu SDM, infrastruktur, regulasi, birokrasi dan Supremasi ekonomi yang menjadi 40 M proyek salah satunya di Natuna ini agenda yang tujuh tadi untuk memperkuat stabilitas Polhut Hankam dan transformasi pelayanan publik dan politik hukum pertahanan gak keamanan ini ada lima prioritasnya diantaranya adalah optimalisasi kebijakan luar negeri dan ini merupakan sesuai dengan tema berikutnya adalah ASEAN *outlook on Indo Pasifik* strategi Indonesia mengelola realitas di kawasan Pasifik prinsipnya tentu saja terbuka inklusif menghormati hukum internasional dan Sentralitas ASEAN itu prinsipnya bagaimana pdktnya adalah building blok like mekanisme dan tujuannya adalah menjadikan kawasan Indo Pasifik damai aman dan sejahtera.

Area kerjasama nya adalah maritim ekonomi konektivitas dan SDG's *Sustainable development government* saat ini adalah strategi di laut China Selatan Indonesia mendukung proses diplomasi dengan penerapan melalui ASEAN ini ada tahapan-tahapannya nanti bisa diperdalam tetapi kita harus melihat secara Realistik bagaimana kendala konsep khusus yang dihadapi itu yang pertama: terkait dengan cakupan area geografis nya ini kalau sudah detail Kalo global banyak yang sakit setuju tetapi kalau ditel akan banyak tantangan kemudian bagaimana Menejemen konflik nya mekanisme pendekatan dengan China serta status legal pada C oce yang statusnya mengikat dan tidak mengikat bagaimana potensinya perkembangan penggunaan mekanisme ASEAN pada saat terjadi deadlock

Major proyeknya kami sampaikan ada mencet proyek di Natuna tidak banyak jumlahnya hanya 41 sementara proyek ada ribuan.

Khusus Polhukhankam itu ada dua yaitu Cybersecurity dan keamanan laut jadi kementerian lembaga yang terkait langsung dengan ini adalah kementerian pertahanan (TNI AL) dan bakamla dan lembaga lembaga ini yang mempunyai relevansi kuat terkait terhadap judul yang diangkat oleh pronya tenda Penguatan koordinasi ada teks praktis yang perlu kita pelajari yang dari China jadi contohnya yang aman itu dari the central Leading small group atau bidang kebijakan luar negeri di mana pimpinannya adalah presiden anggotanya adalah kemlu dan tentu saja kak KL yang terkait Gan ini mungkin yang dimaksud kajian yang disiapkan oleh rumah Senda jadi pada saat terjadi konflik deadlock keputusan naik Dan ada kupu politik dari partai komunis China kemudian dijabatani oleh Leading small group sampai ke keputusan tertinggi ini diketuai oleh

presiden beranggotakan oleh birokrat Senior Instansi terkait dan anggota partai komunis Tiongkok ini best praktis dilihat dari segi efektivitas Dan lembaga itu bisa interaksi untuk mengkonter isu tersebut rekomendasi kebijakannya tadi sudah disebutkan berkaitan dengan paman Tapan koordinasi penguatan kementerian Bappenas sebagai clearing house sehingga implementasi kebijakan pemerintah dapat berjalan secara Sinergis dan komprehensif.

Kami melihat misalnya terkait dengan cyber security mungkin ada usulan usulan dari kementerian lembaga berkaitan dengan data center misalnya dan koordinasi dengan Kemenkominfo juga kita kolaborasikan dengan pemerintahan berbasis elektronik dari kementerian RT kita melakukan seperti itu bapak presiden beberapa kali mencontohkan tidak ada saluran saluran koordinasi untuk itu diadakan ya clearing house seperti ini dan sama dalam diplomasi luar negeri seperti itu kadang kadang pada masa lalu masing masing kementerian lembaga juga melakukan upaya upaya kebijakan luar negeri nya sendiri sendiri dan belum optimal koordinasinya yang kedua, bebas aktif tadi juga sudah disebutkan pemerintah perlu mengedepankan penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang damai dan memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga adalah Sentralitas ASEAN Indonesia mengedepankan mengajak negara negara lain untuk menerapkan prinsip ASEAN yakni treaty of amity dan corporation dalam menghadapi dinamika sengketa Laut China Selatan ini masukan kami kepada promovenda bahwa mungkin dalam penulisan perlu lebih lengkap Terkait dengan seperti apakah yang saat ini muncul dalam menghadapi itu jadi rumusan masalahnya bukan pada konflik Laut China Selatan yaitu tetapi isu koordinasi K/L nya karena yang diangkat adalah koordinasi K/L nya.

Ada ada teori berkaitan dengan selain teori ada regulasi nya didukung dengan best practice sehingga teori nya dapat didukung best practice yang kuat. Rumusan kebijakan/kerangka kebijakan tadi sudah disebutkan oleh pembicara terdahulu itu menjadi faktor penentu kerangka penganggaran kerangka regulasi juga kerangka kelembagaan artinya kerangka Bagian itu bukan hanya berarti organisasi tetapi juga tata kelola kerja apabagian itu bukan hanya berarti organisasi tetapi bisnis proses nya seperti apa.

LAMPIRAN 2.8 TRANSKRIP PAPARAN BAKAMLA

PAPARAN DEPUTI KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAKAMLA

LAKSDA TNI TATIT

pada RTD ke-1 tanggal 9 Juni 2021

Menyampaikan pandangan terkait dengan kasus persaingan AS China di LCS sesuai TOR yang disampaikan pada kami oleh promovenda tadi juga sudah disampaikan bahwa Indonesia bukan merupakan negara Claimant dan beberapa kali telah disampaikan khususnya melalui diplomatik note yang mau tidak mau Indonesia yang langsung berbatasan dengan China sehingga apa yang terjadi Laut China Selatan atau nanti disini kita disebut Laut Natuna utara baik secara langsung maupun tidak langsung baik itu hak berdaulat ataupun hak kedaulatan kemudian menghadapi masalah di laut China Selatan dan Laut Natuna utara khususnya itu tidak dapat dilakukan sendiri tetapi perlu sinergi dengan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diangkat oleh promovenda China menempatkan maritime militia dengan dukungan kapal survei yang berhasil menentukan beberapa kepulauan yang dikawal dengan China *coast guard* dan dikawal dengan kapal kapal angkatan Laut nya.

Beberapa pemikiran dan strategi serta upaya bagaimana penanganannya outline yang akan saya sampaikan beberapa hal seperti terlihat dalam paparan serta beberapa pemikiran strategi untuk menangani dinamika konflik di Laut China Selatan serta beberapa pemikiran tentang alternatif solusi atau konsep tentang penanganan konflik di Laut China Selatan.

Kemudian disampaikan sedikit seperti tadi yang banyak disinggung bagaimana perkembangan di laut China Selatan hanya poin poin penting saja bahwa Amerika Serikat dan China selalu ingin menegaskan kompetisi dan di komunitas kekuatannya di kawasan tersebut dengan menggelar kekuatan dari Amerika melalui kekuatan armada ke tujuh di Indopacom sementara China dengan taktiknya mengedepankan China Militia dengan sipilnya yaitu coastguard dengan dengan operasi operasi yang bertujuan untuk mengedepankan kepentingannya dan melegalisasi asertifnya dengan menetapkan dua distrik dan memberi nama sekitar delapan puluhan pulau di sekitar dan juga saat ini dapat dilihat situasi rezim laut yang perlu menjadi perhatian adalah area di laut China Selatan merupakan klaim ZEE yang diajukan oleh Vietnam dan Malaysia, menariknya sejak Malaysia mengajukan *extended set* nya ini kemudian mereka mengajukan melakukan beberapa kegiatan yang bersifat gangguan dengan membayangi operasi operasi kapal di daerah new capela, kemudian Ada dua hal yang bisa kita gambarkan sebagai *intention* dari China dan Amerika bahwa kedua negara akan tetap melakukan

segala hal untuk mendapatkan status mereka seperti yang dikatakan kementerian Luar Negeri China bahwa mereka akan memperjuangkan kedaulatan serta hak mereka di laut China Selatan, sedangkan sejumlah pejabat militer Amerika juga menyatakan Amerika menginginkan kebebasan bernavigasi atau *free of navigation* dan melintas di luar di ruang udara dengan menggunakan prinsip-prinsip internasional yang memperhatikan kedaulatan negara dibawahnya.

Begitu pentingnya arti laut China Selatan bagi kita semua baik bagi regional ada tiga alasan yaitu, perairan Laut China Selatan yang banyak mengandung potensi minyak dan gas dan sumber daya perikanan bahkan nilai-nilai strategis utamanya di laut China Selatan menjadi rebutan bagi negara-negara dan menginginkan keamanan di laut tersebut bahkan terhadap kekuatan militer asing yang akan melakukan agresi kemudian ada beberapa hal yang ingin disampaikan kaitannya dengan situasi dan dinamika di laut China Selatan dan dampak yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak.

Yang secara langsung yang dapat berdampak juga bagi kepentingan yaitu pertama hadirnya kekuatan militer negara-negara non-claimant di Laut China Selatan kemudian meningkatnya dinamika hubungan internasional terkait dengan laut China Selatan dan dampak-dampak secara langsung tersebut juga memberikan pengaruh yang nantinya juga akan melahirkan dampak yang tidak langsung yaitu adalah keamanan terhadap lalu lintas pelayaran, dampak terhadap asuransi yang meningkat sehingga biaya logistik menjadi meningkat selain itu juga ada resiko terputusnya jalur untuk melintasi laut China Selatan sehingga menimbulkan resiko krisis energi dan ekonomi.

Dampak yang tidak langsung kedua adalah konsentrasi di laut akan menimbulkan negara yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan perangnya dengan meningkatkan peralatannya maka akan meningkat pula potensi untuk perang sehingga dampak tidak langsung yang berikutnya adalah konflik antar negara yang terjadi di laut China Selatan yang mampu membangkitkan nasionalisme maritim seperti contoh yang dapat dikelompokkan menjadi konflik horizontal antara masyarakat yang ada di Vietnam dengan yang ras dari China dan juga langkah kebijakan yang diambil pemerintah China tidak bisa ditarik mundur karena akan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah China.

Menurut pandangan kami beberapa resiko-potensi yang sangat terjadi apabila terjadi peningkatan konflik negara-negara claimant yang akan dapat meningkatkan resiko terjadinya perang oleh sebab itu semua pihak berusaha sebisa mungkin untuk menahan karena perang mempunyai dampak yang panjang dan tentunya tidak diharapkan oleh rakyat kita semua kemudian resiko terbesar adalah terjadi peningkatan konflik sehingga terjadi terputusnya hubungan perdagangan antara negara-negara yang

melalui China Selatan dan dampak lain adalah perekonomian yang terganggu karena terjadi peperangan dan wilayah yang terisolir.

Dampak dari *Spillover* konflik terhadap Indonesia adalah potensi terjadinya kerusakan dan kehancuran di wilayah Natuna, Eksplorasi dan Eksploitasi akan berhenti karena akan terisolir dan akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat kondisi tersebut akan berdampak lanjut pada kondisi daerah tersebut karena terisolasi penduduk natuna. Dampak lain adalah krisis ekonomi karena terhentinya aktivitas ekonomi kelautan yang terkait langsung.

Strategi menghadapi situasi Laut China Selatan sehingga bisa menjawab pertanyaan pertanyaan dari penelitian. Indonesia harus menyiapkan mengambil langkah dalam penanganan laut China Selatan dan strategi jangka panjang. Strategi didasarkan pada kondisi kekuatan kelemahan, peluang dan ancaman dan rekomendasi faktor internal dan eksternal tersebut sehingga tersusun tiga konsep strategi yang pertama adalah:

1. *Strategi present at sea*
2. *Explore the sea*
3. *Trust building by the sea*

Apa yang dimaksud dengan strategi presentasi adalah kehadiran di laut secara terus menerus bagi simbol simbol negara dengan bentuk latihan bersama dengan siapa saja stakeholder yang terkait untuk melak suka melakukan kemampuan dukungan serta kita melaksanakan operasi informasi menggunakan media elektronik dan cetak.

Strategi yang kedua adalah ekspresi adalah mendorong Eksplorasi dan Eksploitasi sumberdaya laut di laut Natuna utara dan memanfaatkan serta memaksimalkan potensi sumberdaya kelautan yang ada di Laut Natuna utara.

Yang ketiga adalah strategi *trust building by the sea* yaitu merupakan kegiatan pembinaan dengan semua pihak yang terlibat konflik termasuk juga bagaimana menjalin hubungan diplomasi dan sinergi di kementerian lembaga secara internal bagi bangsa Indonesia maupun secara diplomasi luar negeri baik bilateral maupun regional. Strategi membangun sinergi semoga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga yaitu fokus lagi kepada sinergi tas antara kementerian lembaga.

Menurut pandangan kami tantangan cukup besar dengan adanya Ego Sektoral serta birokrasi yang ada saat ini yang telah disebutkan oleh Narasumber berikutnya dengan mengenakan Emerson saya sebutkan ada tiga hal yaitu motivation kemudian prinsipal nggak cuma tetapi yang didekatkan adalah ada elemen *capacity action* serta pendekatan dari SWOT di mana ada pendekatan beberapa faktor internal maupun eksternal yang di kelompok-kelompokkan sebagai faktor kekuatan adalah kepemimpinan yang menunjukkan kesamaan visi yaitu perlu didorong dengan maritim yang secara

bersama sama dapat membangun kemudian faktor kelemahannya adalah protokol kerjasama serta Menejemen yang sudah disampaikan bahwa belum adanya kesepakatan baik secara ASEAN maupun ASEAN plus China, kemudian faktor kerjasama internasional yaitu peran dari kementerian Luar Negeri terus dilaksanakan kemudian faktor ancaman di mana faktor geografis mendorong adanya celah untuk melakukan atau mudahnya pelanggaran pelanggaran kejahatan yang dilakukan di laut Natuna utara.

Ancaman ini diantisipasi dengan penataan pengamatan maka disusun beberapa strategi berdasarkan faktor faktor yang telah disebutkan melalui pendekatan pendekatan yaitu

1. pendekatan kekuatan regulasi perlu di Infokan bahwa Bakamla dengan Instansi lembaga terkait sedang mengajukan rancangan undang undang tata kelola keamanan maritim dan diharapkan bisa disetujui oleh bapak Presiden
2. pendekatan di bidang SDM yang dilakukan dengan memberdayakan sumber daya manusia

Hari ini sedang di jalankan oleh BAKAMLA yang dilaksanakan secara rutin membahas *update* maritim yang terjadi dan menyusun MOU serta PKS ini yang dimaksudkan bahwa sinergi tas itu tidak hanya dibangun secara internal tetapi juga dilaksanakan secara internasional maupun regional untuk menghadapi dan menangani konflik konflik di Laut China Selatan.

Oleh karena itu ada beberapa poin yang bisa disampaikan pada cacatnya konflik membutuhkan kolaborasi karena ini merupakan Win Win solution yang melibatkan beberapa kementerian lembaga untuk masalah LCS ini ASEAN merupakan ASEAN juga merupakan media regional yang dapat menyelesaikan konflik CS dan beberapa kekurangan nya.

Kelemahan ASEAN :

1. adanya potensi ketidak percayaan kepada ASEAN di mana beberapa anggotanya merupakan negara yang mengklaim LCS
2. adanya Konsensus kerjasama ASEAN meskipun begitu konsesus ini berhasil mencegah konflik tetapi sangat lemah dengan penyelesaian di China namun ada beberapa integritas ASEAN yang mampu menjaga sesama negara ASEAN sehingga tidak pernah terjadi konflik yaitu manfaat dari mekanisme ASEAN dibentuk.

ASEAN sebagai jalur memiliki wadah penting pula seperti AES dan ASEAN Plus Amerika dan Australia yang dapat menyelesaikan konflik ini dengan baik Asia juga memiliki tiga pilar yaitu APSC merupakan wadah dibidang keamanan di kawasan alternatif solusi di

mana masing masing kementerian lembaga dengan counterpart nya, bakamla dengan lembaga lembaga ASEAN meningkatkan kolaborasi nya:

1. mendorong K/L utk kerjasama baik bilateral maupun regional
2. meningkatkan komunikasi diplomatik melalui kementerian lembaga terkait laut China Selatan serta
3. mengembangkan kerjasama aplikatif dalam bentuk riset dan Eksplorasi sumber daya laut di laut China Selatan

LAMPIRAN 2.9 TRANSKRIP PAPARAN SOPSA

Pertanyaan penelitian 1. Bagaimana Rencana Strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

INDIKATOR : *Teori Strategi: Ends, Means, Ways*

1. Apa dan bagaimana cara yang dilakukan oleh Indonesia sesuai tugas dan fungsi K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?
2. Bagaimana rencana politik luar negeri dan target RI, khususnya kebijakan pertahanan Indonesia dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?
3. Bagaimana cara menyelesaikan/mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional
4. Bagaimana kondisi keamanan nasional Indonesia saat ini dihadapkan dengan konflik persaingan AS-China di Laut China Selatan?
5. Mengapa Laut China Selatan penting bagi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional Indonesia? Apa yang membuat LCS penting bagi keamanan nasional Indonesia?
6. Apa dan bagaimana kepentingan Indonesia di Laut China Selatan dan strategi apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional?
7. Apa dan bagaimana posisi dan kepentingan Indonesia dihadapkan dengan kondisi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?
8. Apa tujuan atau rencana strategis yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?
9. Apa saja ancaman yang perlu diwaspadai Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?

JAWABAN:

1. Jawaban pertanyaan nomor 4, 5, dan 9.

- a. Kondisi keamanan nasional Indonesia saat ini sangat terkait dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap konflik persaingan AS-China di Laut China Selatan. Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dengan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya, panjang garis pantai 108.000 km serta memiliki letak strategis di antara dua benua dan dua samudera termasuk keberadaan empat dari sembilan *choke points* dunia serta *sea line of communication* (SLOC) maupun *sea line of oil trade* (SLOT), menempatkan Indonesia dalam posisi yang strategis di kawasan Asia-Pasifik atau Indo-Pasifik. Dengan kondisi demikian, instabilitas kondisi keamanan di kawasan akibat konflik atau persaingan kekuatan besar secara langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada kondisi stabilitas dan keamanan nasional.

- b. Pentingnya posisi strategis Indonesia terutama dalam konteks persaingan di LCS antara lain adalah Indonesia sebagai satu-satunya negara yang wilayahnya membentang ke dalam tiga *sub-area of responsibility* dari US Indo-Pacom (salah satu dari *geographic combatant command* milik Amerika Serikat), yaitu wilayah Samudera Hindia, wilayah Pasifik dan *first island chain*. Di sisi lain, perairan Indonesia juga menjadi pintu gerbang dalam konsep *string of pearl* China dari wilayah Asia Timur ke Samudera Hindia. Menyikapi hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa siapapun yang menguasai Indonesia, akan menguasai kawasan Indo-Pasifik sehingga dapat dipastikan akan ada banyak pihak dan kepentingan terutama dari AS dan China yang akan mencoba mengambil keuntungan dari posisi Indonesia. Oleh sebab itu, keamanan nasional dalam konteks *maritime security* dengan TNI AL sebagai *leading sector* dan dengan kapabilitasnya sebagai alat pertahanan di laut, memiliki kewajiban untuk mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan laut Indonesia terhadap ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
- c. Ancaman yang perlu diwaspadai oleh Indonesia sebagai antisipasi terhadap persaingan Amerika-China di Laut China Selatan dapat berupa ancaman aktual berupa ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Bentuk ancaman tersebut seperti pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, kegiatan intelijen/spionase, separatisme dan pemberontakan, perompakan dan pembajakan bersenjata, ancaman siber, senjata biologis dan bahkan ancaman potensial yang belum terjadi saat ini namun dapat saja terjadi sewaktu-waktu dalam situasi tertentu menjadi ancaman nyata berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing) termasuk eksekusi atau dampak dari perang konvensional antara pihak/negara lain di kawasan terutama di wilayah yang berdekatan/berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. Jawaban pertanyaan nomor 2 dan 8.

- a. Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia tertera pada Pembukaan UUD 1945 yaitu politik luar negeri yang bebas aktif sehingga sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat didikte oleh negara lain dan menerapkan prinsip saling menghormati serta berdasar pada aturan hukum dan kesepakatan internasional, namun di sisi lain Indonesia juga harus aktif dalam hubungan internasional sesuai tujuan nasional yang salah satunya adalah keikutsertaan Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia.
- b. Sikap Indonesia terhadap isu di LCS adalah berpegang pada UNCLOS 1982 sebagai referensi hukum laut internasional dalam kebijakan politik luar negerinya, di mana klaim sepihak *nine dash line* China tidak memiliki dasar hukum yang valid, tidak dapat diterima, dan tidak dapat diakui. Namun hal ini juga tidak berarti Indonesia bersikap apatis dan memihak pada pihak lainnya. Indonesia berdasarkan tatanan dan mekanisme hubungan internasional berupaya mendorong agar konflik tetap dapat dikelola secara damai untuk mencapai solusi terbaik bagi kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas dan perdamaian serta kesejahteraan bersama di kawasan.
- c. Mengantisipasi potensi eskalasi konflik di LCS, Indonesia juga dapat berpedoman pada *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea* (1994), khususnya bab II bagian I poin 16, yaitu sebagai negara netral (tidak berpihak) harus dapat menjaga perairan dan yurisdiksinya agar tidak digunakan oleh salah satu pihak yang bertikai. Hal ini terkait dengan geostrategi Indonesia mengantisipasi eskalasi konflik yang berpotensi memuncak akibat persaingan kepentingan kekuatan besar di kawasan. Indonesia harus menjaga wilayah yurisdiksinya agar tidak digunakan untuk tujuan dan kepentingan pihak lain yang berkonflik serta mencegah agar akses dari konflik itu sendiri agar tidak berimbas kepada kepentingan nasional Indonesia.
- d. Hal ini berimplikasi kepada peran TNI, termasuk TNI AL sebagai bagian integral yang merupakan alat pertahanan negara memiliki fungsi penangkal, penindak dan pemulih terhadap ancaman yang timbul akibat konflik di LCS yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

3. Jawaban pertanyaan nomor 1, 3, 5, 6, dan 7.

- a. Sebagai negara kunci di kawasan, Indonesia harus memanfaatkan posisinya seoptimal mungkin dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya sekaligus memainkan peran strategisnya secara tepat dalam menghadapi isu persaingan kekuatan besar di kawasan baik melalui diplomasi dalam kerangka bilateral maupun memanfaatkan forum multilateral seperti ASEAN atau kerangka kerja sama lainnya. Hal ini mengingat, kondisi di LCS akan berdampak pada kepentingan Indonesia. Kepentingan-kepentingan tersebut antara lain:
- 1) Kedaulatan. Walaupun Indonesia bukan sebagai *claimant state* Namun dalam klaim sepihak China dalam peta *nine dash line*-nya beririsan dengan sebagian wilayah ZEE Indonesia yang berbatasan dengan perairan Kabupaten Natuna. Apabila China tidak ragu berhadapan dengan beberapa negara *claimant states* untuk klaim sepihaknya di LCS, maka tidak tertutup kemungkinan China juga akan berpotensi melakukan klaim sepihak lainnya di wilayah sekitar LCS lainnya termasuk perbatasan LNU.
 - 2) Kepentingan politik. Sebagai negara yang menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia akan berada dalam posisi yang strategis dalam persaingan kekuatan besar di LCS. Indonesia sebagai negara yang terbesar dan "dituakan" di ASEAN, memiliki posisi geografis yang vital dalam akses laut dari dan ke kawasan LCS tentunya akan menjadi sasaran perebutan pengaruh China maupun AS agar berpihak atau mendukung kepentingan salah satu dari dua kekuatan besar tersebut.
 - 3) Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Apabila sengketa tersebut tereskalasi menjadi perang, sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas atau berpotensi *spill over* hingga ke wilayah Indonesia, sehingga menjadi ancaman militer yang serius berupa penggunaan wilayah yurisdiksi Indonesia baik darat, laut, dan udara untuk kepentingan operasi militer negara yang bersengketa, contohnya seperti memanfaatkan wilayah Indonesia untuk pangkalan aju, sumber dan jalur logistik, rute transit maupun jalur alternatif, dan lain-lain.

- 4) Kepentingan ekonomi. Potensi sumber daya kelautan nasional di LNU yang berbatasan dengan LCS cukup besar, terutama untuk sektor perikanan. Eskalasi konflik yang meningkat dan bahkan apabila hingga sampai pada perang sebagai puncak eskalasi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian dengan berkurangnya hasil tangkap akibat terbatas atau terhentinya aktivitas perikanan, di samping potensi rusaknya ekosistem laut akibat aktivitas militer di kawasan. Sektor pariwisata bahari Indonesia juga akan terganggu dengan memanasnya konflik di LCS. Selain itu, jalur perdagangan internasional yang terdampak akibat situasi konflik juga dapat mengakibatkan peningkatan biaya transportasi laut, logistik dan asuransi termasuk perubahan rute kapal-kapal niaga menghindari wilayah konflik di LCS.
 - 5) Sosial budaya. Pecahnya perang sebagai puncak eskalasi konflik di Laut China Selatan akan berpotensi menimbulkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke Indonesia. Hal ini pernah terjadi sebelumnya ketika terjadi Perang Vietnam, sejumlah besar arus pengungsi berdatangan ke Pulau Galang. Terakhir, dari sisi politik akan mengakibatkan perebutan pengaruh politik Indonesia oleh AS dan China yang mampu mempengaruhi kebijakan Indonesia. Dengan berbagai dimensi ancaman dari sengketa tersebut, dapat terlihat posisi strategisnya Laut China Selatan terhadap keamanan nasional Indonesia.
- b. Menyikapi hal tersebut, sebagai wujud antisipasi TNI AL sebagai bagian dari TNI sesuai tugas dan fungsinya melakukan beberapa cara untuk mengantisipasi persaingan AS-China di LCS, antara lain:
- 1) melaksanakan pengamanan wilayah perairan Indonesia agar tidak digunakan oleh salah satu pihak untuk kepentingan militernya;
 - 2) melaksanakan pengamanan wilayah perairan Indonesia agar eskalasi konflik yang terjadi tidak berimbas dan membahayakan kedaulatan Indonesia;
 - 3) melaksanakan pengamanan jalur-jalur pelayaran agar setiap pengguna laut negara netral dapat menggunakan hak-hak pelayaran sesuai dengan UNCLOS; dan
 - 4) menjamin kepentingan Indonesia di laut tidak terganggu.

c. Adapun langkah-langkah konkrit yang dapat diambil pemerintah Indonesia terutama TNI/TNI AL sesuai tatarannya dari level strategis maupun operasi dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa adalah sebagai berikut:

1) Aspek Strategis.

- a) Dengan akses yang dimiliki oleh Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka Indonesia dapat mengambil upaya dan langkah-langkah strategis dengan mendesak PBB untuk segera dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghentikan konflik terbuka di Laut China Selatan mengingat kerugian dan dampak regional serta global yang ditimbulkan.
- b) Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan seluruh saluran diplomatik dan kerja sama internasional yang ada, terutama kerja sama ASEAN/ASEAN-Plus di mana AS maupun China sebagai sesama mitra dialog ASEAN diharapkan dapat diajak duduk bersama dalam forum dialog dalam upaya mencegah dan meredakan eskalasi yang berpotensi kepada konflik terbuka antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan.
- c) TNI AL melaksanakan peran diplomasinya melalui forum multilateral (IONS, WPNS) maupun bilateral (NTNT) dan forum-forum internasional lainnya untuk mengaspirasikan semangat kerja sama internasional melalui kegiatan latihan bersama maupun kegiatan lainnya dalam rangka meredakan dan menghentikan ketegangan antara China dan Amerika Serikat.
- d) Bila semua upaya damai tersebut tidak dapat terealisasi, maka Pemerintah Indonesia harus dapat menjamin seluruh wilayah dan penduduk Indonesia terutama yang berada di sekitar area konflik tidak akan terdampak oleh konflik terbuka atau perang yang terjadi.

2) Aspek Operasional dan Taktis.

- a) Menggelar dan meningkatkan frekuensi operasi kekuatan TNI/TNI AL di Kepulauan Natuna dan sekitarnya untuk mengantisipasi kemungkinan konflik antara kedua negara tersebut masuk (*Spill over*) ke wilayah

- yurisdiksi Indonesia, demikian juga dengan meningkatkan frekuensi patroli udara strategis untuk melaksanakan pengintaian udara di ZEEI/Laut China.
- b) Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan unsur-unsur TNI AL dan TNI AU pada level siap perang dengan melengkapi kebutuhan armamen tempur kedua matra tersebut.
 - c) Melaksanakan Operasi Kamla untuk mencegah dan memulangkan para nelayan Indonesia yang sedang atau akan menangkap ikan di wilayah laut Natuna dan Laut China Selatan.
 - d) Melaksanakan Operasi penyekatan di Selat Malaka dan pintu-pintu ALKI untuk mencegah penggunaan perairan Indonesia oleh kedua negara yang sedang bertikai serta menyiagakan SAR.
 - e) Menyiagakan unsur-unsur pertahanan udara di pulau-pulau yang berpenghuni di sekitar wilayah konflik untuk mengantisipasi Rudal-rudal yang menyasar wilayah daratan Indonesia.
 - f) Mengajukan nota protes apabila terjadi pelanggaran penggunaan perairan maupun yurisdiksi Indonesia oleh kedua belah pihak yang berperang serta menjamin keamanan serta keselamatan kapal-kapal yang menggunakan ALKI.
 - g) Mengajukan klaim pengganti kerugian kepada negara-negara yang bertikai (AS dan China) apabila terjadi kerusakan dan kerugian terhadap wilayah, penduduk maupun sumber daya alam Indonesia sebagai akibat dari penggunaan senjata dalam peperangan.
- d. Konsep strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dapat ditawarkan oleh TNI AL untuk merespon potensi eskalasi konflik antara kekuatan besar di LCS dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Strategi Jangka Pendek

STRATEGI	SASARAN (ENDS)	SUMBER DAYA (MEANS)	CARA (WAYS)
Optimalisasi gelar operasi sesuai dengan RO guna melaksanakan pengendalian laut di LNU	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Kemampuan <i>reconnaissance</i> • Terwujudnya pengendalian Laut di LNU. • Menjaga kepentingan nasional di laut Natuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Alutsista TNI/KL • Sumdanas • Nelayan • Sistem Sensor Terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan gelar operasi laut sec mandiri & gab serta tingkatkan koordinasi/kodal terhadap seluruh aset yang dimiliki. • Menambah waktu gelar Operasi Siaga Purla yang semula 250 hari menjadi 365 hari • Manfaatkan radar kapal/pantai & info intel/sharing. • Mengoptimalkan pola operasi pesud TNI AU, TNI AL dan Bakamla • Pengiriman Amonisi dan Logistik dengan kapal pengangkut amonisi ke Natuna • Melaksanakan <i>Effective Presence</i> dengan menambah <i>endurance</i>

Strategi jangka menengah

STRATEGI	SASARAN (ENDS)	SUMBER DAYA (MEANS)	CARA (WAYS)
Meningkatkan kemampuan pengendalian di Perairan Natuna	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Puan <i>reconnaissance</i> • Terwujudnya Puan pukul. • Terwujudnya Pangkalan yang mampu mendukung kegiatan Operasi di Laut Natuna Utara (LNU). • Menjaga kepentingan nasional di laut Natuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Alutsista • Sumdanas • Fasilitas Pangkalan • Senjata 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemampuan dan menambah kekuatan Alutsista Koarmada I yang memiliki keunggulan comparatif / berimbang dengan negara2 Kawasan. • Membangun kesiapan operasional Koarmada I (kesiapan Alutsista, Personel, Logistik) • Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana pangkalan dengan membangun tangki timbun BBM, Reverse Osmosis (RO) dan <i>Water Purifier</i> • Pembangunan Radar di Natuna dengan kemampuan jarak jangkau lebih jauh / <i>over the Horizon</i> • Alih bina beberapa KAA & KS dari Armada II

<p>Meningkatkan kemampuan dalam penindakan pelanggaran di Perairan Natuna</p>	<p>Terwujudnya kemampuan kamla dan jarkaplid Terwujudnya kemampuan dan fungsi pangkalan. Terjaganya Sumdanas di per Natuna.</p>	<p>Pangkalan, sarana prasarananya. SOP Kumla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rencanakan kebutuhan Logistik di Natuna. • Melaks patroli sektor gun KRI & Pesud • Melaks kerja sama taktis dgn sur udara TNI AU • Melaks proses hukum di pangkalan terdekat • Melibatkan Back Up Kekuatan Udara dari Pangkalan Udara Supadio
--	---	--	---

Strategi jangka Panjang

STRATEGI	SASARAN (ENDS)	SUMBER DAYA (MEANS)	CARA (WAYS)
<p>Meningkatkan kemampuan pengendalian di Perairan Natuna</p>	<p>Terwujudnya Puan reconnaissance Terwujudnya Puan pukul. Terwujudnya Pangkalan yang mampu mendukung kegiatan Operasi di Laut Natuna Utara (LNU). Menjaga kepentingan nasional di laut Natuna</p>	<p>Alutsista Sumdanas Fasilitas Pangkalan Senjata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifkan operasi laut sec mandiri & gab serta tingkatkan koordinasi/kodal terhadap seluruh aset yang dimiliki. • Manfaatkan radar kapal/pantai jarak jauh & info intel/sharing. • Mengoptimalkan pola operasi pesud & KS intai. • Membangun kemampuan dan menambah kekuatan Alutsista Koarmada I yang memiliki keunggulan comparative dengan negara2 Kawasan. • Membangun kesiapan operasional Koarmada I (kesiapan Alutsista, Personel, Logistik) • Membangun Pangkalan kapal Selam (Sionban)
<p>Meningkatkan kemampuan dalam penindakan pelanggaran di Perairan Natuna</p>	<p>Terwujudnya kemampuan kamla dan jarkaplid Terwujudnya kemampuan dan fungsi pangkalan. Terjaganya Sumdanas di per Natuna.</p>	<p>Pangkalan, sarana prasarananya. SOP Kumla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Refocusing Anggaran utk lengkapi puan Pkl TNI Terintegrasi • Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana pangkalan TNI AL • Rencanakan kebutuhan log di Natuna. Utk seluruh jenis Alutsista TNI AL • Melaks patroli sektor gun KRI & Pesud • Melaks kerjasama taktis dgn sur udara TNI AU • Melaks proses hukum di pangkalan terdekat

<p>Meningkatkan kemampuan diplomasi AL (Naval Diplomacy)</p>	<p>Terwujudnya daya tangkal. Terjaganya keamanan di per laut Natuna</p>	<p>Alutsista SDM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gelar Satops scr terbuka & gabungan dgn satuan TNI utk tunjukkan eksistensi kekuatan • Tingkatkan kuantitas & kualitas alutsista yg dimiliki & digelar dgn gunakan Sewaco berteknologi tinggi/modern.
---	---	--------------------------	--

Pertanyaan Penelitian 2. Bagaimana sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Kondisi Saat Ini)?

INDIKATOR : *Teori Strategi: Ends, Means, Ways*

1. Apa dan bagaimana target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
2. Bagaimana dan apa saja upaya/cara yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
3. Sumber daya apa saja yang diperlukan/perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga demi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
4. Bagaimana strategi K/L dalam menjaga sinergitas antar Lembaga dalam menghadapi ancaman persaingan Amerika-China di LCS?

INDIKATOR : *Teori sinergitas, Teori antisipasi, Teori Stabilitas*

5. Bagaimana strategi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
6. Apa yang sudah dilakukan oleh K/L sebagai upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
7. Apakah ada rencana kegiatan atau program bersama dari K/L yang bersangkutan untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
8. Sejauh mana sinergitas antara K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? Jika dihadapkan dengan fakta saat ini, bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi persaingan AS-China di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas keamanan nasional?
9. Apakah terdapat aturan atau regulasi yang mencakup sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.
10. Saat ini, K/L mana yang menjadi leading sector dalam melaksanakan sinergitas untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas keamanan nasional? Apakah K/L tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mensinergikan K/L terkait?
11. Mengapa diperlukan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? Apa kaitannya dengan stabilitas keamanan nasional?
12. Bagaimana urgensi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di

Laut China Selatan? dan bagaimana hubungannya dengan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

13. Apa saja faktor yang mempengaruhi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?
14. Apa saja kendala yang dialami oleh K/L dalam melaksanakan strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

JAWABAN:

1. **Jawaban pertanyaan nomor 1.** Target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan adalah terwujudnya keterpaduan seluruh komponen pertahanan nasional dengan menempatkan K/L sebagai *leading institution* sesuai tahapan eskalasinya dalam suatu kesatuan usaha maupun kesatuan komando sesuai dengan tugas pokok, kemampuan, dan peranannya masing-masing. Pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mengantisipasi dampak dari persaingan AS-China di LCS harus disesuaikan dengan ancaman di tiap level eskalasi sejak tahap masa damai hingga kemungkinan konflik terbuka atau perang sebagai puncak eskalasi.

2. **Jawaban pertanyaan nomor 3.** Dalam mencapai tujuan strategis diperlukan berbagai macam sumber daya seperti alutsista dan persenjataan, pangkalan dan sarpras, sumber daya nasional dan manusia, serta dasar dan aturan hukumnya, yang harus dikembangkan dan ditingkatkan secara bersama-sama. Penjagaan stabilitas keamanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh K/L sehingga diperlukan sinergitas dan *road map* yang disepakati bersama sebagai panduan dalam mengembangkan dan peningkatan sumber daya tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah pengembangan sumber daya yang dilaksanakan harus mampu memberikan efek *deterrence* kepada negara lain dhi AS dan China, serta mampu mengatasi ancaman sesuai level eskalasi.

3. **Jawaban pertanyaan nomor 2.** Upaya/cara yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan yaitu melalui percepatan penyusunan rencana aksi, termasuk *Rules of Engagement* di lapangan untuk membangun kekuatan yang berimbang antara wewenang dengan kapabilitas seluruh kementerian/lembaga serta pemangku

kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada kebijakan nasional.

4. **Jawaban pertanyaan nomor 8, 9,10, 11, dan 12 (Kondisi saat ini)**

a. K/L terkait belum memiliki perspektif yang selaras terhadap potensi dampak ancaman persaingan AS-China di LCS. Perkembangan LCS dan posisi Indonesia Hal ini disebabkan karena Pemerintah RI belum mempunyai pedoman sebagai acuan atau referensi bagi K/L terkait. Adanya pedoman tersebut diharapkan akan efektif menyatukan perspektif dan mengatur kolaborasi tugas tiap-tiap K/L sebagai instrumen kekuatan maritim melalui perumusan kebijakan yang telah diharmonisasi. Perspektif yang berbeda tersebut harus dijumpai dengan melihat perkembangan LCS dan posisi Indonesia di dalamnya.

b. Kebijakan dari *policy maker* dan turunan strategi dari *strategy maker* belum terharmonisasi secara optimal. Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam sebagai *policy maker* belum selaras, masing-masing mempunyai pegangan kebijakan yang tidak memperkuat satu sama lain. Rekomendasi untuk merumuskan harmonisasi kebijakan Indonesia adalah bukan sekedar menggabungkan dua kebijakan, tetapi dengan mengevaluasi kembali kedua kebijakan dari *policy maker* yang berkaitan dengan permasalahan LCS dan mengukur kebijakan mana yang akan dilaksanakan dengan ukuran waktu. Kemudian dari kebijakan tingkat K/L di bawah dua kementerian koordinator yang telah diharmonisasi, dapat disusun strategi K/L yang mendukung terwujudnya strategi nasional sesuai dengan bidang dan lingkungan strategisnya.

c. Pemerintah RI perlu merancang wewenang dan wilayah operasi agar sesuai dengan kapabilitas dari instrumen kekuatan maritim sehingga penegakan hukum dan kedaulatan dapat dilakukan secara maksimal. Sebagai contoh adalah Kemen KP dapat berpatroli dalam WPP hingga ke ZEE, namun ZEE yang tidak berhadapan langsung dengan negara lain dan melakukan koordinasi dengan TNI AL ketika beroperasi hingga ke ZEE, karena resiko untuk berhadapan dengan kapal *Coast Guard* bahkan kapal perang negara lain sangat besar.

5. **Jawaban pertanyaan nomor 13, 14.** Faktor yang mempengaruhi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan dan peluang serta kendalanya antara lain:

a. Banglistra yang dinamis khususnya di kawasan, sehingga diperlukan kontinuitas dan konsistensi terhadap kebijakan dasar dalam menyikapi persaingan namun tetap fleksibel atau kekenyalan dalam merespon dinamika di lapangan. Di satu sisi ini merupakan peluang bagi sinergitas K/L untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam mengikuti dan merespon perkembangan persaingan AS-China di LCS.

b. Hubungan kerja sama bilateral baik dengan AS maupun dengan China selaku dua pihak yang bersaing dalam isu LCS. Posisi K/L di Indonesia akan dipengaruhi pendekatan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Kerja sama bilateral tersebut terbagi pada beberapa bidang, seperti kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Seluruh kerja sama tersebut harus mengacu pada kebijakan politik luar negeri pemerintah, sehingga hal ini akan menjadi peluang yang baik bagi K/L, namun perlu diperhatikan apabila komunikasi dan koordinasi antar K/L tidak terjalin dengan baik hal ini akan menjadi kendala bagi upaya mewujudkan sinergitas.

c. Pengaruh ASEAN sebagai organisasi di kawasan terhadap sikap dan posisi Indonesia. Beberapa negara ASEAN yang menjadi *claimant states* dalam sengketa di LCS tidak berada dalam posisi dan sikap yang sama, sebagian ada yang cenderung berpihak pada AS dan sebagian lainnya pada China. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN yang bukan *claimant state* harus pro-aktif untuk mendorong upaya damai dalam mencari solusi terbaik di LCS melalui peran K/L terkait sesuai dengan tiga pilar ASEAN.

d. Visi Poros Maritim Dunia merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia yang merupakan peluang bagi K/L untuk meningkatkan sinergitas dalam rangka mewujudkan kebijakan nasional terkait kepentingan maritim Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai diplomasi dan pertahanan maritim.

e. Birokrasi. Mekanisme kerja sama dan hubungan antar K/L seringkali terbentur pada birokrasi yang tidak sederhana termasuk dalam upaya untuk menghadapi persaingan di LCS. Belum adanya suatu badan yang menangani isu keamanan nasional seperti *National Security Council* menyebabkan

perumusan kebijakan maupun respon terhadap isu-isu keamanan nasional seperti persaingan di LCS yang melibatkan K/L terkait akan memerlukan waktu dan upaya untuk mengoordinasikannya.

6. **Jawaban pertanyaan nomor 4, 5, 6, 7 (Strategi).**

a. Ketegangan China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan diawali dengan klaim “*Four Sha*” China (sebelumnya *Nine Dash Line*) terhadap pulau dan atol di Kepulauan Spratly dan Paracel yang dianggap tidak sesuai oleh Amerika Serikat yang mengusung *freedom of navigation*. Ketegangan ini semakin meruncing dengan terjadinya perang dagang yang saat ini terus berlangsung antara kedua negara. Memperhatikan kepada ketegangan yang terus terjadi di Laut China Selatan maka konflik terbuka antara kedua negara *super power* tersebut dapat saja terjadi kapan saja. Oleh sebab itu maka Indonesia sebagai salah satu negara yang berada dekat dengan area konflik, dituntut untuk dapat mengamankan wilayah perairan yurisdiksi dan kedaulatannya agar ekses (*spill over*) dari konflik yang terjadi tidak akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Berdasarkan kepada politik luar negeri Indonesia saat ini yang bebas aktif, maka sikap Indonesia adalah tidak memihak kepada salah satu negara dalam menyikapi konflik antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan. Disadari bahwa kedua negara tersebut bukan merupakan lawan bagi Indonesia apabila saling berhadapan di laut (tempur laut), demikian juga apabila Indonesia mengambil tindakan kepada salah satu pihak, maka Indonesia akan dianggap memihak salah satu negara yang bertikai dan kondisi ini akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi Indonesia.

c. Akan tetapi untuk mengantisipasi ekses konflik yang terjadi, maka TNI AL sebagai alat pertahanan negara di laut harus siap sedia menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi untuk melindungi seluruh wilayah daratan Indonesia yang berdekatan dengan area konflik dan keselamatan penduduk Indonesia. Operasi yang dilaksanakan oleh TNI AL merupakan bagian dan saling terintegrasi serta sejalan dengan K/L lainnya. *Stakeholder* maritim lain yang ada di Indonesia harus dapat diikutsertakan oleh TNI/TNI AL dalam menghadapi konflik yang terjadi baik untuk patrol bersama, penindakan pelanggaran hukum maupun memperkuat operasi tempur laut.

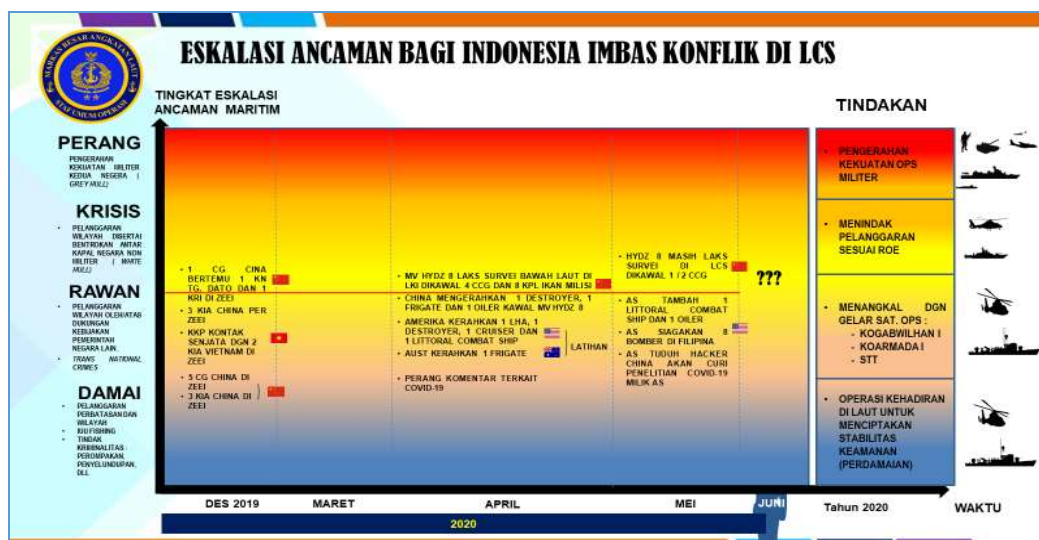
d. Dalam menyikapi konflik yang terjadi di LCS, TNI AL membagi eskalasi menjadi beberapa tahap, yaitu Damai, Rawan, Krisis, Perang. Berdasarkan perkembangan situasi saat ini, kondisi di LCS memasuki tahap rawan yang terlihat semakin seringnya terjadi pelanggaran wilayah yang dilaksanakan oleh unsur negara lain, seperti kapal-kapal China Coast Guard (CCG), kapal US Navy, yang direstui oleh otoritas pemerintah setempat. Oleh sebab itu diperlukan sinergitas antar K/L baik unsur di lapangan, maupun yang dilaksanakan oleh staf pusat serta pendekatan pada semua bidang, seperti bidang Diplomasi, Informasi, Militer, dan Ekonomi (DIME) sebagai respon secara komprehensif terhadap potensi ancaman tersebut antara lain:

1) Bidang Diplomasi. Melalui Kemenlu sebagai *leading institution* membuat Nota Protes kepada China maupun Vietnam, memaksimalkan upaya diplomasi secara multilateral melalui forum ASEAN, dan meneruskan upaya diplomasi penyelesaian delimitasi secara damai melalui forum-forum bilateral.

2) Bidang Informasi. Melalui upaya komunikasi strategis dalam rangka mencapai tujuan kepentingan strategis Indonesia di wilayah yang rawan pelanggaran kedaulatan, khususnya di LNU dan LCS.

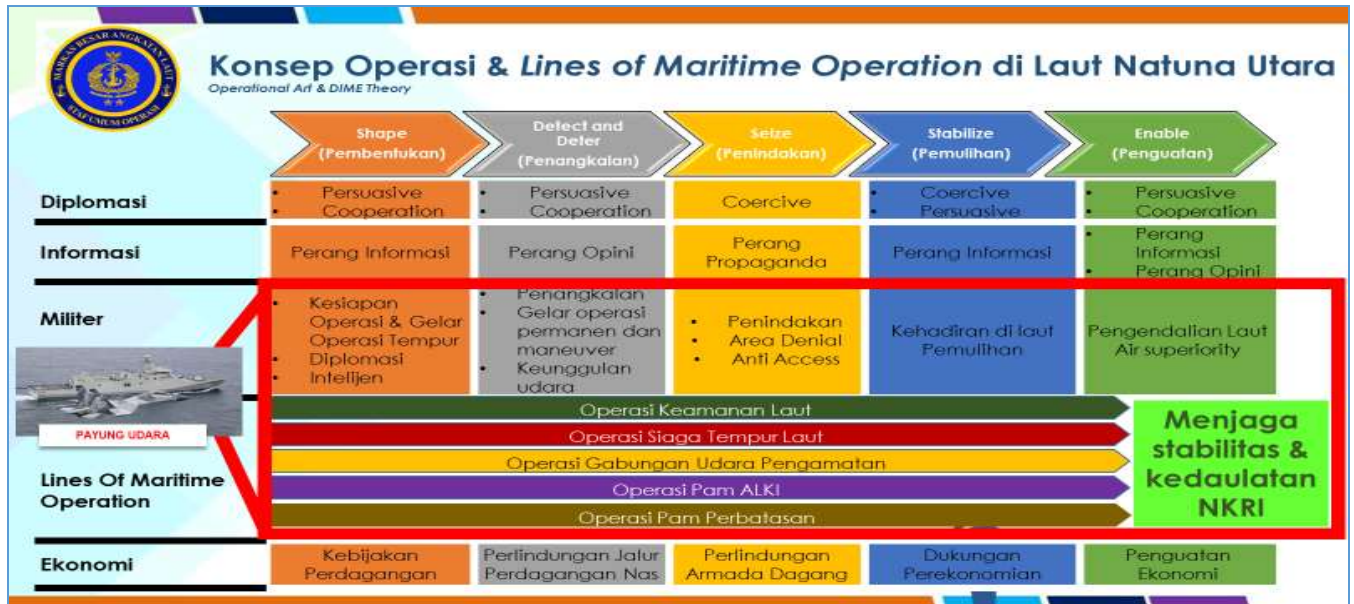
3) Bidang Militer. Melalui peningkatan patroli keamanan laut di LNU dan LCS yang merupakan *focal area* dan rentan terhadap ancaman dari arah utara, mengedepankan unsur penegak hukum maritim dengan dukungan TNI AL, yang akan aktif menyesuaikan dengan eskalasi situasi di daerah operasi.

4) Bidang Ekonomi. Melalui peningkatan aktivitas nelayan kapal ikan Indonesia baik dari wilayah lokal sekitar Natuna maupun wilayah lain dan investasi sarpras serta fasilitas perikanan lokal.



TAHAP ESKALASI	KETERANGAN	TINDAKAN TNI / TNI AL
DAMAI	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran Perbatasan Wilayah Dan Wilayah IUU Fishing Tindak Kriminalitas : Perompakan, Penyelundupan, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laksanakan patroli rutin ✓ Gelar operasi rutin Mabes TNI dan TNI AL ✓ Laksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan
RAWAN	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran Wilayah Oleh/Atas Dukungan Kebijakan Pemerintah Negara Lain. Trans National Crimes 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkatkan patroli rutin laut dan udara di Laut Natuna Utara ✓ Perkuatan unsur TNI AL di Natuna ✓ Melaksanakan penyiapan unsur, sensor, senjata, dan logistik ✓ Sinergitas operasi dengan Bakamla dan KKP ✓ Penyusunan ROE ✓ Laksanakan diplomasi dengan Amerika dan China
KRISIS	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran Wilayah Disertai Bentrokan Antar Kapal Negara Non Militer (<i>White Hull</i>) maupun melibatkan Kapal Militer 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkatkan intensitas patroli laut dan udara di Laut Natuna Utara ✓ Pembentukan Kogasgabpad oleh Mabes TNI ✓ Perkuatan kekuatan darat, laut, dan udara di Natuna ✓ Pelarangan nelayan Indonesia beraktifitas di Laut Natuna Utara ✓ Himbauan kepada armada niaga Indonesia tidak berlayar ke LCS ✓ Laksanakan diplomasi dengan Amerika dan China
PERANG	<ul style="list-style-type: none"> Pengerahan Kekuatan Militer Kedua Negara (<i>Grey Hull</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kogasgabpad siaga perang di Laut Natuna Utara ✓ Patroli laut dan udara sesuai axis ancaman ✓ Kehadiran unsur setiap saat di laut sesuai axis ancaman

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Antisipasi setiap bentuk <i>spill over</i> dari perang di LCS ✓ Mengalihkan pelayaran niaga dari ALKI I dan Selat Malaka yang ke arah LCS ✓ Pelarangan armada niaga Indonesia berlayar di LCS ✓ Laksanakan diplomasi dengan Amerika dan China
--	--	--



Pertanyaan Penelitian 3. Bagaimana Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

INDIKATOR : *Teori Strategi: Ends, Means, Ways*

1. Apa dan bagaimana goals/target yang ingin dicapai pemerintah RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
2. Apa saja ancaman yang dihadapi RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
3. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan atau perlu dikembangkan dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

INDIKATOR : *Teori sinergitas, Teori antisipasi, Teori Stabilitas, Teori keamanan nasional*

4. Bagaimana strategi sinergitas yang dilakukan oleh K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
5. Bagaimana potensi atau kesempatan strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
6. Bagaimana prediksi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dan sejauh mana kesiapan K/L dalam mengantisipasi hal tersebut?
7. Bagaimana upaya K/L untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
8. Apa saja target capaian dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?
9. Apa saja langkah strategis yang dilakukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

10. Dalam pelaksanaan sinergitas, K/L mana yang seharusnya mempunyai mandat untuk mengoordinasikan strategi tersebut dan bagaimana implementasinya?

JAWABAN:

c. Target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan adalah terwujudnya keterpaduan seluruh komponen pertahanan nasional dengan menempatkan K/L sebagai *leading institution* sesuai tahapan eskalasinya dalam suatu kesatuan usaha maupun kesatuan komando sesuai dengan tugas pokok, kemampuan dan peranannya masing-masing. Pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mengantisipasi dampak dari persaingan AS-China di LCS harus disesuaikan dengan ancaman di tiap level eskalasi sejak tahap masa damai hingga kemungkinan konflik terbuka atau perang sebagai puncak eskalasi.

d. Ancaman yang perlu diwaspadai oleh Indonesia sebagai antisipasi terhadap persaingan Amerika-China di Laut China Selatan dapat berupa ancaman aktual berupa ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Bentuk ancaman tersebut seperti pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, kegiatan intelijen/spionase, separatism dan pemberontakan, perompakan dan pembajakan bersenjata, ancaman siber, senjata biologis dan bahkan ancaman potensial yang belum terjadi saat ini namun dapat saja terjadi sewaktu-waktu dalam situasi tertentu menjadi ancaman nyata berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing) termasuk akses atau dampak dari perang konvensional antara pihak/negara lain di kawasan terutama di wilayah yang berdekatan/berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Indonesia.

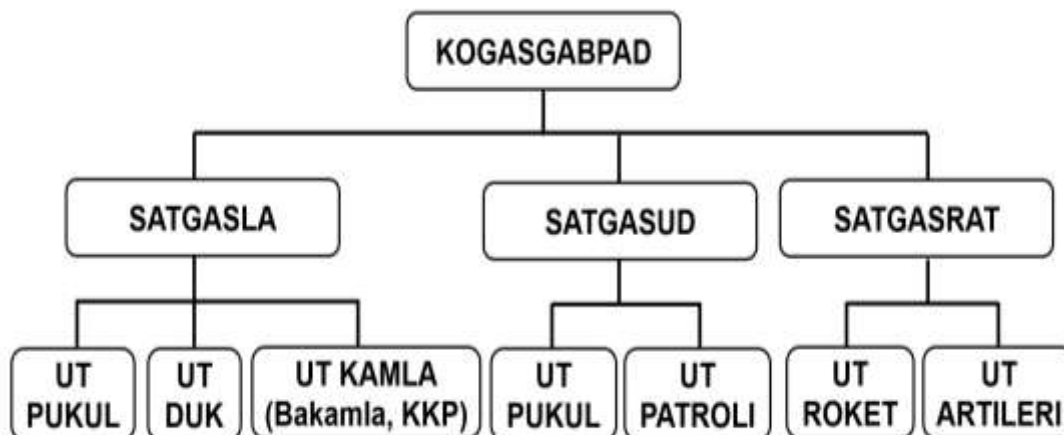
c. Sumber daya yang dibutuhkan atau perlu dikembangkan dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional antara lain alutsista, sumdanas, fasilitas pangkalan termasuk sarana prasarananya, sistem senjata, SOP Kumla.

d. Dalam menyikapi konflik yang terjadi di LCS, TNI AL membagi eskalasi menjadi beberapa tahap, yaitu Damai, Rawan, Krisis, Perang. Berdasarkan perkembangan situasi saat ini, kondisi di LCS memasuki tahap rawan yang terlihat semakin seringnya terjadi pelanggaran wilayah yang dilaksanakan oleh

unsur negara lain, seperti kapal-kapal China Coast Guard (CCG), kapal US Navy, yang direstui oleh otoritas pemerintah setempat. Oleh sebab itu diperlukan sinergitas antar K/L baik unsur di lapangan, maupun yang dilaksanakan oleh staf pusat serta pendekatan pada semua bidang, seperti bidang Diplomasi, Informasi, Militer, dan Ekonomi (DIME) sebagai respon secara komprehensif terhadap potensi ancaman tersebut antara lain:

- 1) Bidang Diplomasi. melalui Kemenlu sebagai *leading institution* membuat Nota Protes kepada China maupun Vietnam, memaksimalkan upaya diplomasi secara multilateral melalui forum ASEAN, dan meneruskan upaya diplomasi penyelesaian delimitasi secara damai melalui forum-forum bilateral.
 - 2) Bidang Informasi. Melalui upaya komunikasi strategis dalam rangka mencapai tujuan kepentingan strategis Indonesia di wilayah yang rawan pelanggaran kedaulatan, khususnya di LNU dan LCS.
 - 3) Bidang Militer. Melalui peningkatan patroli keamanan laut di LNU dan LCS yang merupakan *focal area* dan rentan terhadap ancaman dari arah Utara, mengedepankan unsur penegak hukum maritim dengan dukungan TNI AL, yang akan aktif menyesuaikan dengan eskalasi situasi di daerah operasi.
 - 4) Bidang Ekonomi. Melalui peningkatan aktivitas nelayan kapal ikan Indonesia baik dari wilayah lokal sekitar Natuna maupun wilayah lain dan investasi Sarpras serta fasilitas perikanan lokal.
- e. TNI AL memiliki kewajiban untuk memberikan saran kepada Mabes TNI untuk menghadapi setiap bentuk *spill over* konflik di LCS. Langkah terbaik yang dapat dilaksanakan oleh Mabes TNI adalah membentuk Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad). Kogasgabpad dibutuhkan agar dapat mengoordinasikan seluruh kekuatan baik sipil maupun militer agar dapat bersinergi dan bekerja sama dalam mengantisipasi *spill over* konflik di LCS. Selain itu Kogasgabpad akan dapat memberikan kemampuan kepada TNI untuk melaksanakan penindakan dengan kekuatan yang proporsional.

- f. Organisasi tugas Kogasgabpad adalah sebagai berikut:



Organisasi tugas Kogasgabpad

- g. Tugas pokok Kogasgabpad pada situasi krisis dan perang adalah melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara untuk mengantisipasi meluasnya konflik antara China dan Amerika Serikat dan sekutunya ke wilayah Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- h. Susunan satuan tugas Kogasgabpad terdiri dari:

4. Satgas Udara, dengan kekuatan utama adalah TNI AU dengan tugas utama untuk melaksanakan *surveillance* kondisi maritim dalam rangka mendukung *Maritime Picture Compilation* (MPC) untuk mendukung pengambilan keputusan operasi dan menjamin keamanan patrol udara.

5. Satgas Laut, dengan kekuatan utama adalah TNI AL dengan tugas utama adalah melaksanakan patrol rutin, *surveillance*, pengusiran terhadap kapal ikan, kapal negara maupun kapal perang kedua negara dan melindungi nelayan Indonesia serta pengguna laut lainnya di perairan Indonesia khususnya Laut Natuna Utara serta menyajikan MPC secara akurat. Disamping itu, Satgasla melalui UT Kamla yang terdiri dari Bakamla dan Kemen KP, secara khusus melaksanakan penegakkan hukum dalam menghadapi kekuatan maritim sipil (*white hull*) Amerika Serikat dan China yang masuk ke wilayah yurisdiksi nasional Indonesia.

6. Satgas Darat, dengan kekuatan utama terdiri dari pasukan darat yang berasal dari TNI AD, TNI AL (Marinir) dan TNI AU (Paskhas)

dengan tugas utama untuk melaksanakan pertahanan udara di pesisir pantai.

- i. Konsep operasi Kogasgabpad yang dilaksanakan adalah melaksanakan patroli dengan penempatan Satgas Kamla sebagai kekuatan terdepan dengan *back up* oleh unsur-unsur TNI AL dan *support*/dukungan patroli udara maritim. Penempatan unsur dapat berubah menjadi kekuatan TNI AL berada di depan apabila kekuatan yang dihadapi adalah kekuatan kapal perang baik dari Amerika Serikat maupun China. Satgas udara melaksanakan patroli udara secara terus menerus untuk mengamankan payung udara sedangkan satgas darat melaksanakan perkuatan kekuatan anti udara di darat untuk mengantisipasi ancaman udara yang mungkin akan masuk sampai daratan.
- j. Sebagai panduan bagi unsur di lapangan, maka Pemerintah dan Mabes TNI beserta Bakamla, Kemen KP, beserta satuan operasional lainnya perlu memiliki RUF dan ROE yang sama sehingga dapat digunakan oleh seluruh instansi tersebut dalam menghadapi setiap situasi sebagai imbas dari eskalasi konflik di LCS.

LAMPIRAN 2.10 TRANSKRIP DANGUSPURLA

LAKSAMANA PERTAMA TNI DATO RUSMAN, S.N KOMANDAN GUGUS TEMPUR LAUT KOARMADA I

Apabila kita berbicara tentang strategi sinergitas K/L dalam rangka antisipasi persaingan Amerika dan Tiongkok, saya melihat dari perspektif keamanan kelautan, jadi saya hanya mengambil dari perspektif keangkatan lautan, sehingga ini adalah pandangan pribadi saya, yang bisa dijadikan bahan masukan buat mbak Renny dalam Menyusun disertasi nya. Sebelum kita membahas strategi sinergitas di LCS ini sebaiknya kita melihat apa yang terjadi di lapangan.

Saat ini saya berada di garis Landas Kontinen yang disepakati bersama oleh Indonesia dan Vietnam. Disini kita lihat hampir tiap hari kita meng update situasi di LCS dan kita lihat bahwa tiap hari pada semester satu ini ada setidaknya ada tujuh kapal Coast Guard Vietnam yang berbaris sepanjang garis batas Landas Kontinen RI dan Vietnam yang sudah kita sepakati dan mereka secara terus menerus selama 24 jam 1 minggu satu bulan dan setiap hari selama satu tahun dan ini tidak berubah formasi ini dan pada 40 hari terakhir ini kami juga sedang melaksanakan pengusiran dan shadowing pada kapal coast Guard China yang sedang masuk wilayah landas kontinen kita kebetulan di wilayah ada satu Coast Guard dengan nomor lambung 5305 sebelumnya ada yang nomor lambung 5202 yang berada di landas kontinen kita selama 35 hari yang bergantian dengan kapal sebelumnya. Mereka berada di sini dalam rangka menghentikan kegiatan RIG Noble Warbrugs yang berada di wilayah landas kontinen kita jadi mereka selalu berkomunikasi dengan pihak RIG ini untuk segera menghentikan kegiatan aktifitas pengeboran minyak yang menurut mereka adalah wilayah yurisdiksi nasional China dan mereka terus memprovokasi kami berusaha untuk mengusir mereka dan sering terjadi kontak komunikasi mereka sering mengatakan kapal perang Indonesia kapal Coast guard supaya segera meninggalkan wilayah Yurisdiksi nasional China dan kami selalu menyampaikan dengan bahasa yang sangat Santun namun sampai dengan saat ini mereka belum mau bergerak untuk meninggalkan wilayah kita. Hal ini mungkin bisa menjadi catatan untuk ke Menkopolkam dan kementerian Luar Negeri karena sudah beberapa kali kami membuat nota dan laporan kepada Cilangkap dan Mabes angkatan Laut dan diteruskan untuk membuat laporan mengusulkan kepada kementerian Luar Negeri nota protes kepada pemerintah China karena tidak hanya lewat komunikasi

saja beberapa kali kami berada di van guard, mereka bermanuver yang sangat berbahaya bahkan nyaris menabrak.

Kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah China yang mengeluarkan dan mengesahkan undang undang coast guard dan membolehkan kapal coast guard ke China menggunakan kekuatan bersenjata nya untuk selama mereka melaksanakan patroli di wilayah yang diklaim oleh mereka di wilayah China Selatan ini akan sangat berbahaya dan sementara unsur unsur kita yang berada di sana juga sama, kita sama-sama menahan diri jadi ini mungkin di level diplomatik dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk tindaklanjutnya

Sebelum kita berbicara masalah bagaimana konsep strategi dalam sinergitas kementerian lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika dan China di laut China Selatan ini alangkah baiknya kita akan membandingkan kekuatan China dan Amerika secara global di mana kita lihat saya mengambil dari sumber internet Military balance 2019 yang secara kuantitatif memang China lebih banyak dan kuat dibanding Amerika tetapi secara kualitatif tidak bisa bicara seperti itu karena banyak parameter yang bisa dipakai sebagai bahan dalam analisa untuk mengatakan mana yang lebih kuat. Namun kita lihat di sini ada perimbangan kekuatan China dan kekuatan Amerika secara global

selanjutnya juga ini merupakan hasil pantauan kami sampai tanggal 11 Agustus kita sudah plot bagaimana situasi deployment dari unsur unsur dari kekuatan China dan kekuatan Amerika yang berada di Laut China Selatan maupun Laut China Timur. Disini terlihat bahwa Amerika mendeploy 21 kekuatan angkatan Laut nya dengan menghadirkan tiga carriers fight group yaitu Nimitz dengan unsur unsur tabirnya selanjutnya Carvansen dengan unsur unsur tabirnya demikian pula dengan Theodore Roosevelt dengan unsur unsur tabirnya dan ternyata tidak hanya itu saja Amerika juga mendatangkan atau mengajak sekutunya kita lihat telah disampaikan oleh pak pribadi bahwa ada kapal armada Inggris yang ikut datang dengan enam kapalnya total semuanya kalau kita lihat di wilayah laut China Selatan wilayah timur ada delapan di bawah komando HMS Queen Elizabeth tetapi tidak itu saja India juga hadir yang cukup mengagetkan kita adalah Jerman juga mendatangkan kekuatan laut nya ke Laut China Selatan Padahal kalau kita lihat sejarah perang dunia kedua Jerman sangat sedikit atau jarang sekali terlibat di dalam latihan latihan dengan negara negara besar terutama keluar dari Eropa dan ini menjadi catatan kita. Dari peta ini kita dapat melihat bahwa situasi di laut China Selatan sebenarnya **volatile**, kita bisa katakan seperti itu bahwa sewaktu waktu bisa tereskalasi. Apalagi saat ini sejak minggu kemarin sampai dengan 13 Agustus seperti data yang kita terima bahwa China dan Rusia melaksanakan latihan besar besaran di Laut China Selatan dengan Sandi Saiju Operation 2001 ini mereka melibatkan personel dan persenjataan yang sangat massif, kurang lebih sekitar 15000

prajurit yang diikutsertakan dan beberapa kapal perang Yang dilibatkan dan bahkan cukup provokatif terhadap Amerika karena China membuat sebuah bangunan yang menyerupai USS Nimitz yang yang diserang habis habisan dengan menggunakan pesawat tempur J 20 mereka dan ini memancing Amerika menggelar latihan yang besar juga disekitar Guam, disini terlihat bahwa Balancing of power antara China Dan Amerika beserta sekutunya ada.

Bagaimana dengan Indonesia? di sini saya merasa walaupun tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia merupakan bukan negara klaiman state namun sebenarnya apabila kita melihat situasi di laut China Selatan ini kita tidak bisa tutup mata dan tidak bisa membiarkan karena Spill over dari konflik apabila terjadi antara dua kekuatan besar ini akan berdampak secara signifikan terhadap Indonesia karena saat ini saja yang seperti saya sampaikan bahwa Hijing 5305 dia dengan berani dengan lugas mengatakan ini adalah wilayah Yurisdiksi nasional mereka dan kita diperintahkan untuk keluar dan diusir, kalau mau dibilang gemas, saya sebagai Komandan Guspurla juga gemas. kalau ditanya apa langkah selanjutnya? sebetulnya langkah saya maunya saya tembak itu kalo diijinkan tetapi tidak mungkin karena kita tetap Patuh terhadap RoE yang telah dikeluarkan Kemenkoplhukum sebagai landasan kita bertindak begitu juga RoE partikulir yang dikeluarkan oleh Mabes Angkatan Laut.

Selanjutnya kami menyampaikan bagaimana kehadiran kapal kapal pemerintah asing hasil dari pantauan Tactical Operation Center (TOC) Gurpurla selama 1 semester kemaren sampai dengan 8 Agustus 2021. Disini terlihat bahwa jumlah kehadiran kapal kapal pemerintah asing dan kapal kapal perang di wilayah Yurisdiksi nasional Indonesia di wilayah Natuna utara ini cukup banyak terutama Vietnam sampai dengan 1126 kali dari 80 kapal yang hadir. China pun 168 kali, Amerika Serikat 50 kali sesuai data statistic yang ada, dan ini adalah data data riil yang kami pantau dan kami analisa dan ini berhubungan dengan bagaimana tindakan kita untuk menggelar kekuatan kita yang berada di Laut Natuna Utara.

Sehingga disini setelah melihat situasi yang terjadi di Laut Natuna Utara, kami coba mengkonsepkan konsep strategi apa yang bisa dijadikan masukan dalam sumbang ikir dlaam RTD ini.

Ada beberapa strategi Yang kami rumuskan di sini yang pertama adalah menetapkan suatu kebijakan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang komprehensif dengan cara mensinergikan dan meng-amandemen peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penegakkan kedaulatan dan hukum. Penetapan kebijakan ini dilakukan dengan meninjau kembali beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Penetapan kedaulatan dan hukum yang selama ini dilakukan oleh beberapa Instansi pemerintah untuk selanjutnya diamandemen dan di

rumuskan kembali untuk menjadi suatu kebijakan perundang-undangan yang secara Sinergis yang dapat dilaksanakan secara operasional dan dilaksanakan oleh semua stakeholder yang mempunyai kewenangan adapun upaya yang bisa diwujudkan untuk mengi ujudkan strategi yang pertama ini adalah, ada beberapa upaya yang pertama adalah kemenkopolhukam, kemhan, Dan Mabes TNI serta Instansi yang terkait bersama sama menyusun dan merevisi kembali merancang hukum dan perundang-undangan sistem pertahanan negara dan keamanan negara selanjutnya Kemhan bersama stakeholder nasional lainnya mensosialisasi kan pentingnya pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang saat ini sedang dibicarakan oleh pemerintah dan merumuskan undang undang pengelolaan Sumber Daya Nasional tentang pertahanan negara serta mengintegrasikan sistem informasi pertahanan negara dengan sistem Deteksi dini TNI dan Kementerian Dan lembaga serta pemerintah daerah. Serta juga mengoptimalkan pertahanan cyber yang terencana dan terpadu menjadi penting karena kita saat ini berada di Era Globalisasi dan dimana teknologi yang menjadi pusatnya.

Selanjutnya untuk strategi yang kedua adalah men-sinergikan semua komponen bangsa dalam hal ini pemerintah TNI dan rakyat dalam penyelenggaraan Sis Hankam Neg dengan cara percepatan Perumusan RUU Kamnas dan pengesahan RUU pertahanan negara agar seluruh komponen pertahanan bangsa mengetahui posisinya dalam sistem pertahanan keamanan negara. Dan untuk mewujudkan ini ada beberapa langkah yang kami coba tawarkan dan mungkin bisa dijadikan masukan karena kita tadi sudah berbicara tentang kebijakan nasional dan saat ini kita sudah dari aspek maritim belum ada pemerintah kita belum punya national ocean policy dan ini saya rasa menjadi hal yang penting supaya kita tahu apa yang harus kita laksanakan dalam menjaga stabilitas keamanan kita dan kita sadar bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia.

SBab vstrategi yang ketiga adalah saya coba menawarkan adalah membangun pusat majemen pertahanan nasional di mana atau yang kita sebut national defence management center yang merupakan wadah sinergitas antara sipil dan militer dalam aspek pertahanan negara. Ini kalau kita lihat sampai dengan saat ini memang belum punya badan yang menyelenggarakan ini atau sekurang kurangnya sebuah Task Force/Angkatan Tugas sehingga apabila terjadi kerawanan atau hal hal yang mengganggu kepentingan nasional ini secara parsial TNI akan bergerak bahkan apabila kita lihat pemerintah hanya mendukung saja padahal kalua kita lihat di TNI sendiri sudah punya rencana kontinjensi yang kita buat selama tiga tahun dan tiap tahun itu di update tentang bagaimana TNI dalam mengantisipasi rencana kontinjensi apabila terjadi di negara kita. Dan disini selayaknya bahwa seluruh kementerian lembaga seharusnya punya rencana kontinjensi yang sama, sehingga mana kala terjadi kontinjensi di wilayah

nasional kita itu bersama sama dapat mengambil tindakan yang secara Sinergis Dan di sini perlu adanya suatu badan yang memang betul secara continue mempunyai tugas mengatur situasi kontinjensi dan menganalisa serta merespon dan memberikan masukan terhadap pemerintah kepada Presiden tentang situasi yang ada situasi keamanan yang terjadi di wilayah nasional kita dan di sini saya coba merancang bahwa apabila memang kita perlu bahas tentang national defence management center ini organisasi ini akan berada di bawah Kemenko Polhukam. Karena disini saya menyarankan adanya penggabungan beberapa badan yang memang ada saat ini misalnya BNPT dan badan Siber nasional dibawah National Defense Management Center ditambah satu badan lagi yaitu center for asymmetric warfare.

Jadi ini adalah beberapa saran saya sebagai bahan masukan tentang bagaimana strategi menghadapi perang hibrida Dan ini mungkin bisa dijadikan bahan masukan untuk bu Renny apabila judul disertasinya bisa mereferensi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan satu lagi poin yang bisa saya sarankan kepada floor di sini bahwa apabila untuk mengatasi Spill over konflik antara China dan Amerika di laut China Selatan ini apabila dalam kondisi seperti yang kita hadapi, ini maka akan menyulitkan kita yang berada di lapangan karena sesuai sesungguhnya penyelesaian batas maritim antara Indonesia dengan negara negara yang berada di sekitar wilayah kita ini belum selesai sehingga kita seperti Pendekar mabuk mana kala kita berhadapan dengan Coast Guard China yang berada di Vanguard bang ini kita harus mengusir Vietnam kita juga harus mengusir China. Vietnam pun sama dia mengusir kita dan juga mengusir China dan ini saran saya sebaiknya perlu ditetapkan atau dibuat kesepakatan antara Vietnam dan Indonesia untuk menyelesaikan batas maritim antara RI-Vietnam sehingga apabila permasalahan ini selesai China bisa dijadikan sebagai musuh bersama atau sebagai ancaman bersama dan menetapkan kebijakan bersama antara negara negara Asean untuk mengatasi China khususnya di wilayah Yurisdiksi nasional Indonesia demikian sebagai masukan dari saya dan mungkin bisa sebagai bahan untuk diskusi.

Terimakasih atas perhatiannya, wassalamualaikum wr.wb

LAMPIRAN 2.11 TRANSKRIP KEMENLU

BEBEB JUNJUNAN

DIREKTUR HPI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya share kepada bapak ibu sekalian khususnya bagaimana perspektif kita dalam arti pemerintah republik Indonesia untuk melihat secara clear bahwa ada power Equity di sini. Jadi mencoba untuk menselaraskan "Who becoming What", siapa yang akan bermain di sini, Tiongkok kah, Indonesia kah dalam konteks ASEAN, atau kemudian Amerika Serikat bersama para sekutunya. Kami akan mencoba melihat dari efeknya seperti apa sih dalam konteks domestic, artinya ada esensi internasional dan domestik dan selanjutnya kita melihat ada bahasa yang diangkat oleh teman teman dariberbagai komponen yang disebut dengan **contingency war** karena itu kan sesuatu yang berlanjut apakah itu kontijensi yang dalam konteks yang sifatnya soft ataupun hard.

Pertanyaannya sangat sederhana ada apa sih di Laut China Selatan ini? itu yang mungkin perlu kita Refleksikan ke dalam situasi yang bersifat pertama yaitu anatomi konflik, kemudian yang kedua adalah proyeksi polugri kita itu apa, ini yang selalu berubah dari tahun ke tahun tadi kita juga sudah dengar dari pak pribadi di awal bahwa kita punya kebijakan nasional, betul tidak ada. Makanya kita bisa sebut gosting seperti ada tapi tiada. **Ada di setiap masing masing tetapi tiada sinergitas**, sehingga pertanyaan bagaimana sinergitas kementerian/lembaga dan kebijakan di LCS itu bagaimana. Kami mencatat di Kemlu, bahwa sengketa ini adalah sangat technical tapi kita berbicara tentang masalah kebijakan politik yang lain betul.

Anatomi konflik di Laut China Selatan dari perspektif Kemlu adalah pertama karena anatomi konflik yang bersifat teknis yaitu adanya Claim, yang kemudian adalah geografis nya kemudian claim itu bersifat siapa yang bermain di sana atau klaimants nya, ada enam negara dan kita tidak termasuk di situ sehingga kemudian karena ini bersifat mengenai fitur fitur yang relevan dengan konsep UNCLOS sehingga pertanyaannya posisi Indonesia itu seperti apa, bagaimana di bagian apa sih supaya kita mempunyai pandangan yang sama di satu Sisi karena kebutuhan peningkatan anggaran di ceritakanlah akan ada perang besar disisi lain kita berbicara mengenai investasi memainkan peran di situ sehingga anatomi konflik yang lain yang ada di situ selain ketiga eh ke empat posisi ini itu bagaimana sebetulnya anatomi konflik yang relevan terhadap konflik iklim fitur yang ada yang hak zona maritime. Kemudian kita berbicara tentang keamanan regional jadi kalau konsep Laut China Selatan ini seperti ini, jangan kemudian kita melihat anatomi konflik tetapi kita menjadi inward looking, kenapa kita harus

bersibuk-sibuk Ria karena konsep ini karena konflik ini padahal anatominya sudah clear kok dan by Internasional law, it proved. Sehingga kemudian kalau lihat dari anatomi konflik yang ketiga, hanya berbicara tentang Amerika Serikat dan RRT, hanya berbicara tentang Amerika Serikat dan RRT. Kalau Claimants state yang lain kemudian Indonesia itu access baggage. Konflik utamanya di sini, bahwa menurut Amerika kepada China untuk menciptakan stabilitas, Amerika mengatakan akan melawan Tiongkok karena bertentangan dengan Fonov, merancang yang mereka sebut Freedom of navigation dan itu sudah dijelaskan bahwa konsep itu sudah tidak berjalan dengan baik sehingga situasi di kawasan seperti apa yang ada itu sudah power production of power projection karena dari tahun konflik perang dalam konteks itu bukan dalam konteks perang tembakan tembakan istilah lainnya adalah deterrence bukan perang-perangan tembakan tembakan seperti Gun boat diplomasi.

Yang kedua adalah pada tahun sembilan puluhan ke sini itu sudah mulai menurun tidak ada lagi melibatkan angkatan Laut tetapi kembali dengan napa yang tadi disebut Gun Boat Diplomacy, yang masuk ke dalam civilian enforcement agency sehingga bagaimana meredam konflik ini ya udah lah ASEAN aja gitu lo kenapa karena dalam konsep ASEAN saat ini karena declaration of conduct yang ada saat ini kita sudah proses ke dalam sebuah upaya membuat Code of Conduct dan sudah berjalan dengan baik hanya tinggal 3 issues, legally binding, geographical scope dan siapa yang ada di situ kalau legally binding China nya nggak mau, geographical scope kita nya yang nggak mau karena kalau itu menyangkut code of conduct itu geographical scope nya mengatakan bahwa Laut China Selatan termasuk kelautan Natuna utara maka kebakaran jenggot kita dan Kemlu melihat ini sebagai suatu potensi untuk conflict of political. Nothing to do yet, dalam konteks yang bersifat terbuka sehingga dan yang pasti ini bukan forum penyelesaian sehingga sebagai posisi ini dalam tesis ini antisipasinya seperti apa sih dalam konteks narasi publik nya saat ini

Dan kami mencatat ada tiga komponen komponen pertama narasi publik nya adalah bawah menurut Tiongkok Amerika sudah tidak datang lagi, LCS hanya untuk kami di regional padahal fakta menyatakan bahwa di dalam konsep untuk Unclos ada dua isu di situ satu Freedom of navigation yang kedua adalah High Seas, setelah keputusan Tribunal kemudian posisi Indonesia kepada Amerika Serikat, dia mengatakan kita mendukung ASEAN untuk menghadapi claim illegal RRT, dan mereka punya kepentingan dengan FONOPS nya tadi, sehingga kemudian Indonesia melihat potensi di ASEAN dan ASEAN lah akhirnya mengatakan dalam prosesnya bahwa menurut Tiongkok kalau kita Daring aja negoisasi dengan bilateral nggak terjadi silahkan anda buktikan tidak ada bilateral negoisasi antara Tiongkok dengan Taiwan padahal dia Claimants. Tiongkok dengan Brunei nggak ada, yang ada adalah Tiongkok memberikan

investasi ke Filipina dan Filipina mengakui sehingga coast guard nya diterima dengan karpet merah di Manila

kita melihat on disputes over features nya yang kita bahas, dan bukan negoisasi dalam konteks yang Nine dash line against UNCLOS, ga ada itu. Dari situ bagaimana kemudian Indonesia melihat di laut China Selatan, bahwa Politik Luar Negeri kita ada empat ini procedural yang kemudian kalau kita pastikan bahwa intinya adalah bahwa kita perlu menegakkan hukum di ZEE kita bukan show of force wilayah kita kalau show of force di wilayah kita, berarti sudah mengakui bahwa ada pihak lain yang mengklaim ZEE kita di luar yang diberikan hak oleh UNCLOS. yaitu Malaysia dan Vietnam against us on overlapping. Jangan kita terjebak di situ sehingga posisi Indonesia dalam seperti yang dikatakan pak pribadi sudah clear, tegas menolak hasil Tribunal dan tidak ada batas wilayah yang overlapping dengan Tiongkok sehingga kemudian kalau kita melihat fitur geografis Indonesia di wilayah tersebut batas batas maritim kita adalah cuma dengan Malaysia dan Filipina, that's it. Jangan terbawa kedalam drama, sehingga kita harus clear bahwa we have nothing to do dengan konsep LCS yang lebih luas dan lebih spesifik ga ada, karena ini batasnya clear kok sehingga teman teman yang berada di enforcement agency harus paham betul bagaimana batas maritime disini adalah legally claim by UNCLOS. Legal and nothing to worry about.

Kalim nya sudah legal, yang ilegal itu yang Tiongkok karena lidah rolling stone karena melet melet dan loncat loncat dan tidak tahu dia nyanyi apa. Dan Legal Claim ini kemudian kalau kita bicara tentang klaim nine dash line yang diangkat oleh mereka itu sudah clear saya buat data. Klaim nine dash line ini, sudah clear basically you don't need to worry about, dan kita konsisten sejak tahun 1993 sampai 2020 dari posisi klaim isu lainnya apa dan di Tiongkok ini. Isu lainnya hanya ini antara para klaim nine dash line yang mengakui ZEE Indonesia, dan efek nya ke kita, tapi bukan isu bilateral karena merupakan permasalahan yang lebih besar, dan itu noncompliance, so what you afraid of itu yang penting bagaimana kalau kita kebijakan nasional kita dari Sisi ini, kronologis yang ada dan kita pahami bersama kita sudah mulai resmi mempertegas protes ini sejak 1993 sampai 2020 terakhir konsisten kita bicara karena ini kemudian memperlihatkan sikap kita yang sangat relevan.

Dari konsep itu arti pentingnya apa sih dalam posisi ini jadi arti penting dari nilai protes tersebut adalah konsistensi kita tidak pernah berhenti selalu konsisten menolak yang kemudian tanggapan dari RRT melalui sikap kita yang kemudian isinya itu konsisten menolak 3 poin ini. Ini posisi kebijakan nasional kita yang sudah diterapkan secara konsisten oleh Kemlu sebagai Punggawa politik luar negeri kita. Sudah clear yang penting adalah nomor tiga Indonesia tidak memiliki over Lapping sehingga kemudian so nothing to do with RT. tanggapannya apa sih dari arti penting dari hal ini adalah tiga ini

yang kemudian diformulasikan dan dikonstruksikan supaya kita tidak terikat oleh klaim kalau kita kemudian tidak persistent apa yang disampaikan oleh Tiongkok dari A-Z mulai 1947 dari embrionik dan Consolidated, so we are changed by the claim, kita terjebak.

Kemudian tanggapan RRT bagaimana sih namun ini belum pernah terjadi banyak pihak yang kelam tetapi belum terjadi, apalagi dengan UNCLOS kemudian mendeklarasikan ADIZ silakan aja selama merupakan nasional interest bukan memaksakan kehendak kemudian penegakkan hukum pada gold coast itu tidak pernah terjadi kemudian memaksa Filipina untuk mengabaikan peraturan juga nggak kemudian strategi lain yang dipakai oleh RRT adalah mereka selalu mengatakan put aside bilateral cooperation, artinya terus aja mengklaim ini yang harus kita hadapi kemudian CoC itu to convince the world that Asia is stable. Tadi sudah dijelaskan oleh pak Dato Rusman, sudah jelas banget, tapi jangan sampai terbawa pada posisi itu kemudian dari Sisi strategi tersebut kami melihat adanya suatu sistem menjadi **Low Level contingency war** proyeksinya seperti ini, low level tidak akan pernah naik ke high level emang akan ada perang? saya pikir nggak tetapi secara pribadi saya mengatakannya dan penelitian teman teman di BPPK Kemlu, it's worth to be part of your dissertation.

Low level itu seperti apa sih pertama kita harus menganalisa persaingan Amerika Serikat dan China tarik ulur seperti pacaran tadi tarik menarik jadi selama 30 tahun model konflik ini bergeser kemudian perubahan strategi terukur oleh Tiongkok dan negara negara yang pada intinya Tiongkok ini pintar sekali dalam sistem konflik kemudian ada perubahan strategi kemudian ada merubah Gun Boat Diplomacy tadi. kemudian menggunakan bahasa bahwa Win Win solution for any approach dsb. tapi sebetulnya ada kepentingan lain yang merugikan ASEAN, Laos sama Kamboja sudah dimakan oleh Chona dragon sudah habis dari 10 negara dua negara sudah tidak bisa kita otak Atik selalu mentok di situ sehingga kemudian kepentingan Indonesia itu kepentingan Indonesia bukan prioritas kebijakan luar negeri RRT clear kalau buat dia dalam investasi. Tapi dia tetap maintain dan dia tahu bahwa kita belum mempunyai konsep satu yang sama sehingga dari bahasa tersebut ada pandangan Amerika Serikat terhadap RRT ini, RRT memanfaatkan Covid-19 untuk memperkuat kehadiran di LCS memang fokusnya akan ada transfer of Virus di laut kemudian mereka memakai Fonops untuk menentangnya tetapi gagal juga, tidak efektif sama sekali. kemudian hasilnya yang kita pertimbangan nampaknya low level contingency ini akan bersifat seperti bahaya laten tetapi tidak pada high level, ancaman laten ada dan tiada seperti ghosting memberi harapan sehingga tarik ulur. Kemudian way forward nya seperti apa sih, melihat pada konteks Indonesia, padahal ini juga bisa menjadi proyeksi. Yang pertama adalah bahwa strategi Indonesia itu perspektif nya adalah hukum dan keamanan tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada indikasi antara hukum dan keamanan titu based on

how we look on geo politics, pengembangan aktivitas ekonomi akan berjalan kalo bapak bapak mencoba membuka satelit China satelit malam hari bandingkan antara Kalimantan utara kemudian Filipina Laut Sulawesi dengan kawasan Main land asia. Dari mulai Semenanjung Malaysia, naik ke Thailand kemudian yang merambat pada pesisir masuk ke Kamboja kemudian masuk ke Vietnam semua terang benderang sehingga kemungkinan agak susah yang terpenting adalah kalau kita berbicara mengenai bagaimana pengembangan maritim domain awareness jadi manfaatkan itu saja untuk pertahanan kita karena ada diplomasi yang perlu didorong pada Sisi itu

Yang kedua adalah langkah kita sudah bagus, pertama karena kita menghadapi Tiongkok di Laut China Selatan kemudian kita juga ada kepentingan utama kemudian surat Menkopolkam 23 Juli 2019 ini salah satu yang menjadi kebijakan nasional kita tadikan 2007 maunya pula bergerak kencang di ZEE tapi kata kemlu nggak boleh tetapi belum boleh jadi surat Menko ini sudah menjadi gambaran bahwa legally binding doing this toward UNCLOS kemudian ada keamanan kemudian tantangannya apa sih sebelum kesimpulan

bahwa ada perubahan balance of power pada jangka panjang sampai 2030 kemudian ada kemampuan anggaran negara terutama untuk menangani Pandemi Pandemi Covid, sehingga kalau kita berbicara mengenai High Level of Contingency War, ini sudah tidak mungkin lagi ada proses pembangunan nasional di kita. sehingga kemudian apa yang menjadi tantangan karena kita mempunyai politik luar negeri bebas aktif, so we don't have to think about kita mau jadi teman Amerika atau menjadi teman China nggak ada masalah bagi kami karena memang ini berupaya menarik Indonesia ke dalam situ so don't dance on their floor, kita bermain di wilayah kita saja.

Sehingga kesimpulannya adalah ada lima yang perlu dicatat yaitu konflik terbuka itu sangat kecil kecuali ada penenggelaman kapal merupakan kesalahan, dulu juga ada tabrakan di udara, antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak akan menjadi perang terbuka itu tidak langsung yang paling penting adalah butir kelima bahwa negara harus hadir di situ di overlapping claim kita, that's it. Perkuat di situ Maritime domain awareness menggunakan konsep pengembangan wilayah Natuna dalam hal ini Pula Natuna dan Sekatung menjadi kekuatan nasional kita yaitu menunjukkan bahwa we are alive there. Politik, pertahanan, ekonomi, sosial budaya kita pernah berprinsip supaya kita bisa mengirim nelayan untuk menghadapi nelayan Vietnam di sana tetapi tidak ada yang mau karena kejauhan tidak tahan tetapi kehadiran angkatan Laut, bakamla wira-wiri di situ kepada teman teman di angkatan Laut silakan jalan jalan sampai ke klaim ZEE kita, monggo mau dikawal pokoknya 365 hari harus ada di situ. demikian kesimpulan jadi intinya adalah bahwa sinergitas dari kebijakan itu memang saat ini masih terpecah tetapi kita bisa fokuskan terhadap konsep yang sama yaitu pertama adalah hadir atau

konsisten di situ biar lah kami dalam menangani LCS yang sifat nya secara internasional maupun regional

terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatu

LAMPIRAN 2.12 TRANSKRIP PENGAMAT MILITER

DR. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI PENGAMAT MILITER

Disini saya akan menyampaikan Klaim China atas laut China Selatan VS *Freedom of Navigation* Amerika Serikat, meskipun tadi sudah dibicarakan Panjang lebar dari pembicara sebelumnya, tapi disini saya mengajak untuk melihat bahwa ketegangan Amerika dan China di perairan utara Natuna Kepulauan Natuna Laut China Selatan harus menjadi perhatian penting Indonesia meskipun kita bukan negara *Claimant state*, tetapi kita tetap harus hadir seperti yang disampaikan oleh pak Bebeb tadi. Mungkin pada tahun 2011 ada pertemuan di Lombok saya sebagai anggota komisi satu saya melihat bagaimana pertarungan dalam pembahasan ASEAN, pada posisi duduk saja mereka menggambarkan bahwa “*we are American*” and “*we are China*” China dan Amerika ketika makan saja mereka agak tegang dan enggan, melihat yang hal yang kecil kecil ini sedangkan promovendus ibu Reni akan membahas strategi sinergitas kementerian dan Lembaga

kalau tadi bapak bapak sudah menjelaskan apa yang terjadi dan kondisi dari China Selatan dan kondisi yang ada secara *Outward looking* mari kita juga melihat secara in good looking jadi memang kita tidak bisa mengenyampingkan bahwa ada berbagai macam kepentingan dalam hal ini. sekarang kita lihat saja dalam penanganan Covid 19 Amerika sangat disayangkan pendekatan ke ASEAN hanya dalam bidang keamanan sementara China lebih dulu masuk menggunakan pendekatan ekonomi sebagai mitra dagang strategis ASEAN dan diplomasi vaksin selain keamanan tetapi sekarang Amerika sudah mulai sadar bahwa hal itu tidak mungkin mereka tidak lakukan jadi mereka juga tidak melakukan hampir sama yang dilakukan dengan China.

Ketegangan di laut China Selatan, China sebagai kekuatan besar ekonomi dengan soft power dan militer hard power untuk menguasai jalur perdagangan Indo Pasifik, Belt Road Inniciatives dengan membangun beberapa pelabuhan di negara partisipan dan fasilitas militer di kepulauan Laut China Selatan untuk kepentingan strategis China yang membawa ancaman di kawasan kita harus ingat juga bahwa hal ini adalah peran aktif kedua negara ini kita tidak bisa abaikan juga dengan unsur unsur yang ada di dalam kepemimpinan kedua belah negara tersebut

saya akan sedikit membahas mengupas terkait dengan Amerika Serikat kalo dulu kita melihat Donal TRUMPH itu adalah karakternya isolasionis jadi tidak terlalu banyak

cawe cawe urusan yang berbau outward looking dari Amerika tetapi sekarang justru kita harus hati hati dengan Biden karena Biden ini adalah internasionalis atau biasa disebut globalis.

saya mencatat bahwa Biden ini akan punya pendekatan yang lebih agresif di dalam cawe cawe kepada negara negara yang terkait di dalam persetujuan antara China dan Amerika ini mungkin kita bisa lihat hal ini sebagai suatu hal yang tidak mudah karena Amerika sudah mulai terasa melakukan intervensi seperti halnya di beberapa wilayah di Indonesia. Sedikit kita melakukan perlawanan atau tanda kutip tidak setuju atas keputusan Amerika dengan kaitannya dengan Laut China Selatan maka di usik lah Papua juga akan proxy proxy akan masuk ke wilayah departemen departemen yang ada di Indonesia. itu juga harus menjadi satu hal yang harus dipikirkan

Disini saya akan masuk ke kementerian lembaga yang memiliki kepentingan Amerika Serikat dan China sesuai dengan bidang lembaga nya. Tidak bisa kita katakan bahwa kementerian lain selain kemlu selain ke Menkopolkam, kemudian TNI dengan tiga matra juga secara inward adalah Polri. Kita tidak bisa abaikan bahwa ada disini kehati-hatian untuk menangkap versus antara Amerika dan China kita melihat saja beberapa departemen yang kita lihat mungkin tidak ada kaitannya dengan konflik ini tetapi seperti departemen perdagangan, departemen perindustrian katakan saja sebagai contoh itu Alangkah mudahnya terbaca pimpinan dari departemen tersebut itu pro ke mana, dan ini kita bisa lihat kadang saya sendiri melihat saya sangat sayang sekali hal itu menimbulkan Carut Marut komunikasi politik yang bisa terbaca oleh masyarakat. Sebagian masyarakat kita sudah demikian cerdas dapat melihat bahwa ada ketidaksinambungan antara satu departemen dengan departemen lain ketika harus berhadapan dalam mengelola kepentingan kepentingan ini. Ada satu ke Menko yang pro China satu lagi pro yang netral , yang satu lagi pro Amerika.

Coba kita mulai melihat itu sebagai suatu hal yang harus sebenarnya diwaspadai. Tadi ada usulan dari Danguspurla bagus sekali sih usulannya seperti Dewan keamanan nasional, nasional ocean policy. Dewan keamanan nasional itu sudah dibahas dalam Pansus Kamnas, sampai hari ini tidak masuk prolegnas itu mengapa harus juga dibaca beberapa kepentingan yang ada di Senayan di situ Pemutus hal hal itu adalah tokoh tokoh politik yang tentunya tidak bisa lepas dari visi dan misi partainya hal ini tidak begitu mudah itu harus ada approach yang secara kontinyu dilakukan dan meyakinkan bahwa semua akan dapat keuntungan apabila ada dewan keamanan nasional.

Memang hal itu kalo ada Alangkah baiknya dulu saja kalau saya bicara mengenai keamanan nasional ini dalam Pansus itu diperdebatkan "K" besar atau "K" kecil itu Keamanan, hal yang seperti belum kelar atau belum selesai. Jadi mungkin ke depan harus ada yang sesuai judul ibu Reni ini sinergitas jadi secara komunikasi politik harus

duduk bersama dan betul betul ingat terhadap unsur pimpinan kedua negara yang mengalami konflik itu seperti apa presiden China sendiri merupakan orang yang sangat Progresif dan tidak muncul lagi bawa dia dari partai komunis karena sangat Progresif dan sangat, intelejen dari intelejen China itu sangat pragmatis menerapkan pendekatan pendekatan ekonomi kepada pihak bukan kepada lembaga itu kadangkala kepada Pemutus dari suatu lembaga pimpinannya saya tidak bisa katakan itu menterinya atau bisa saja menterinya atau Dirjen nya itu sangat pandai.

Disatu Sisi yang lain intelijen Amerika Serikat itu lebih substantif tetapi karena lebih substantif tetapi lebih kaku. Saat ini saya melihat intelijen Amerika mulai belajar bagaimana China mendekatkan diri kepada subjek, negara negara sub jek nya yaitu dengan langkah langkah yang bersifat pragmatis.

Saya tidak perpanjang lebar, jadi dalam hal ini kita melihat melihat bahwa dalam pembacaan konflik Laut China Selatan versus China dan Amerika Serikat kita tidak boleh meninggalkan peran IPOLEKSOSBUD dari negara klaim/ claimant states. Mereka punya kepentingan tapi kepentingan itu bukan hanya perang di lautan, bukan hanya kepentingan yang bersifat konflik perang konvensional tetapi kita harus ingat bahwa perang ke depan adalah perang hibrida di situ harus kita lihat Irregular warfare di mana perang kognitif untuk mempengaruhi claimant states, maupun non claimant states untuk mencari dukungan itu juga sudah terjadi bukan akan terjadi oleh karena itu dalam hal ini masukan terhadap peneliti bahwa hal hal ini jangan dianggap kecil karena peran dari IPOLEKSOSBUD dari claimant states itu berperan besar dari pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi hal ini dan terhadap sinergitas nya.

secara inward looking masih terdapat carut marut antara kementerian dan lembaga yang ada. Jadi kita juga harus berhati hati munculnya perang jenis baru yaitu seperti perang kognitif seperti irreguler warfare akan menambah ketidaksinkronan antara lembaga akhir kata Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat berharap bahwa nanti disertai ini akan memunculkan satu gagasan bukan hanya yang bersifat terlalu tinggi seperti yang disampaikan Danguspurla, sarannya aga dangkik-dangkik, karena saya juga berperan dalam RUU kamnas yang tidak jadi sampai sekarang. tetapi harus kita selesaikan dulu komunikasi politik antar lembaga baru apa yang sangat mulia seperti dewan keamanan nasional atau national ocean policy itu bisa dilaksanakan dengan baik dan sekarang kita harus juga tau bahwa Bakamla dengan TNI AL apakah sudah satu pemikiran dalam hal ini. Hal itu juga harus diselesaikan, antara TNI AL dan Bakamla untuk itu Bakamla harus dapat menyesuaikan dan Tugas dari Kemenko Polhulam banyak sekali bagaimana ke depannya untuk menciptakan suatu kondisi di mana meminimalkan konflik yang ada bukan konflik tetapi perang komunikasi politik yang ada antara

kementerian dan lembaga demikian dari saya terima kasih semoga bermanfaat
Wassalamu'alaikum warahmatullahi barokatu.

LAMPIRAN 2.12 TRANSKRIP AKADEMISI UNHAN RI

Prof. A.A Banyu Perwita

Guru Besar UNHAN

Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan khususnya dan Kemenko Polhukam, kalau tadi sudah banyak membicarakan tentang data substansial China Selatan berkenan cara saya untuk memberikan masukan barangkali yang terkait dengan analytical tools, alat ketika nanti promovendus akan membahas mencoba menjawab pertanyaan penelitian mungkin perlu mempertimbangkan apa yang disebut dengan Governance Colaboratif Theory dari Broomly Emerson dan Abacy 2015 karena ini saya dapat menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan tadi ketika berbicara mengenai kebijakan nasional. Jadi ketiadaan kebijakan nasional tadi juga sudah diungkapkan oleh mbak Nuning, itu mungkin karena kita tidak mempunyai data yang disebut sebagai Governance Colaboratif Theory, apakah teori ini, paling tidak didefinisi sederhananya adalah merupakan suatu proses untuk pengambilan keputusan yang melibatkan beragam stakeholders yang berbeda di negara (K/L) yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama atau kepentingan bersama. Kepentingan bersamanya apa, tujuan bersama nya apa sudah ditentukan sangat jelas ketika kita menyebutkan kepentingan nasional. Jadi teori ini akan bicara mengenai tiga tataran.

yang pertama adalah level kebijakan (policy level) siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab mengambil kebijakan terkait hal ini terkait dengan laut China Selatan, study kasusnya. kemudian bagaimana organisasi institusi mana yang perlu memiliki katakan lah tanggung jawab yang lebih besar daripada yang lainnya, meskipun ini kolaboatif. dan kemudian bagaimana implementasi di lapangan atau operasional level ini tiga tataran. Tiga tataran ini akan dibagi menjadi dua, pertama adalah konteks partnership jadi semua institusi tadi seperti yang dikatakan tadi memang harus mempunyai komunikasi politik yang baik, partnership di antara mereka yang baik jangan satu dengan yang lainnya mempunyai merasa lebih tinggi atau tidak atau rendah. Kemudian yang kedua adalah masalah networking, pertanyaannya kemudian adalah organ mana yang bisa mengatasi ini semua karena tadi mbak Nuning berbicara tentang dewan keamanan nasional saya mungkin bisa akan menjadi salah satu yang muncul menjadi rekomendasi disertai ini walaupun belum ada barangkali baru ini harus bisa secara tegas atau menjawab apakah dibawa ke Menkopolhukam atau Kemenko Lainnya. Tapi intinya adalah ada kolaboratif kebijakan disini karena kebijakan nasional tadi itu

belum ada dan mungkin karena berbicara tentang Laut China Selatan yang memiliki dimensi History, dimensi Legal kemudian dimensi Geopolitik, kemudian dimensi ekonomi dan lainnya maka kita bicara bisa bicara mengenai sebuah dalam tanda kutip tadi yang diusulkan Nuning adalah dewan keamanan nasional kenapa karena nanti kita akan bicara mengenai kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, kebijakan ekonomi bahkan tadi dikatakan IPOLEKSOSBUD, jadi saya pikir ini perlu sekali kita garisbawahi sehingga nanti kita data data yang sudah dikumpulkan oleh Reni itu akan bisa digunakan dan dijawab dengan menggunakan seperangkat teori saya mengusulkan untuk mempertimbangkan kemudian ada beberapa lainnya juga menggunakan teori ini Governance Colaboratif Theory, ini perlu diperhatikan karena sekali lagi kita membutuhkan sinergi kan itu Poinnya dengan demikian saya pikir ini adalah merupakan hal yang sangat penting karena kita berbicara mengenai beragam stakes holder tadi yang mempunyai kepentingan yang berbeda beda jadi ada sebuah lembaga yang dapat menampung semua perbedaan tadi. Jujur memang kita sangat hirau sangat konsen tentang analisa tools yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian disertai tadi.

LAMPIRAN 2.13 HASIL WAWANCARA MABES TNI

I **Bagaimana Rencana Strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?**

- 1 Apa dan bagaimana cara yang dilakukan oleh Indonesia sesuai tugas dan fungsi K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

Walaupun Indonesia bukan salah satu negara *claimant state* terhadap Laut China Selatan, namun Indonesia khususnya TNI tetap harus mewaspadaikan potensi konflik yang terjadi di Laut China Selatan dengan penambahan kekuatan TNI yang beroperasi di wilayah tersebut.

- 2 Bagaimana rencana politik luar negeri dan target RI, khususnya kebijakan pertahanan Indonesia dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

Salah satu yang menjadi fokus pembangunan kekuatan TNI saat ini adalah pembangunan pulau-pulau terluar yang memiliki nilai strategis dan rawan konflik, seperti Pulau Natuna. Rencana tersebut telah diimplementasikan dalam pembangunan Satuan TNI Terintegrasi (STT) Natuna yang akan menjadi pangkalan awal bagi unsur-unsur TNI yang melaksanakan operasi di perairan Laut China Selatan.

- 3 Bagaimana cara menyelesaikan/mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Perwujudan stabilitas keamanan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi/lembaga tertentu saja. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dari seluruh komponen bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang mantap guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

- 4 Bagaimana kondisi keamanan nasional Indonesia saat ini dihadapkan dengan konflik persaingan AS-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

Kondisi keamanan nasional Indonesia hingga saat ini relatif aman dan tidak terpengaruh oleh konflik AS – China di Laut China Selatan karena

Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut.

- 5 Mengapa Laut China Selatan penting bagi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional Indonesia? Apa yang membuat LCS penting bagi keamanan nasional Indonesia?

Jawaban:

Laut China Selatan memiliki arti penting bagi perekonomian Indonesia karena perairan ini kaya akan sumber daya alam dan energi serta merupakan salah satu perairan yang ramai dilintasi oleh kapal-kapal niaga baik yang berbendera Indonesia ataupun berbendera asing. Perairan ini juga menjadi pusat konflik antara China dengan negara-negara claimant state sehingga akan berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Laut China Selatan memiliki peran penting bagi keamanan nasional Indonesia.

- 6 Apa dan bagaimana kepentingan Indonesia di Laut China Selatan dan strategi apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Indonesia memiliki kepentingan untuk mengamankan kekayaan sumber daya alam di Laut China Selatan dari kegiatan-kegiatan ilegal, seperti IUU fishing, transnational crime, dll. Indonesia juga berkepentingan untuk menjamin keamanan pelayaran bagi kapal-kapal yang berlayar di perairan tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka TNI melaksanakan penguatan pembangunan kekuatan di Pulau Natuna dan meningkatkan intensitas operasi oleh unsur-unsur TNI AL dan TNI AU di perairan tersebut.

- 7 Apa dan bagaimana posisi dan kepentingan Indonesia dihadapkan dengan kondisi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif telah memposisikan Indonesia sebagai negara Non-Blok yang tidak memihak negara manapun, sehingga dalam persaingan AS-China di Laut China Selatan, Indonesia merupakan negara netral. Namun demikian, Indonesia khususnya TNI harus tetap mewaspadaai potensi konflik di perairan tersebut, karena Indonesia memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yaitu Laut Natuna.

- 8 Apa tujuan atau rencana strategis yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

Dalam rangka mengantisipasi persaingan AS – China di Laut China Selatan, TNI telah melaksanakan penguatan pembangunan kekuatan TNI di Pulau Natuna dan meningkatkan intensitas operasi di wilayah tersebut.

- 9 Apa saja ancaman yang perlu diwaspadai Indonesia untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

Potensi ancaman yang mungkin timbul sebagai dampak persaingan AS-China di Laut China Selatan, adalah:

- 1) Pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal militer asing (AS dan China).
- 2) Pelanggaran udara oleh pesawat-pesawat militer asing (AS dan China).
- 3) Konflik bersenjata antara AS – China di Laut China Selatan.
- 4) Agresi militer/invasi oleh AS atau China terhadap Indonesia (dhi Pulau Natuna) utk dijadikan sbg pangkalan aju kekuatan militer negara tersebut.

II Bagaimana sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Kondisi Saat Ini)?

- 1 Apa dan bagaimana target yang ingin dicapai dalam sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

Adapun yang menjadi sasaran dalam sinergitas K/L guna mengantisipasi persaingan AS – China di Laut China Selatan adalah terwujudnya kesamaan pemahaman/pola pikir dan pola tindak mengenai arti penting pertahanan di perairan Laut China Selatan dalam menegakkan kedaulatan negara yang diimplementasikan melalui gelar operasi terpadu.

- 2 Bagaimana dan apa saja upaya/cara yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

Untuk dapat mencapai target dan tujuan sinergitas K/L dalam

mengantisipasi persaingan AS – China di Laut China Selatan, dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komunikasi antar personel dari masing-masing *stake holder* (K/L) mulai dari level pimpinan hingga personel yang bertugas di lapangan.
 - 2) Melaksanakan kegiatan operasi secara terpadu antar *stake holder* di bidang pertahanan dan keamanan di perairan Laut China Selatan.
 - 3) Melakukan *sharing information* melalui Pusat-pusat Informasi yang dimiliki oleh masing-masing *stake holder* terkait perkembangan keamanan dan situasi di Laut China Selatan.
- 3 Sumber daya apa saja yang diperlukan/perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan sesuai rencana strategi Kementerian/Lembaga demi pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Sumber daya yang dapat digunakan oleh TNI untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional, antara lain:

- 1) Sumber Daya Manusia/Prajurit
 - 2) Alutsista TNI
 - 3) Anggaran Pertahanan
- 4 Bagaimana strategi K/L dalam menjaga sinergitas antar Lembaga dalam menghadapi ancaman persaingan Amerika-China di LCS?

Jawaban:

Sinergitas dalam rangka menghadapi ancaman persaingan AS – China di Laut China Selatan merupakan suatu bentuk keterpaduan para pemangku kepentingan (*stake holder*) di bidang pertahanan dan keamanan yang harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh oleh pimpinan K/L hingga personel/prajurit di lapangan serta dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

- 5 Bagaimana strategi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

Strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Mewujudkan keterpaduan operasi dalam bidang pertahanan dan keamanan antar K/L di perairan Laut China Selatan.
- 2) Melaksanakan *sharing information* terkait perkembangan

keamanan di Laut China Selatan

- 6 Apa yang sudah dilakukan oleh K/L sebagai upaya sinergitas dan menjaga stabilitas kawasan dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

1. Melaksanakan rapat koordinasi terkait keamanan di Laut China Selatan.
2. Melaksanakan sharing information mengenai update keamanan di Laut China Selatan.
3. Melaksanakan patroli terkoordinasi oleh TNI (dhi TNI AL dan TNI AU/Ops Pam ALKI) dengan K/L terkait.

- 7 Apakah ada rencana kegiatan atau program bersama dari K/L yang bersangkutan untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

Guna mengantisipasi persaingan AS – China di Laut China, TNI telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan kekuatan TNI di Pulau Natuna (salah satunya adalah dengan pembentukan STT Natuna)
- 2) Patroli terkoordinasi oleh TNI AL dan TNI AU di Laut China Selatan (Ops Pam ALKI)
- 3) *Monitoring update* situasi keamanan di Laut China Selatan melalui Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI.

- 8 Sejauh mana sinergitas antara K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? Jika dihadapkan dengan fakta saat ini, bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi persaingan AS-China di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

TNI telah melakukan langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi konflik AS – China di Laut China Selatan, khususnya melalui pembangunan kekuatan TNI, pengerahan personel dan Alutsista serta gelar operasi di perairan Laut China Selatan.

- 9 Apakah terdapat aturan atau regulasi yang mencakup sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China di Laut China Selatan.

Jawaban:

Hingga saat ini belum ada regulasi atau peraturan perundang-

undangan yang menjadi payung hukum sinergitas K/L dalam menghadapi persaingan AS – China di Laut China Selatan.

- 10 Saat ini, K/L mana yang menjadi leading sector dalam melaksanakan sinergitas untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan demi menjaga stabilitas keamanan nasional? Apakah K/L tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mensinergikan K/L terkait?

Jawaban:

Upaya mewujudkan sinergitas antar K/L tersebut telah dilaksanakan oleh Kemenko Polhukan sebagai Koordinator K/L di bidang pertahanan dan keamanan. Hingga saat ini, Kemenko Polhukan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mensinergikan K/L terkait.

- 11 Mengapa diperlukan sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? Apa kaitannya dengan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Persaingan AS-China di Laut China Selatan berpotensi menjadi konflik terbuka yang akan melibatkan secara langsung/tidak langsung negara-negara yang berbatasan dengan perairan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas K/L khususnya *stake holder* di bidang pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi potensi tersebut.

Persaingan AS-China telah berdampak pada politik dan ekonomi global, khususnya di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Selatan (Indo Pacom), sehingga pastinya juga akan berdampak pada stabilitas keamanan nasional Indonesia.

- 12 Bagaimana urgensi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan? dan bagaimana hubungannya dengan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Sinergitas K/L sangat diperlukan untuk menjamin kesiapan dan keberhasilan Indonesia dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan. Dengan terwujudnya sinergitas tersebut, maka Indonesia dapat mengantisipasi dampak persaingan AS-China dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga stabilitas keamanan nasional dapat terjaga dan tidak terdampak oleh persaingan tersebut.

- 13 Apa saja faktor yang mempengaruhi sinergitas K/L dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan?

Jawaban:

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sinergitas K/L, antara lain:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya Manusia.
- 3) Teknologi informasi yang dibutuhkan untuk *sharing information*.
- 4) *Interoperability* Alutsista / wahana operasi.

- 14 Apa saja kendala yang dialami oleh K/L dalam melaksanakan strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Adapun kendala yang dialami dalam mewujudkan sinergitas K/L untuk mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan, antara lain:

- 4) Keterbatasan komunikasi SDM/personel yang berdinam di lapangan.
- 5) Keterbatasan teknologi informasi yang digunakan untuk *sharing information* terkait *update* situasi keamanan di Laut China Selatan.
- 6) Keterbatasan interoperability Alutsista/wahana operasi yang digunakan oleh masing-masing *stake holder* di perairan Laut China Selatan.

III **Bagaimana Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?**

- 1 Apa dan bagaimana goals/target yang ingin dicapai pemerintah RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Terciptanya perairan Laut China Selatan yang aman bagi kegiatan pelayaran serta kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam melalui sinergitas K/L guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional.

- 2 Apa saja ancaman yang dihadapi RI dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional sebagai dampak persaingan AS-China di Laut China Selatan,

adalah:

- 1) Pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal militer asing (AS dan China).
- 2) Pelanggaran udara oleh pesawat-pesawat militer asing (AS dan China).
- 3) Konflik bersenjata antara AS – China di Laut China Selatan.
- 4) Agresi militer/invasi oleh AS atau China terhadap Indonesia (dhi Pulau Natuna) utk dijadikan sbg pangkalan aju kekuatan militer negara tersebut.

- 3 Sumber daya apa saja yang dibutuhkan atau perlu dikembangkan dalam upaya antisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Sumber daya yang dapat digunakan oleh TNI untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional, antara lain:

- 1) Sumber Daya Manusia/Prajurit
- 2) Alutsista TNI
- 3) Anggaran Pertahanan

- 4 Bagaimana strategi sinergitas yang dilakukan oleh K/L dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Mewujudkan keterpaduan operasi dalam bidang pertahanan dan keamanan antar K/L di perairan Laut China Selatan.
- 2) Melaksanakan *sharing information* terkait perkembangan keamanan di Laut China Selatan.

- 5 Bagaimana potensi atau kesempatan strategi sinergitas untuk mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Sinergitas antar *stake holder* (K/L) yang terkait bidang pertahanan dan keamanan merupakan upaya strategis untuk mengantisipasi persaingan AS – China di Laut China Selatan. Sinergitas ini memungkinkan masing-masing K/L dapat berinteraksi untuk bersama-sama meningkatkan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan tersebut, sehingga dapat menjaga stabilitas keamanan nasional.

- 6 Bagaimana prediksi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional dan sejauh mana kesiapan K/L dalam mengantisipasi hal tersebut?

Jawaban:

Persaingan AS-China di Laut China Selatan berpotensi menjadi konflik terbuka yang akan melibatkan secara langsung/tidak langsung negara-negara yang berbatasan dengan perairan tersebut.

TNI telah melakukan langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi konflik AS – China di Laut China Selatan, khususnya melalui pembangunan kekuatan TNI, pengerahan personel dan Alutsista serta gelar operasi di perairan Laut China Selatan.

- 9 Bagaimana upaya K/L untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sinergitas K/L dalam rangka mengantisipasi persaingan AS – China di Laut China Selatan, antara lain:

- a) Meningkatkan komunikasi antar personel dari masing-masing *stake holder* (K/L) mulai dari level pimpinan hingga personel yang bertugas di lapangan.
- b) Melaksanakan kegiatan operasi secara terpadu antar *stake holder* di bidang pertahanan dan keamanan di perairan Laut China Selatan.
- c) Melakukan *sharing information* melalui Pusat-pusat Informasi yang dimiliki oleh masing-masing *stake holder* terkait perkembangan keamanan dan situasi di Laut China Selatan.

- 10 Apa saja target capaian dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Target capaian dalam mengantisipasi persaingan AS – China di Laut China Selatan untuk pengembangan stabilitas keamanan nasional, adalah:

- 1) Terwujudnya komunikasi yang intensif antar personel dari masing-masing *stake holder*, khususnya yang bertugas di lapangan.

- 2) Terwujudnya teknologi informasi yang mampu melaksanakan *sharing information* dari masing-masing *stake holder* terkait *update* situasi keamanan di Laut China Selatan.
 - 3) Terwujudnya *interoperability* Alutsista/wahana operasi yang digunakan oleh masing-masing *stake holder* di perairan Laut China Selatan.
- 11 Apa saja langkah strategis yang dilakukan dalam mengantisipasi persaingan Amerika-China untuk pengembangan penjagaan stabilitas keamanan nasional?

Jawaban:

Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi persaingan AS – China di Laut China Selatan, antara lain:

- a) Terwujudnya komunikasi yang intensif antar personel dari masing-masing *stake holder*, khususnya yang bertugas di lapangan.
 - b) Terwujudnya teknologi informasi yang mampu melaksanakan *sharing information* dari masing-masing *stake holder* terkait *update* situasi keamanan di Laut China Selatan.
 - c) Terwujudnya *interoperability* Alutsista/wahana operasi yang digunakan oleh masing-masing *stake holder* di perairan Laut China Selatan.
- 12 Dalam pelaksanaan sinergitas, K/L mana yang seharusnya mempunyai mandat untuk mengkoordinasikan strategi tersebut dan bagaimana implementasinya?

Jawaban:

Untuk mewujudkan sinergitas antar K/L dalam rangka mengantisipasi persaingan AS – China di Laut China Selatan, telah dikoordinir oleh Kemenko Polhukan sebagai Koordinator K/L di bidang pertahanan dan keamanan. Hingga saat ini, Kemenko Polhukan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mensinergikan K/L terkait.

Jakarta, November 2021

Saptono Syiwarudi, S.Sos., M.Si

Kolonel Czi Nrp 11930091130670

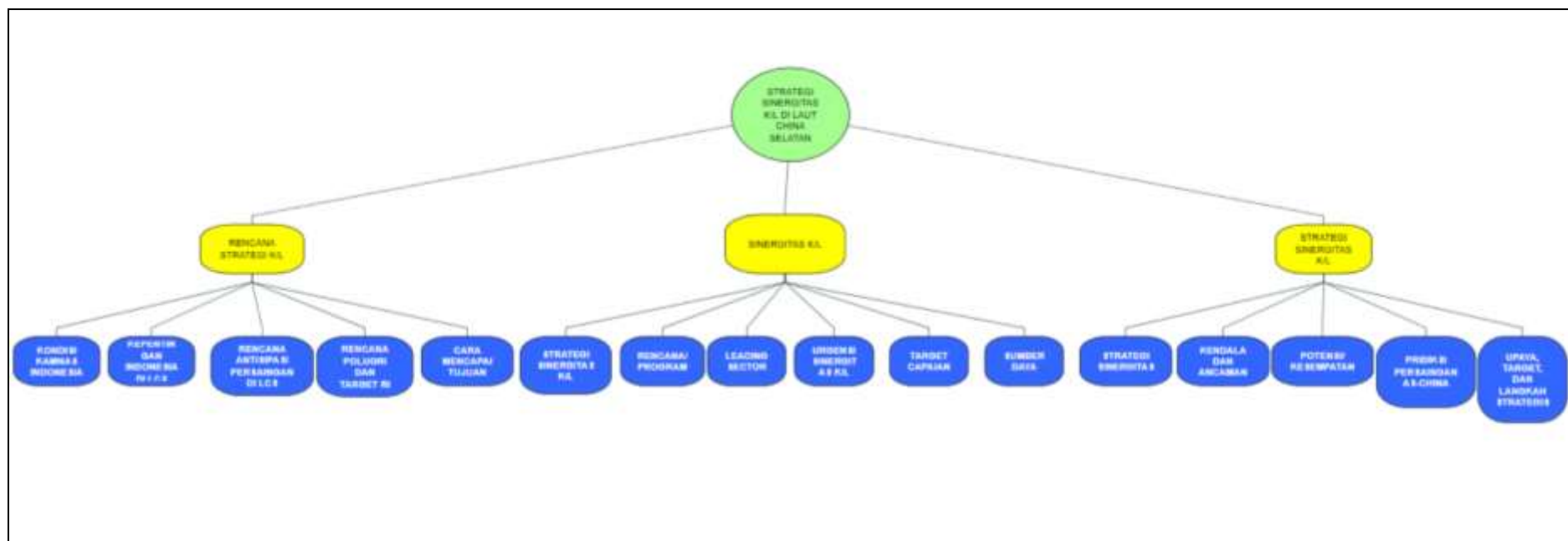
LAMPIRAN 3 HASIL PENGOLAHAN NVIVO

HASIL PENGOLAHAN NVIVO INPUT DATA

STRATEGI SINERGI K L DI LAUT CHINA SELATAN.mvp - NVivo 12 Pro

Name	Codes	References	Modified On	Modified By	Classification
1. Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan - Kemenko Marvest		2	12/7/2021 8:41 PM	YD	
2. Direktur PSDKP- KKP		12	12/7/2021 8:41 PM	YD	
3. Deputi Politik Hankam - Bappenas		13	12/7/2021 8:41 PM	YD	
4. Deputi Jakstra Bakamla		10	12/7/2021 8:41 PM	YD	
5. Dirjen Strahan - Kemhan		15	12/7/2021 8:41 PM	YD	
6. Danguspura Koarmada 1		5	12/7/2021 8:41 PM	YD	
7. Direktur HPI Kemenlu		6	12/7/2021 8:41 PM	YD	
8. Dr Susaningtyas Kartopati		6	12/7/2021 8:41 PM	YD	
9. Prof. A.A Banyu Perwita		2	12/7/2021 8:41 PM	YD	
10. Dep Koor Lugri - Polhukam		5	12/7/2021 8:41 PM	YD	
11. Asisten Operasi Kasal		16	12/7/2021 8:41 PM	YD	
14. Bappenas		4	12/7/2021 8:41 PM	YD	
12. Subdit Dirjen Bina Wil - Kemendagri		16	12/11/2021 12:58 PM	YD	
13. Asrenum TNI		15	12/11/2021 12:58 PM	YD	

MIND MAPING



PEMBENTUKAN MODEL/KATEGORISASI NODES

The screenshot shows the NVivo 12 Pro interface with the following data in the Nodes table:

Name	Files	References	Created On	Created By	Modified On	Modified By
SINERGITAS K L DI LCS	0	0	12/7/2021 7:56 PM	YD	12/7/2021 7:56 PM	YD
RENCANA STRATEGI KL	0	0	12/7/2021 7:57 PM	YD	12/7/2021 7:57 PM	YD
KONDISI KAMNIAS RI	12	20	12/7/2021 7:58 PM	YD	12/11/2021 1:22 PM	YD
KEPENTINGAN RI DI LCS	10	28	12/7/2021 7:58 PM	YD	12/11/2021 1:23 PM	YD
RENC ANTISIPASI PERSAINGAN	8	12	12/7/2021 7:58 PM	YD	12/11/2021 1:24 PM	YD
RENC POLUGRI	5	12	12/7/2021 7:59 PM	YD	12/11/2021 1:23 PM	YD
CARA CAPAI TUJUAN	7	15	12/7/2021 7:59 PM	YD	12/11/2021 1:22 PM	YD
SINERGITAS KL	0	0	12/7/2021 7:59 PM	YD	12/7/2021 7:59 PM	YD
STRATEGIS SINERGITAS	8	20	12/7/2021 7:59 PM	YD	12/11/2021 1:24 PM	YD
RENC PROGRAM	7	19	12/7/2021 7:59 PM	YD	12/11/2021 1:24 PM	YD
LEADING SECTOR	5	8	12/7/2021 7:59 PM	YD	12/11/2021 1:22 PM	YD
URGensi SINERGITAS	6	12	12/7/2021 8:00 PM	YD	12/11/2021 1:26 PM	YD
TARGET CAPAI	6	12	12/7/2021 8:00 PM	YD	12/11/2021 1:26 PM	YD
SUMBER DAYA	5	10	12/7/2021 8:00 PM	YD	12/11/2021 1:26 PM	YD
STRATEGI SINERGITAS	0	0	12/7/2021 8:00 PM	YD	12/7/2021 8:00 PM	YD
STRATEGI SINERGITAS	9	20	12/7/2021 8:00 PM	YD	12/11/2021 1:27 PM	YD
KENDALA DAN ANCAMAN	11	28	12/7/2021 8:01 PM	YD	12/11/2021 1:26 PM	YD
BOTEKSI VECEMADATAN	10	16	12/7/2021 8:01 PM	YD	12/11/2021 1:26 PM	YD

KODING

The screenshot displays the NVivo 12 Pro software interface. The main window shows a document titled "STRATEGI SINERGITAS K L DI LAUT CHINA SELATAN.nvp". The interface is divided into several sections:

- Menu Bar:** File, Home, Import, Create, Explore, Share, Node Tools.
- Toolbar:** Includes tools for Memo Link, See Also Link, Content, Zoom, Annotations, Quick Coding, Layout, Coding Stripes, Highlight, Code, Uncode from This Node, Spread Coding, Code In Vivo, Uncode, New Annotation, Word Cloud, Chart, Compare With, Explore Diagram, Query This Node, and Find.
- Left Sidebar:**
 - Quick Access:** Files, Memos, Nodes, File Classification, Externals.
 - Codes:** Nodes, Relationships, Relationship Types.
 - Cases:** Cases, Case Classification.
 - Notes:** Notes.
 - Search:** Search.
 - Maps:** Maps.
- Nodes Panel:** A table showing the project's node structure:

Name	Files	Refer...
SINER	0	
RE	0	
I	10	
I	12	
I	7	
I	8	
I	5	
SIN	0	
I	8	
I	7	
I	6	
I	6	
I	5	
I	5	
- Main Workspace:** Displays a text document with a highlighted section titled "Referensi 3 - 7.88% Coverage". The text discusses strategic aspects for Indonesia, including:
 - 1) Aspek Strategis.
 - a) Dengan akses yang dimiliki oleh Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka Indonesia dapat mengambil upaya dan langkah-langkah strategis dengan mendesak PBB untuk segera dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghentikan konflik terbuka di Laut China Selatan mengingat kerugian dan dampak regional serta global yang ditimbulkan.
 - b) Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan seluruh skema diplomasi dan kerja sama internasional yang ada, terutama kerja sama ASEAN/ASEAN-Plus di mana AS maupun China sebagai sesama mitra dialog ASEAN diharapkan dapat diajak duduk bersama dalam forum dialog dalam upaya mencegah dan meredakan eskalasi yang berpotensi kepada konflik terbuka antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan.
 - c) TNI AL melaksanakan peran diplomasi melalui forum multilateral (IOPNS, WPNS) maupun bilateral (NTNT) dan forum-forum internasional lainnya untuk menginspirasi semangat kerja sama internasional melalui kegiatan latihan bersama maupun kegiatan lainnya dalam rangka meredakan dan menghentikan ketegangan antara China dan Amerika Serikat.
 - d) Bila semua upaya damai tersebut tidak dapat terealisasi, maka Pemerintah Indonesia harus dapat menjamin seluruh wilayah dan penduduk Indonesia terutama yang berada di sekitar area konflik tidak akan terdampak oleh konflik terbuka atau perang yang terjadi.

The screenshot shows the NVivo 12 Pro software interface. The main window displays a project titled "STRATEGI SINERGITAS K L DI LAUT CHINA SELATAN.nvp". The interface is divided into several sections:

- Menu Bar:** File, Home, Import, Create, Explore, Share, Node Tools.
- Toolbar:** Includes tools for Memo Link, Content, Zoom, Annotations, Quick Coding, See Also Links, Coding Stripes, Highlight, Code, Unscale from This Node, Spread Coding, Code In Vivo, Unscale, New Annotation, Annotations, Word Cloud, Chart, Compare With, Explore Diagram, Visualize Node, Query This Node, and Find.
- Nodes Table:** A table listing nodes and their associated files and references.

Name	Files	Referenc
SINERGITAS K L DI LCS	0	0
RENCANA STRATEGI KL	0	0
RENC POLLUGRI	5	12
CARA CAPAI TUJUAN	7	15
RENC ANTISIPASI PER	8	12
KEPENTINGAN RI DI L	10	28
KONDISI KAMNAS RI	12	20
SINERGITAS KL	0	0
LEADING SECTOR	5	8
SUMBER DAYA	5	10
URGENSI SINERGITAS	6	12
TARGET CAPAI	6	12
RENC PROGRAM	7	19
STRATEGIS SINERGITA	8	20
STRATEGI SINERGITAS	0	0
STRATEGI SINERGITAS	9	20
- Main Text View:** Displays a reference snippet titled "STRATEGI SINERGITAS (Nodes)\SINERGITAS K L DI LCS\STRATEGI SINERGIT". The text discusses "Referensi 1: 1.81% Coverage" and "Referensi 2: 1.88% Coverage".
- Bottom Bar:** Shows the current node path: "STRATEGI SINERGITAS (Nodes)\SINERGITAS K L DI LCS\STRATEGI SINERGIT". It also displays the number of items (20), files (11), and references (28).

The screenshot displays the NVivo 12 Pro software interface. The title bar indicates the project name: "STRATEGI SINERGITAS K L DI LAUT CHINA SELATAN.nvp - NVivo 12 Pro". The main window is divided into several sections:

- Menu Bar:** File, Home, Import, Create, Explore, Share, Node Tools.
- Toolbar:** Includes tools for Memo Link, Content, Zoom, Annotations, Quick Coding, Layout, Coding Stripes, Highlight, Code, Uncode from This Node, Spread Coding, Code In Vivo, Uncode, New Annotation Annotations, Word Cloud, Chart, Compare With, Explore Diagram, Query This Node, and Find.
- Nodes List (Left Panel):** A hierarchical tree structure showing nodes and their associated files and references.

Name	Files	Referenc
SINERGITAS K L DI LCS	0	0
RENCANA STRATEGI KL	0	0
RENC POLUGRI	5	12
CARA CAPAI TUJUAN	7	15
RENC ANTISIPASI PER	8	12
KEPENTINGAN RI DI L	10	28
KONDISI KAMNAS RI	12	20
SINERGITAS KL	0	0
LEADING SECTOR	5	8
SUMBER DAYA	5	10
URGENSI SINERGITAS	6	12
TARGET CAPAI	6	12
RENC PROGRAM	7	19
STRATEGIS SINERGITA	8	20
STRATEGI SINERGITAS	0	0
STRATEGI SINERGITAS	9	20
- Main Text Area:** Displays a reference snippet with Indonesian text. The snippet is titled "Referensi 2 - 541% Coverage" and contains the following text:

Yang kedua, bebas aktif tadi juga sudah disebutkan pemerintah perlu mengedepankan penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang damai Dan memegang Teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif
Yang ketiga adalah Sentralitas ASEAN Indonesia mengedepankan mengajak negara negara lain untuk menerapkan prinsip ASEAN yakni treaty of amily dan corporation dalam menghadapi dinamika sengketa Laut China Selatan

Referensi 3 - 465% Coverage

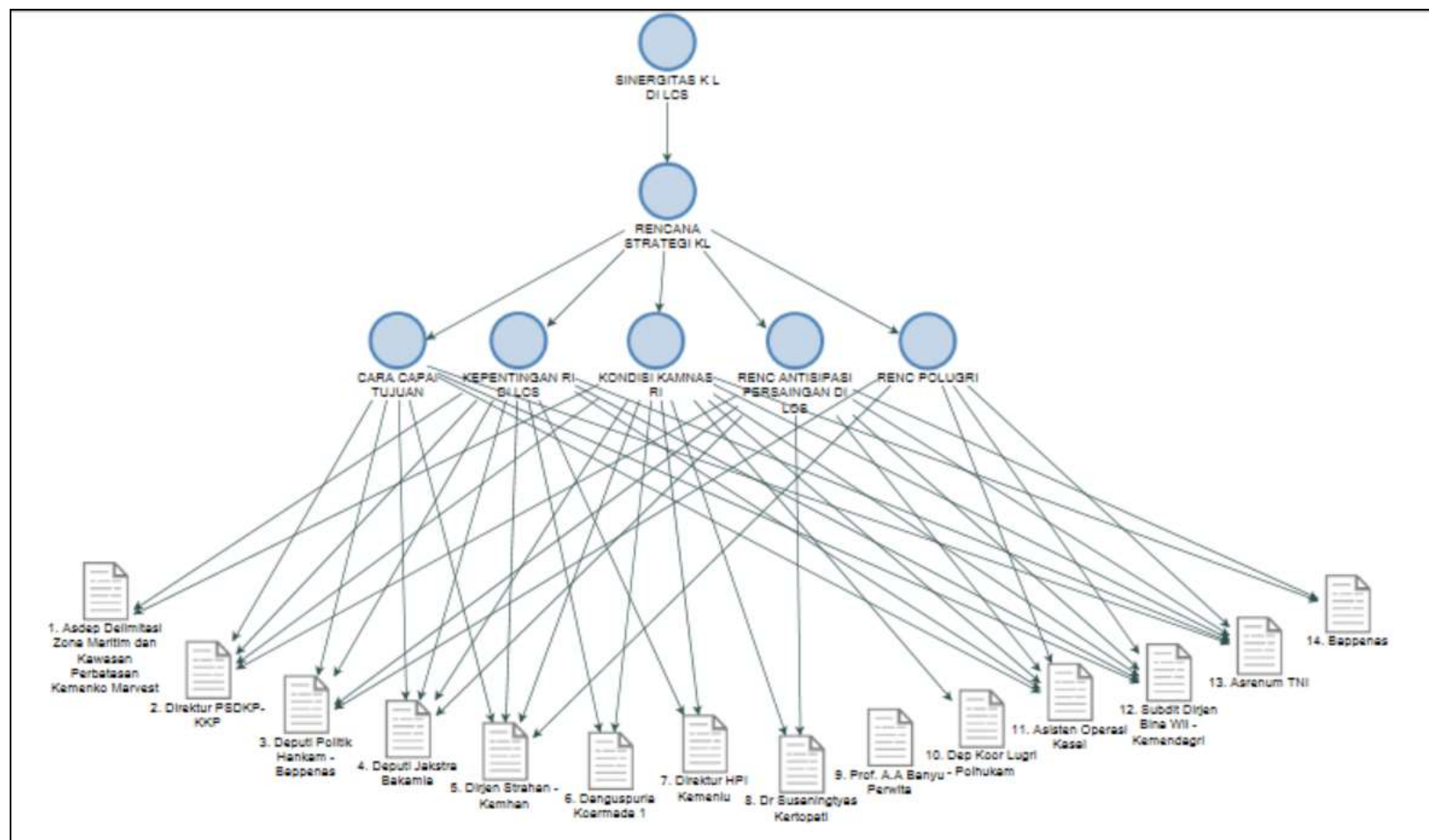
rumusan kebijakan/kerangka kebijakan tadi sudah disebutkan oleh pembicara terdahulu itu menjadi faktor penentu kerangka penganggaran kerangka regulasi juga kerangka kelembagaan artinya kerangka Bagian itu bukan hanya berarti organisasi tetapi juga tata kelola kega apabagian itu bukan hanya berarti organisasi tetapi bisnis proses nya seperti apa

Referensi 1 - 123% Coverage

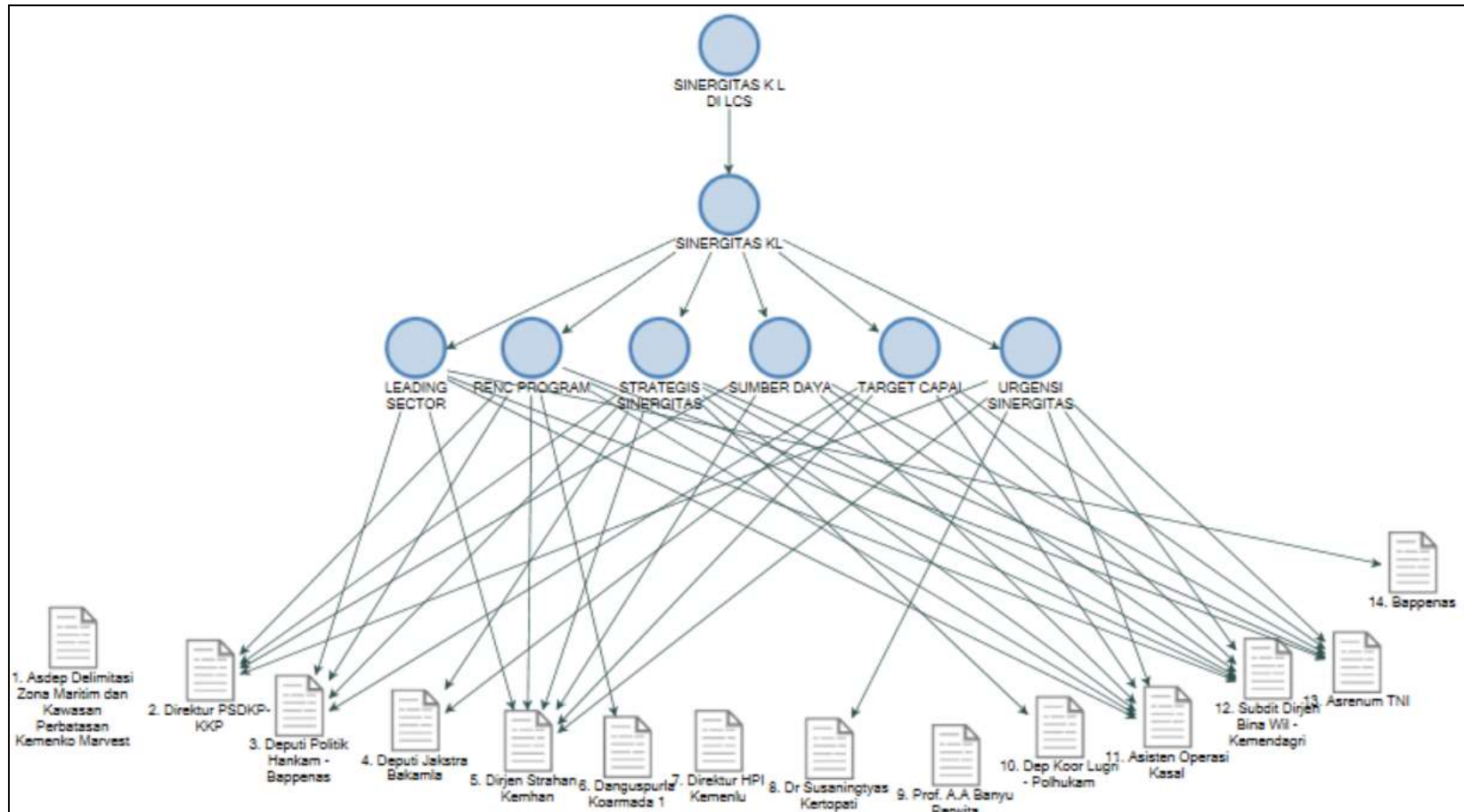
Sementara itu, faktor eksternal mengacu pada dinamika di luar ruang lingkup

The bottom status bar shows "20 Items", "Files: 5", "References: 12", and "Unfiltered". The system tray at the bottom right shows the time as 1:47 PM on 12/11/2021.

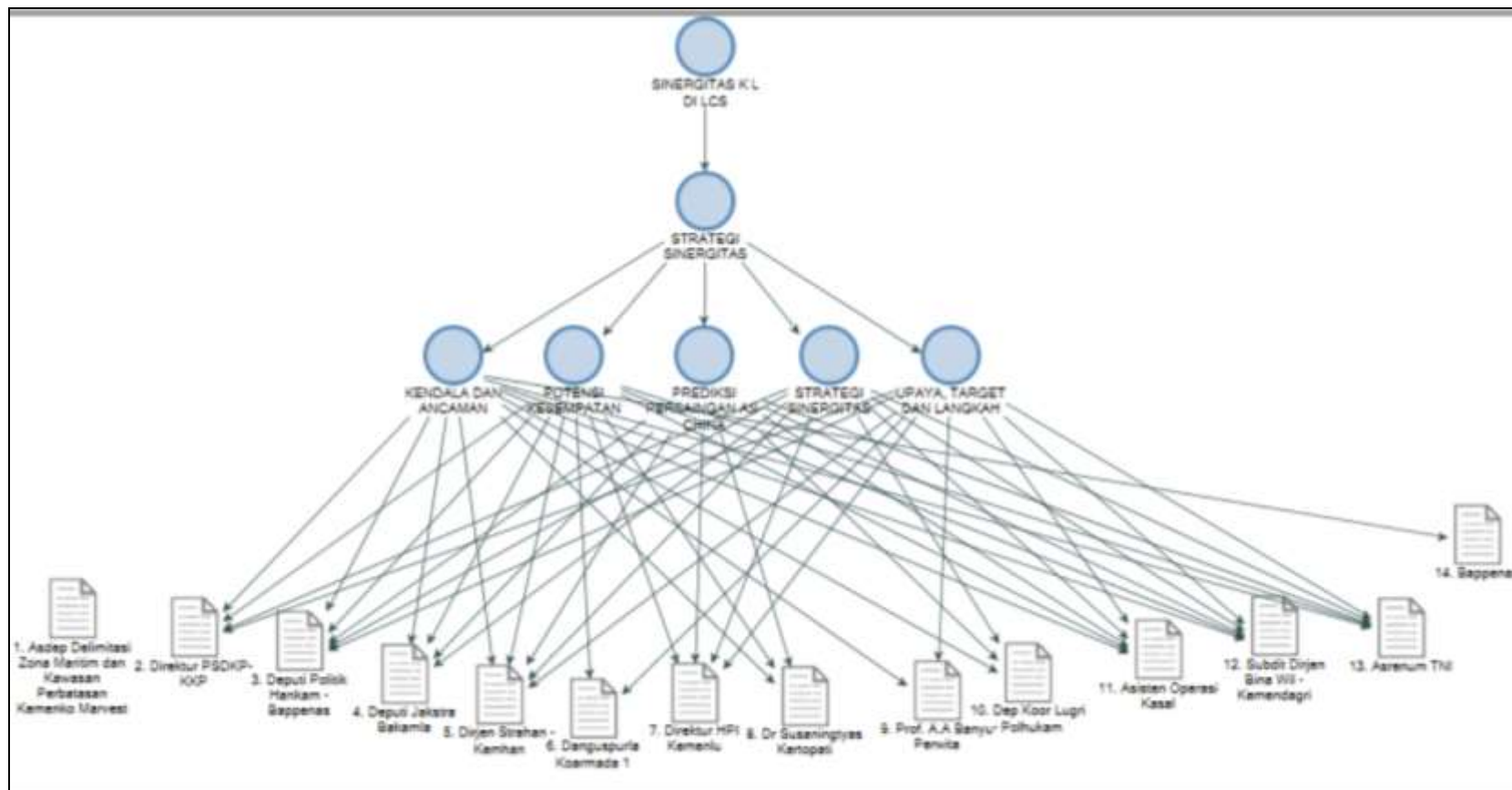
PERTANYAAN LIT 1



PERTANYAAN LIT 2



PERTANYAAN LIT 3



HIERARKI (BANYAKNYA KODING)



NOTE: PALING LUAR DAN WARNA GELAP PALING BANYAK DIBAHAS (DIKODING)

LAMPIRAN 4 SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021

Kepada
Yth. Deputi Bidang Polhukam
Bappenas

di
Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktorat Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan RI
a.n. Direktur Program Doktorat,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Deputi Kebijakan dan Strategi
 – BAKAMLA
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 Dr. Jom Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR,
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Deputi Bidkooor Pollugri
 Kemenko Polhukam
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 Dit. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021

Kepada

Yth. Deputi Bidkooor Hanneg
 Kemenko Polhukam
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 Jh. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Dirjen Strahan Kemhan
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 a.n. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Dirjen Asia Pasifik Kemlu
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 a.n. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Mayjend TNI Kup Yanto
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 Jh. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Nuning Kertopati
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Ibu memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 Yth. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Sekjen Wantanas
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 Dr. Jom Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR,
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Kabaharkam POLRI
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 Yth. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021

Kepada

Yth. Deputi Bidkooor Kedaulatan dan Energi – Kemenko Maritim dan Investasi

di

Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Deputi memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 a.n. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021

Kepada

Yth. Deputi Bidkooor Kedaulatan dan Energi – Kemenko Maritim dan Investasi

di

Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai September 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Deputi memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 Dr. Jom Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR,
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Asrenum TNI
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai Agustus 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 Jh. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Asops KASAL
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai Agustus 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 Jh. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Pangkoarmada I
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai Agustus 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 a.n. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Danguspurta Koarmada I
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai Agustus 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 a.n. Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri

di

Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai Agustus 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 PIR, Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021
 Kepada
 Yth. Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si
 di
 Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai Agustus 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 PIR, Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021

Kepada

Yth. Mayjen TNI Kup Yanto Setiono,
 M.A. (Tenaga Ahli Pengajar
 Bidang Strategi)

di

Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai Agustus 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 PIR, Direktur Program Doktoral,

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1809 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.

Jakarta, 07 Juli 2021

Kepada

Yth. Deputi Bidang Polhukam Bappenas

di

Jakarta

1. Dasar :
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Surat Perintah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/631/VI/2020 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penugasan sebagai Pelaksana Harian di lingkungan Universitas Pertahanan.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat dikirimkan permohonan izin melaksanakan penelitian mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertahanan Konsentrasi Strategi Pertahanan atas nama Renny Setiowati NIM: 220190201015 dengan judul "Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan". Adapun penelitian akan dilaksanakan antara bulan Juli sampai Agustus 2021 menyesuaikan waktu narasumber.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapatnya Bapak Jenderal memberikan izin dan informasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh mahasiswa Renny Setiowati nomor HP: 0813-3052-0055.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.



a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan RI
 Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek II dan Warek III Unhan RI.

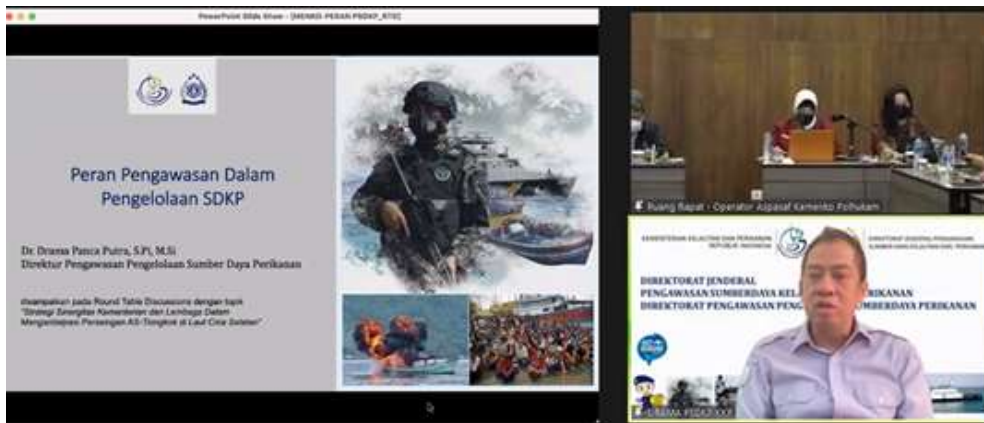
LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI WAWANCARA





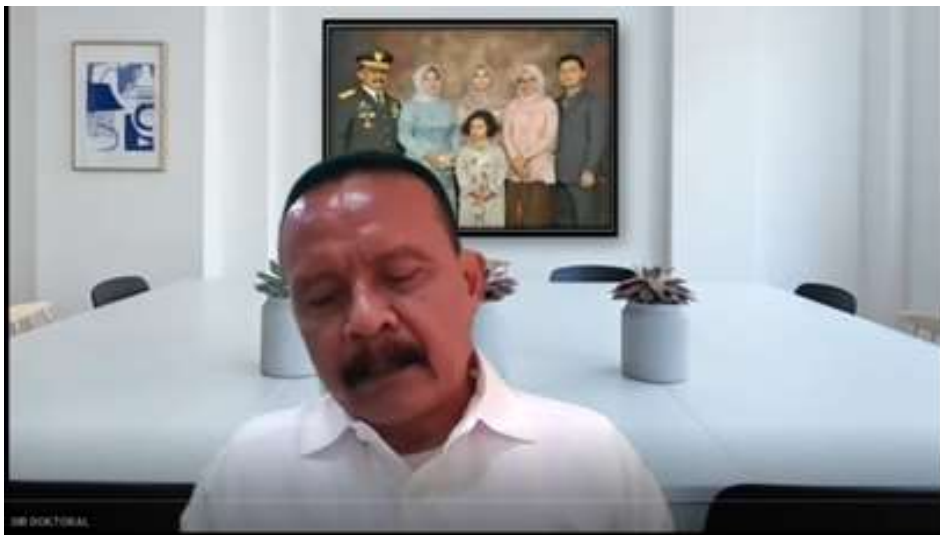
LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI PAPARAN DAN ZOOM





STRATEGI SINERGITAS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DALAM MENGANTISIPASI PERSAINGAN AMERIKA-CHINA DI LAUT CHINA SELATAN

Oleh :
DR. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.SI







“LAUT CINA SELATAN
Perlu sebuah kebijakan
nasional”

Dr. Pribadi Sutiono, SS, MA
KEMENKO POLHUKAM



Kementerian PPN/
Bappenas

**Strategi Indonesia Bernavigasi dalam
Rivalitas Amerika Serikat - Tiongkok
di Laut Cina Selatan**

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan -
Kementerian PPN/Bappenas

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nama : Renny Setiowati, S.T., M.Sc., MTr. Hanla
 Pangkat/NRP : Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 14160/P
 TTL : Surabaya, 3 September 1975
 Alamat Rumah : Jl. Cempaka Putih Barat II J No 5C,
 Jakarta Pusat
 Jabatan : Kabid Bilateral Asia Pasifik – Kemenko Polhukam
 Status : K/2

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Umum

SD HANGTUAH VII	1987
SMP HANGTUAH II	1990
SMA NEGRI 18	1993
S-1 UPN VETERAN	1998 (Fak. Teknik Sipil dan Perencanaan)
S-2 NTU	2006 (International Relations)
SINGAPORE	

Pendidikan Militer

Perwira Karir Angk-6	1999
DIKSARGOL ANGK-9	2000
DIKSPESPA STAF	2005
APLIKASI DIKLAPA II	2009
DIKREG SESKOAL52	2014

Riwayat Jabatan

15012000	KAUR OSEANOGRAFI – DISHIDROS TNI AL – MABESAL
10122002	KASUBSI KIMBIO – DEPIPTEK - AKADEMI ANGKATAN LAUT
01022009	KAMATIKA – DEPIPTEK – AKADEMI ANGKATAN LAUT
10012010	PABANDYA DALPROGAR – SRENA – KOARMATIM
15102011	PABANDYA RENSTRA – SRENA – KOARMATIM
15082012	KABAG MINU – SETUM – KOARMATIM
11122014	KASETUM ARMATIM
24032015	PASPROGAR – STAFIB - KOARMATIM
15052016	KASUBBAG TU DEPUTI II BIDKOOR POLLUGRI
18102018	KABID KERJA SAMA BILATERAL ASPASAF KEMENKOPOLHUKAM
10022022	KOMANDAN LANAL BANDUNG